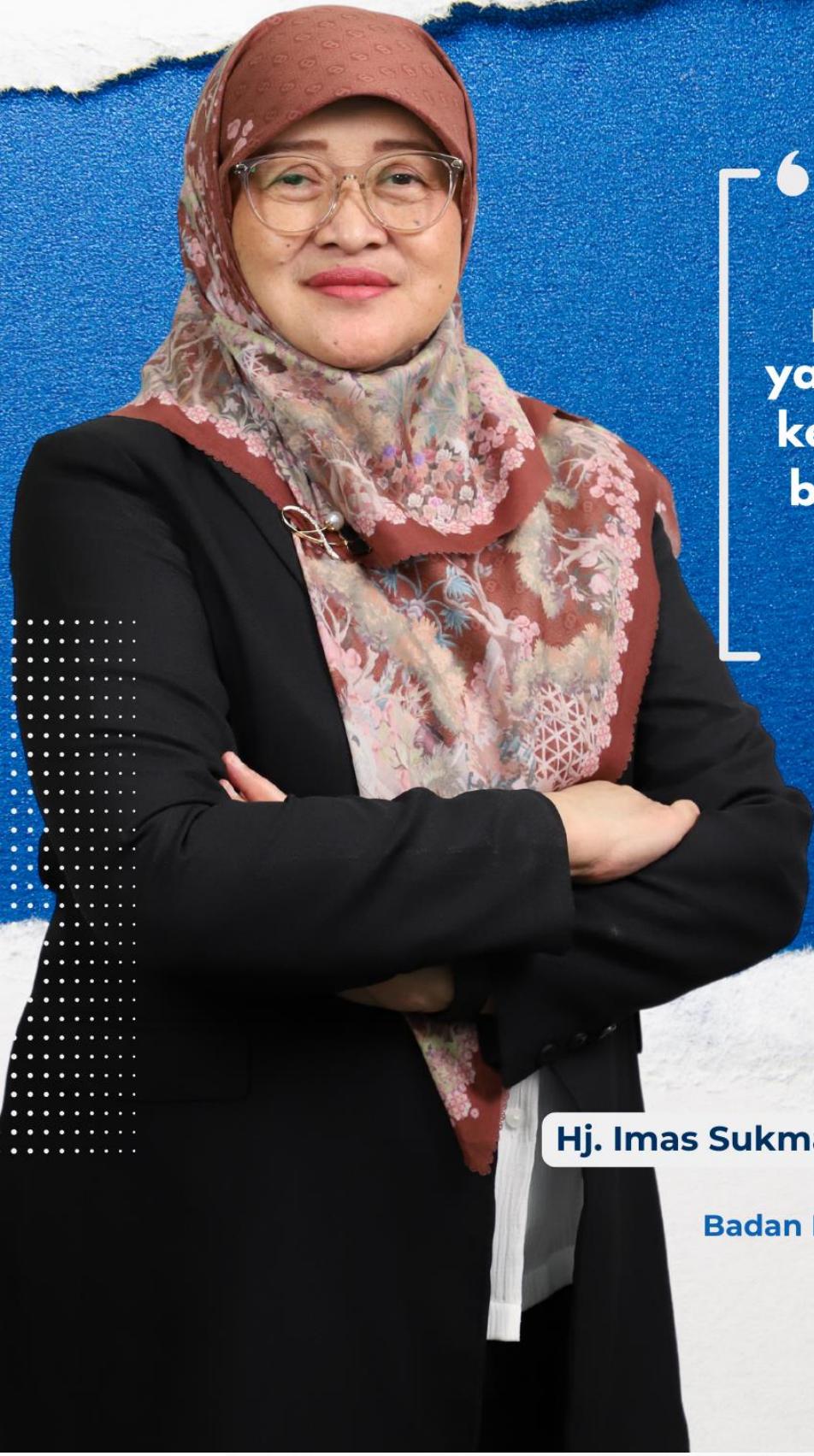




2024

Laporan Kinerja **SEKRETARIAT UTAMA**



**“Sebaik-baiknya
pemimpin adalah
yang mengutamakan
kepentingan rakyat,
bukan kepentingan
pribadi atau
kelompok.”**

Hj. Imas Sukmariah, S. Sos, M.A.P

**Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara**

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024 adalah suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Sekretaris Utama BKN. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target kinerja dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024 ini

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan; sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Utama BKN; serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 21 Februari 2025

Sekretaris Utama

Badan Kepegawaian Negara

\$

IKHTISAR EKSEKUTIF

B

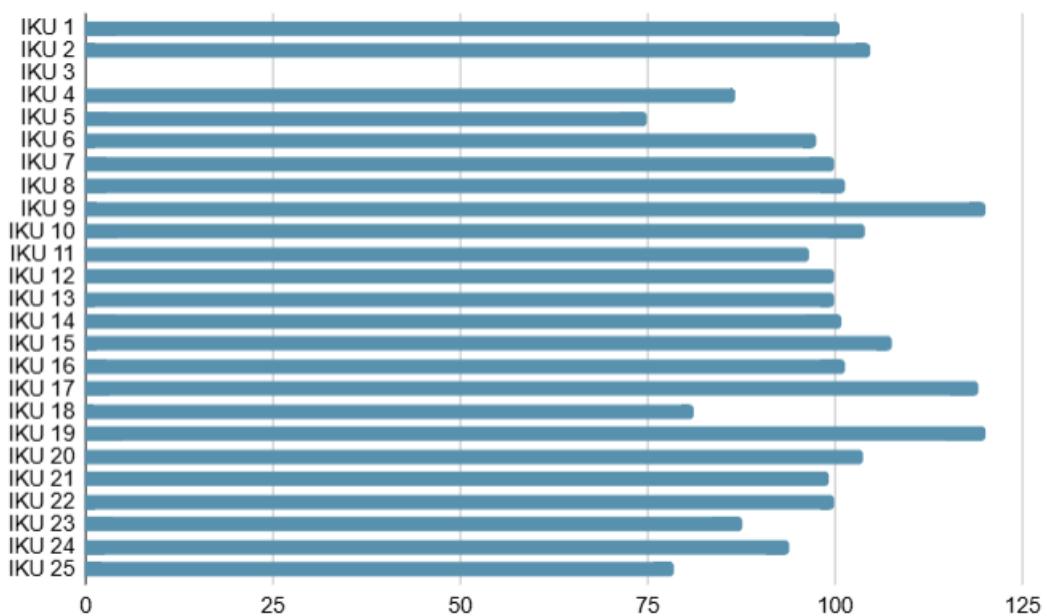
erpedoman pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1.8/KEP/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Kontrak Kinerja ditetapkan dalam empat perspective berdasarkan prinsip manajemen kinerja berbasis

Balanced Scorecard (BSC) yaitu stakeholder, customer, internal process dan learn and growth. Adapun Rencana Strategis Sekretariat



Utama ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10.2/KEP/SESTAMA/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024.

Sekretariat Utama BKN pada tahun 2024 telah menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 25 IKU terdapat 11 IKU yang capaiannya melebihi 100%, 11 IKU capaiannya bernilai baik (di atas 80%), 2 IKU mendapat nilai cukup dan 1 IKU belum mendapatkan penilaian per Desember 2024.



Grafik 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Utama Tahun 2024

Berdasarkan grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Utama Tahun 2024 di atas, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja Utama Sekretaris Utama 2024 adalah 100,02 (Baik) dengan rincian terdapat sebelas IKU yang capaiannya diatas 100% yakni IKU 1 (104,30%), IKU 2 (104,75%), IKU 8 (100,23%), IKU 9 (120%), IKU 10 (104,03%), IKU 14 (100,86%), IKU 15 (107,48%), IKU 16 (101,38%), IKU 17 (119,05%), IKU 19 (120%), IKU 20 (103,84%). Terdapat 11 IKU

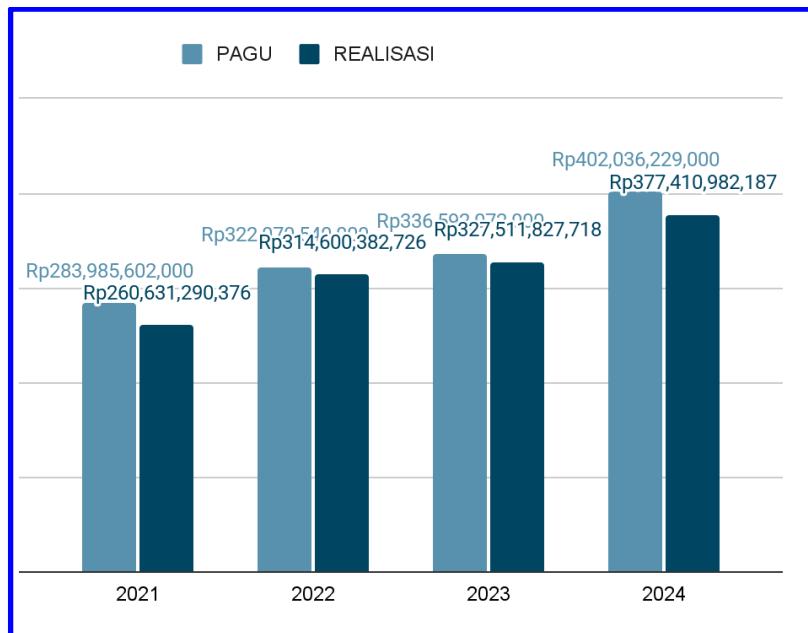
dengan kategori “Baik” atau capaian range $80 \leq 100$, yaitu IKU 4 (86,58%), IKU 6 (97,44%), IKU 7 (100), IKU 11 (96.44%), IKU 12 (100%), IKU 13 (100%), IKU 18 (81,05%), IKU 21 (99,20%), IKU 22 (100%), IKU 23 (87,69%), IKU 24 (93,87%) dan IKU 25 (82,14%). Selain itu, terdapat dua IKU yang mendapatkan kategori “Cukup” yakni IKU 5 (75%) dan IKU 25 (71,87%) , serta terdapat satu IKU kategori N/A yakni IKU 3 ,Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikarenakan nilai RB belum dikeluarkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi.

Tahun 2024 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 100,03% yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif. Nilai Kinerja Perspektif (NKP) Tahun 2024 didapatkan dari Nilai Sasaran Strategis (NSS) dikalikan dengan unsur pembobotan untuk *customer perspective* sebesar 33.33%, *internal process perspective* sebesar 33.33% dan *learn and growth perspective* sebesar 33.33%.

Customer perspective mendapat nilai kinerja perspektif 33,55% dan skor sasaran strategis 100,66%. Skor sasaran strategis tersebut diperoleh dari capaian 11 IKU di *customer perspective*. Disamping itu *internal process perspective* mendapat nilai kinerja perspektif 34,83% dengan skor sasaran strategis 104,51%, pada perspektif ini skor sasaran strategis diperoleh dari 8 IKU yang berada di *internal process perspective*. Pada *learn and growth perspective* mendapat NKP sebesar 31,64% dan skor sasaran strategis 94,94%, nilai skor sasaran strategis diperoleh dari 5 IKU di *learn and growth perspective*.

Pada tahun 2024, Pagu anggaran Sekretariat Utama BKN setelah *refocusing* anggaran adalah sebesar Rp402.036.229.000,00 dari pagu anggaran tahun 2024 tersebut berhasil direalisasikan sebesar

Rp377.410.982.187,00 dengan persentase daya serap sebesar 93,87% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan, untuk realisasi tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp336.592.072.000,00 Sekretariat Utama BKN dapat merealisasikan sebesar Rp328.556.206.919,00 atau sebesar 97,61%.



Grafik 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama 2021-2024

Dampak dari cover penyiapan kenaikan tunjangan kinerja BKN yang direncanakan untuk bisa naik di tahun 2024, namun hingga akhir Desember 2024 hal itu belum terealisasi mengakibatkan realisasi belum bisa terserap secara maksimal. Selain itu, sisa anggaran listrik, air, dan telepon yang tidak dapat dipastikan besaran tagihannya dalam satu tahun anggaran juga menjadi salah satu faktor lainnya. Hal tersebut menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	14
	I.1. GAMBARAN ORGANISASI	15
	1. TUGAS POKOK	15
	2. FUNGSI	15
	I.2. STRUKTUR ORGANISASI	16
	I.3. DUKUNGAN SDM	18
II.	ISU STRATEGIS	20
II.	RENCANA STRATEGIS	23
	II.1. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	24
	II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	27
III.	CAPAIAN KINERJA	33
	III.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	168
	III.3. CAPAIAN ANGGARAN	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024	30
Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2023	36
Tabel 3. Realisasi Target IKU Indeks Profesional ASN BKN	37
Tabel 4. Efisiensi Sumber Daya	39
Tabel 5. Realisasi Target IKU Indeks Maturitas SPBE BKN	44
Tabel 6. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 2	51
Tabel 7. Realisasi Target IKU Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	51
Tabel 8. Realisasi Target IKU Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	62
Tabel 9. Kriteria Penilaian SAKIP	63
Tabel 10. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 4	69
Tabel 11. Realisasi Target IKU Level Maturitas SPIP	69
Tabel 12. Hasil Evaluasi SPIP BKN Tahun 2024	71
Tabel 13. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 5	74
Tabel 14. Realisasi Target IKU Nilai Pelaksanaan Sistem Merit BKN	75
Tabel 15. Perbandingan Nilai Sistem Merit BKN Tahun 2022 & 2024	75
Tabel 16. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 6	78
Tabel 17. Opini atas Laporan Keuangan BKN	78
Tabel 18. Opini BKN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	80
Tabel 19. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 7	91
Tabel 20. Realisasi kinerja Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	92
Tabel 21. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 8	94
Tabel 22. Realisasi Target IKU Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN	99
Tabel 23. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 12	100
Tabel 24. Realisasi Target IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik	101
Tabel 25. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 10	104
Tabel 26. Realisasi Target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	105
Tabel 27. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 11	111
Tabel 28. Realisasi Target IKU Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	112
Tabel 29. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 12	112
Tabel 30. Milestone kluster pegawai Manajemen Talenta	114
Tabel 31. Rekapitulasi Box 9 JPT & JF Manajemen Talenta	114
Tabel 32. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN	115

Tabel 33. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 13	119
Tabel 34. Realisasi Target IKU Indeks Pengelolaan Aset	119
Tabel 35. Parameter Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	120
Tabel 36. Efisiensi Sumber Daya IKU Indeks Pengelolaan Aset	126
Tabel 37. Realisasi Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	128
Tabel 38. Efisiensi Sumber Daya untuk IKU 15	133
Tabel 39. Realisasi kinerja hasil audit kearsipan	134
Tabel 40. Realisasi kinerja hasil audit kearsipan	138
Tabel 41. Realisasi Target IKU Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat	139
Tabel 42. Efisiensi penggunaan sumber daya - IKU 17	140
Tabel 43. Realisasi Target IKU Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati	141
Tabel 44. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 15	143
Tabel 45. Realisasi Target IKU Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya	144
Tabel 46. Analisis Efisiensi Sumber Daya 16	146
Tabel 47. Realisasi Target IKU Indeks Profesional ASN Settama BKN	147
Tabel 48. Perbandingan Penilaian IP ASN Sestama 2023-2024	147
Tabel 49. Perolehan Nilai IP ASN Unit Kerja di Lingkup Sestama	148
Tabel 50. Perbandingan capaian IP ASN unit eselon I BKN	149
Tabel 51. Realisasi Target IKU Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN	150
Tabel 52. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 18	155
Tabel 53. Realisasi Target IKU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN	156
Tabel 54. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Unit Eselon II Settama	157
Tabel 55. Realisasi Target IKU Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup	158
Tabel 56. Komponen Penilaian Pelaksanaan AKIP Settama Tahun 2023 dan 2024	159
Tabel 57. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 23	161
Tabel 58. Realisasi Target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	161
Tabel 59. Realisasi Anggaran di Unit Kerja Settama Tahun 2024	162
Tabel 60. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 21	163
Tabel 61. Realisasi Target IKU Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	164
Tabel 62. Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK Tiap Unit di Sestama	164
Tabel 63. Rincian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Tiap Unit di Sestama	165
Tabel 64. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 25	168
Tabel 65. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama	172

DAFTAR GRAFIK

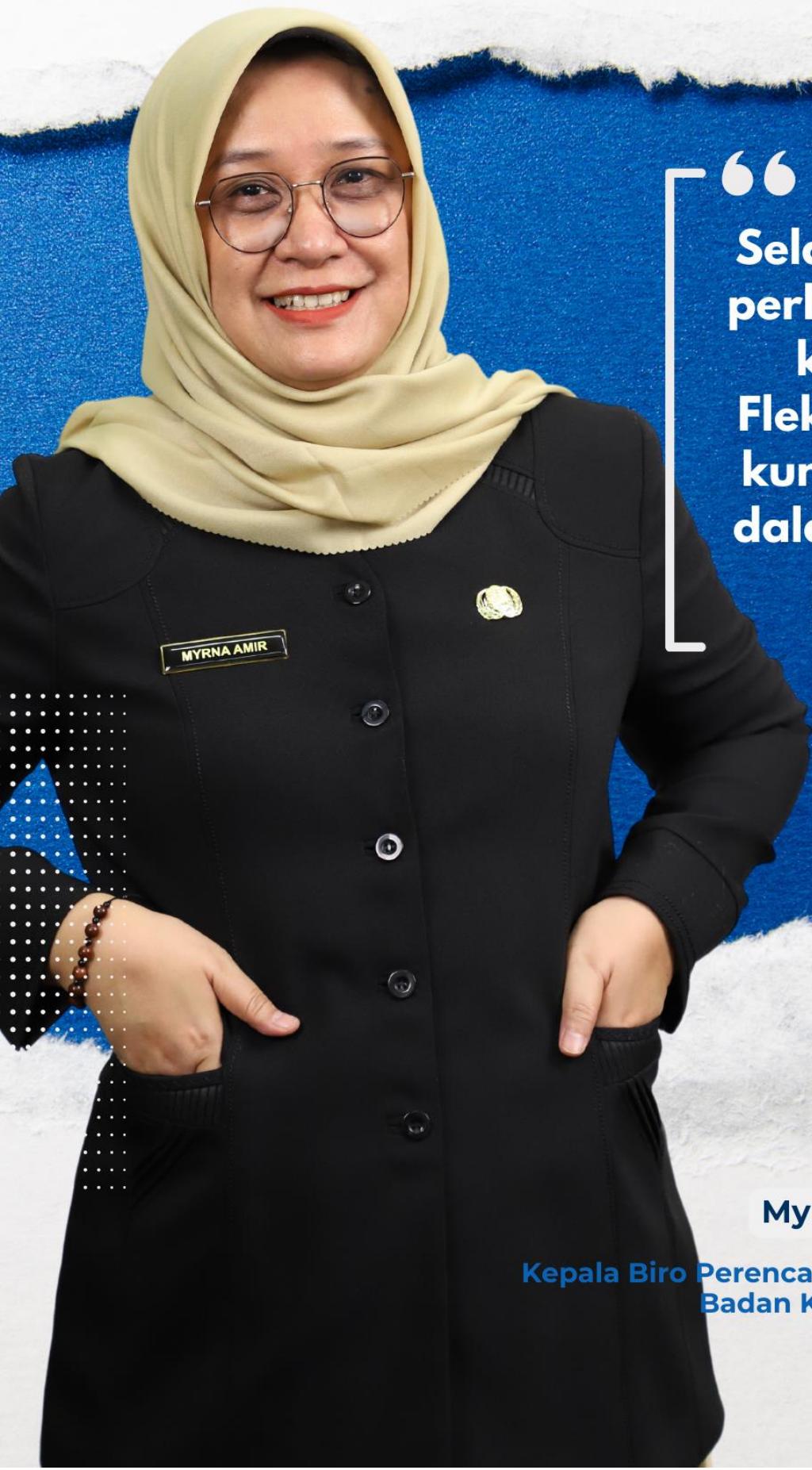
Grafik 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Utama Tahun 2024	2
Grafik 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama 2021-2024	4
Grafik 3. Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Golongan	19
Grafik 4. Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Jabatan	19
Grafik 5. Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Grafik 6. Data Capaian IP ASN BKN Tahun 2022-2024 dibandingkan dengan Nilai Maksimum	39
Grafik 7. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 - 2024 serta Target Kinerja Tahun 2024	48
Grafik 8. Perbandingan Nilai SPBE BKN dan Nilai SPBE Nasional Tahun 2024	48
Grafik 9. Nilai SAKIP BKN Tahun 2020 - 2024	63
Grafik 10. Perbandingan Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) BKN (2020-2024)	95
Grafik 11. Grafik Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja BKN Tahun 2024	96
Grafik 12. Perbandingan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik	102
Grafik 13. Indeks Kepuasan Pelayanan Biro di Lingkungan Sekretariat Utama Tahun 2024	105
Grafik 14. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2024	106
Grafik 15. Penilaian IPA BKN Periode 2021-2024 (sumber: s.id/IPA_BA088)	123
Grafik 16. Indikator Penilaian IPA 2021-2024 (sumber: s.id/IPA_BA088)	123
Grafik 17. Progress ITKP BKN Tahun 2021-2024	128

Grafik 18. ITKP Nasional Tahun 2024	129
Grafik 19. Capaian Nilai Hasil Audit Kearsipan Tahun 2020-2024	134
Grafik 20. Jenis Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	142
Grafik 21. persentase dokumen kerja sama yang disepakati	142
Grafik 22. Media Publikasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	145
Grafik 23. Perbandingan Penilaian IP ASN Sestama 2023-2024	148
Grafik 24. Pemanfaatan Aplikasi di lingkup Sekretariat Utama	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Sekretariat Utama BKN	16
Gambar 2.	Peta Strategis Sekretariat Utama BKN	26
Gambar 3.	Persentase Komposisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama	30
Gambar 4.	Koordinasi Hasil Evaluasi RB BKN Tahun 2023 dengan Kementerian PANRB	54
Gambar 5.	Workshop Agen Perubahan	54
Gambar 6.	Pembahasan RB Tematik	55
Gambar 7.	Input Rencana Aksi dan Monitoring dan Evaluasi RB BKN	57
Gambar 8.	Rapat Koordinasi lanjutan dengan Kementerian PANRB	58
Gambar 9.	Realisasi capaian RB BKN dari Tahun 2018 - 2023	59
Gambar 10.	Rapat Monitoring dan Evaluasi RB BKN TW III Tahun 2024	59
Gambar 11.	Dashboard Aplikasi MAKO	66
Gambar 12.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja	66
Gambar 13.	Penyelarasan Dokumen Perencanaan Kinerja 2024 di Lingkungan BKN	67
Gambar 14.	Kegiatan Benchmarking tim SPIP BKN ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	72
Gambar 15.	Penghargaan Merit Sistem	76
Gambar 16.	Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2023 Entitas	82
Gambar 17.	Enrty Meeting BPK	83
Gambar 18.	Workshop Penyusunan Draft Laporan Keuangan BKN TA 2023 (Unaudited)	85
Gambar 19.	Exit Meeting dengan BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	86

Gambar 20. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN Semester I 2024	87
Gambar 21. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan	88
Gambar 22. Ikhtisar LK BKN TA 2023 (Audited)	89
Gambar 23. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN TW III T.A. 2024	90
Gambar 24. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BKN 088 - Desember 2024	94
Gambar 25. Rapat Koordinasi Kehumasan	99
Gambar 26. Sidang KIP	101
Gambar 27. Penyerahan Penghargaan Peringkat III Reksa Bandha 2024	122
Gambar 28. Gedung UPT BKN Mataram	127
Gambar 29. Gedung UPT BKN Gorontalo	128
Gambar 30. Penyerahan Penghargaan Proaktif dari LKPP	130
Gambar 31. Capaian Nilai Hasil Audit Kearsipan Tahun 2020-2024	136
Gambar 32. Penandatanganan Kerja Sama BKN dengan Pemerintah Kota Palu	141
Gambar 33. RDP Komisi II DPR Persetujuan Tambahan Anggaran 2024	169
Gambar 34. The Biggest Improvement Indeks BERAKHLAK	169
Gambar 35. Nilai Index Pelayanan Publik BKN	171



“Selalu evaluasi dan perbaharui rencana keuanganmu. Fleksibilitas adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan”

,,

Myrna Amir, S.E, M.M

**Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Kepegawaian Negara**

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2024. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Utama BKN dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Utama untuk meningkatkan

kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan BKN bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja BKN, selain itu Sekretariat Utama juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

I.1. GAMBARAN ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 tahun 2020 Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi BKN.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BKN.
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKN.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama dibantu oleh 5 (lima) unit kerja, yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum dan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama.



Gambar 1. Struktur Sekretariat Utama BKN

Sumber: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

Berikut rincian pembagian tugas dan fungsi masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Utama BKN, yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, kegiatan perencanaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan/ anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi dan manajemen

perubahan di lingkungan BKN. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai fungsi:

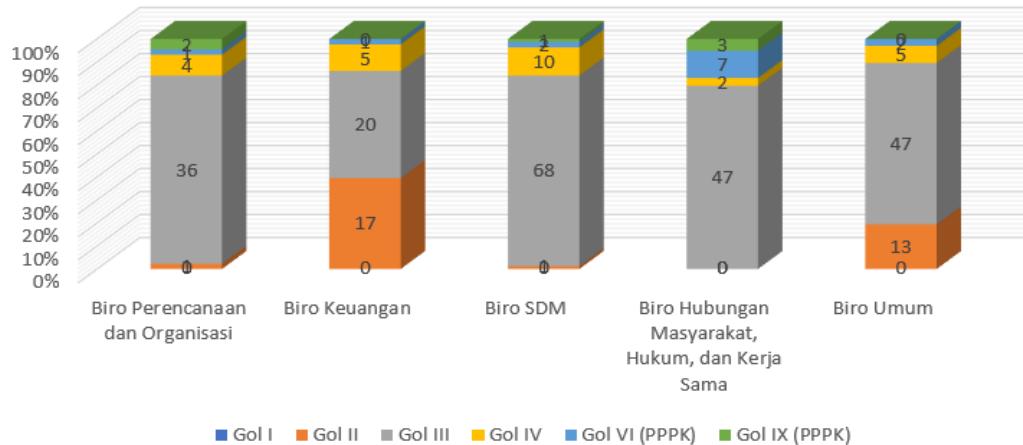
- penyusunan, koordinasi, dan pengawasan rencana program/kegiatan/anggaran BKN untuk periode tahunan dan lima tahunan; penyusunan akuntabilitas, pengelolaan data, dan informasi anggaran; dan
 - peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen perubahan BKN; dan
 - pengelolaan kegiatan dan ketatausahaan Biro Perencanaan dan Organisasi.
2. Biro Keuangan;
- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKN Pusat dan pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta Kantor Regional BKN. Biro Keuangan mempunyai fungsi:
- pelaksanaan perbendaharaan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan tata laksana keuangan;
 - pelaksanaan verifikasi dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - pelaksanaan pelaporan dan pengolahan data keuangan;
 - pembinaan pengelolaan keuangan BKN Pusat dan BKN Regional; dan pengelolaan kegiatan dan ketatausahaan Biro Keuangan.
3. Biro Sumber Daya Manusia;
- mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian dan membina pegawai di lingkungan BKN. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: pengadaan, penempatan pegawai, mutasi kepegawaian, pemberhentian, serta pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan BKN;
- perencanaan pengembangan pegawai, pengembangan kompetensi pegawai dan karier pegawai;

-
- pengelolaan kinerja pegawai, penegakan disiplin serta pengelolaan konseling karier pegawai BKN;
 - pengelolaan kesejahteraan pegawai dan data kepegawaian; dan pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi serta pelaporan pada Biro Sumber Daya Manusia.
4. Biro Umum;
- mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, administrasi, pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga BKN. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
- pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; pelaksanaan urusan administrasi;
 - pelaksanaan pelaporan dan pengolahan data barang milik negara; pelaksanaan barang milik negara; dan
 - pelaksanaan urusan rumah tangga.
5. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama;
- mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepegawaian terpadu, pengaduan masyarakat, pemberitaan, publikasi, keprotokolan, tata usaha Kepala dan Wakil Kepala, hukum, dan kerja sama. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama mempunyai fungsi:
- pengelolaan unit pelayanan kepegawaian terpadu dan pengaduan masyarakat;
 - pengolahan informasi dan publikasi kegiatan; pelaksanaan urusan keprotokolan;
 - pengelolaan tata usaha Kepala dan Wakil Kepala;
 - penyusunan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BKN; dan
 - penyusunan dan fasilitasi administrasi pengelolaan kerja sama.

I.3. DUKUNGAN SDM

Berikut disajikan data pegawai menurut Golongan, Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin di Lingkungan Sekretariat Utama BKN.

Data Pegawai Menurut Golongan

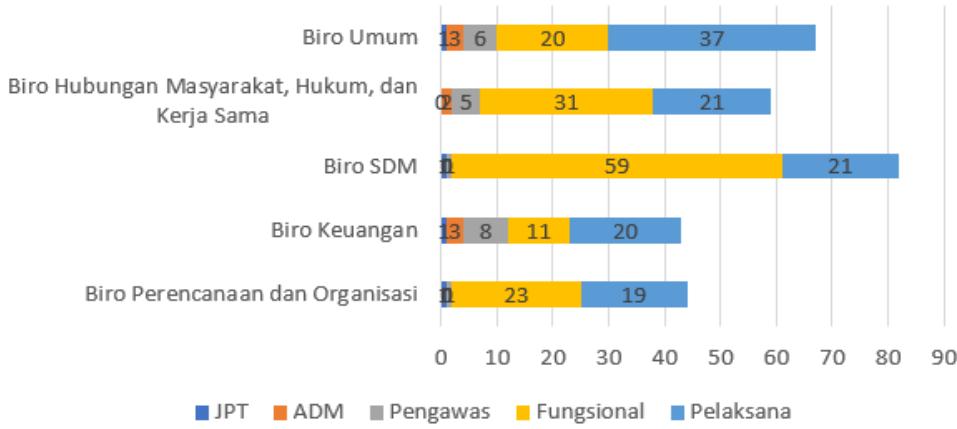


Grafik 3: Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Golongan

Sumber: Data Pegawai Desember 2024 - Biro Sumber Daya Manusia

Sampai dengan laporan ini disusun, Sekretariat Utama tidak memiliki pegawai golongan I dan masih memiliki pegawai golongan II dengan jumlah 32 orang. Berdasarkan komposisinya maka pegawai dengan golongan III yang menempati komposisi terbesar dengan persentase 72% dengan jumlah 218 pegawai.

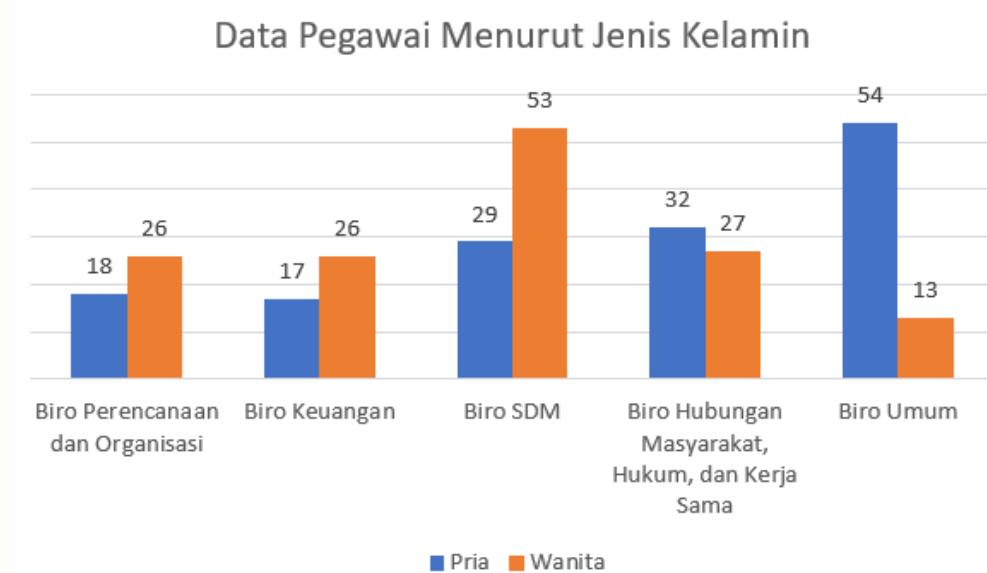
Data Pegawai Menurut Jabatan



Grafik 4. Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Jabatan

Sumber: Data Pegawai Desember 2024 - Biro Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai menurut jabatan pada lingkungan Sekretariat Utama mayoritas menduduki jabatan Fungsional sebesar 48,81% atau 144 dari 295 pegawai. Sedangkan untuk sisanya terdiri atas jabatan pelaksana berjumlah 118 orang, jabatan pengawas 21 orang, jabatan administrator 8 orang, serta jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 4 orang.



Grafik 5. Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Pegawai Desember 2024 Biro Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin per Desember 2024 pada Lingkungan Sekretariat Utama mayoritas wanita sebanyak 145 orang (50,85%) dan pria sebanyak 145 orang atau 49,15% dari jumlah pegawai.

II. ISU STRATEGIS

Sekretariat Utama BKN merupakan unit strategis yang berfungsi untuk mendukung dan mendorong capaian kinerja BKN secara keseluruhan. Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kapasitas organisasi adalah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berbasis elektronik (*e-government*) sehingga target-target kinerja di

lingkungan BKN dapat terwujud.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BKN pada tahun 2024 menghadapi beberapa isu strategis di antaranya:

1. Penguatan fungsi perencanaan dan penganggaran untuk menciptakan sinergitas baik di lingkungan internal maupun eksternal BKN;
2. Penguatan kelembagaan dan Reformasi Birokrasi yang menunjang sasaran strategis BKN termasuk di dalamnya Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menpan RB No. 384 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;
3. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan *e-government*;
4. Peningkatan *Human Capital Management*;
5. Penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal;
6. Peningkatan pelayanan publik.

Maka dari itu untuk menghadapi tantangan dan isu strategis tersebut ditetapkanlah sasaran strategis Sekretariat Utama pada tahun 2023 yang selaras dengan Rencana Strategis ke-7 (tujuh) Badan Kepegawaian Negara “Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dan diturunkan dalam 15 (lima belas) Sasaran Strategis Sekretariat Utama dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama.



“Uang bukanlah tujuan utama, tetapi alat untuk mencapai impianmu. Kelola dengan bijak agar impian itu dapat terwujud.” , ,

Putri Hartati, S.E, M.Si

**Kepala Biro Keuangan
Badan Kepegawaian Negara**

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

II. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Utama BKN merupakan turunan dari Rencana Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan Visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi Rencana Strategis 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Visi Sekretariat Utama BKN seperti termuat dalam Rencana Strategis 2020-2024 yakni:

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Keseluruhan unit kerja eselon II termasuk di level Sekretariat Utama BKN perlu mendasari visinya pada visi yang ada di BKN secara terpusat untuk mencapai tujuan bersama seperti yang sudah diamanatkan dalam UU No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat Utama BKN melaksanakan misi kelima BKN yaitu:

“Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN”.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan tujuan kelima Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan Visi & Misi Organisasi”.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara adalah Sasaran Strategis BKN ke-7 (SS.7) yang terdapat dalam Renstra BKN Tahun 2020- 2024 pada *Learning & Growth Perspective* yaitu “Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Utama BKN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis BKN tersebut diturunkan menjadi Sasaran Strategis Sekretaris Utama BKN dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective*.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara yang diemban oleh Sekretariat Utama kemudian diturunkan dalam Sasaran Strategis Sekretariat Utama yang terdiri dari 15 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama.

II.1. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Sekretariat Utama menjalankan Sasaran Strategis BKN ke-7 (SS.7) yang terdapat dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024 pada *Learning & Growth Perspective* yaitu “Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien

dan Akuntabel" yang kemudian dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) sasaran strategis, yaitu:

- SS 1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten
- SS 2. Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang andal dan mudah diakses
- SS 3. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- SS 4. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel
- SS 5. Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif
- SS 6. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama
- SS 7. Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi
- SS 8. Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN
- SS 9. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel
- SS 10. Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN
- SS 11. Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal
- SS 12. Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten
- SS 13. Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses
- SS 14. Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- SS 15. Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel



Gambar 2. Peta Strategis Sekretariat Utama BKN

CUSTOMER PERSPECTIVE

Terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
2. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang andal dan mudah diakses;
3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
4. Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel;
5. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif;
6. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Merupakan proses yang harus dilakukan Sekretaris Utama untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan. Terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 7 : Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi;

-
2. Sasaran Strategis 8 : Terselenggaranya RB BKN sesuai *roadmap* RB BKN;
 3. Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel;
 4. Sasaran Strategis 10 : Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama bidang manajemen ASN;
 5. Sasaran Strategis 11 : Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal;

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
2. Sasaran Strategis 13 : Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses;
3. Sasaran Strategis 14 : Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
4. Sasaran Strategis 15 : Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel;

II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Customer Perspective			
1	Terwujudnya ASN BKN yang kompeten	1 Indeks Profesional ASN BKN	82
2	Tersedianya Sistem	2 Indeks Maturitas SPBE BKN	4

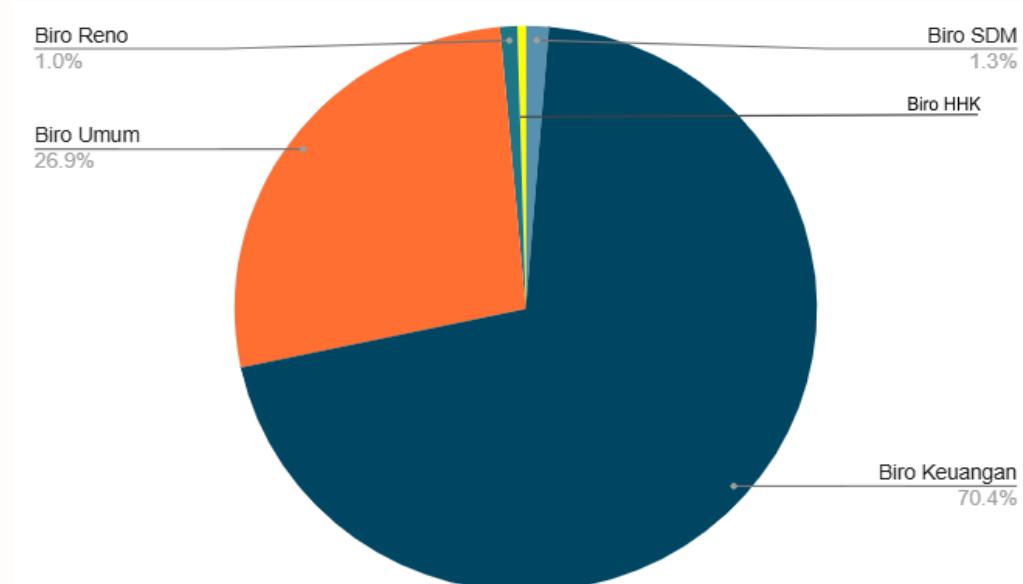
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
	Informasi ASN BKN yang andal dan mudah diakses			
3	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	3	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	85
		4	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	80
		5	Level Maturitas SPIP	4
		6	Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	390
4	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel	7	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP
		8	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	93
5	Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif	9	Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN	94
		10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (91)
6	Terwujudnya pelayanan kkesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	11	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	95
Internal Process Perspective				
7	Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi	12	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	95
8	Terselenggaranya RB BKN sesuai <i>roadmap</i> RB BKN	13	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
			Birokrasi General BKN	
		14	Indeks Pengelolaan Aset	3,5
		15	Indeks Tata Kelola PBJ	84
		16	Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	80
9	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	17	Persentase tindak lanjut hasil reviu (LHE) atas Laporan Keuangan BA 088 dari inspektorat	75
10	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN	18	Persentase Dokumen Kerjasama yang disepakati	95
Learn & Growth Perspective				
11	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	19	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya	98,3
Learn and Growth Perseptif				
12	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten	20	Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN	82
13	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses	21	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Lingkup Settama	100
14	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada	22	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Sestama	100
		23	Skor Atas Hasil Evaluasi	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
	layanan prima	Akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	
15	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel	24	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN
		25	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024

Untuk mencapai seluruh target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Pagu anggaran Sekretariat Utama BKN setelah *refocusing* anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.402.036.229.000,- (Empat ratus dua miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut dilaksanakan oleh lima Biro di lingkungan Sekretariat Utama.



Gambar 3. Persentase Komposisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama

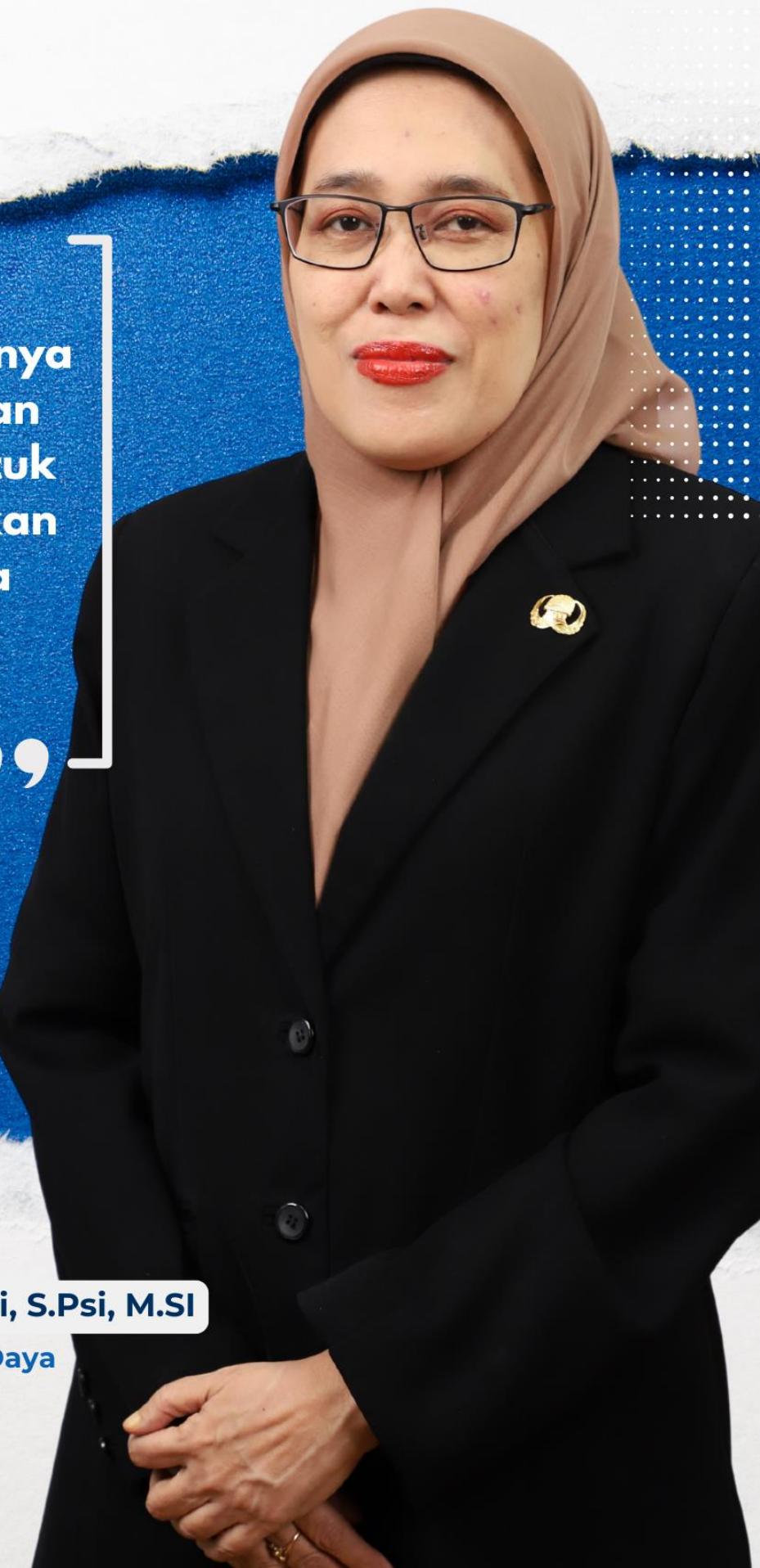
Berikut rincian anggaran Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama

- Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Rp1.860.903.000,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Biro Sumber Daya Manusia Rp5.101.892.000,- (Lima Milyar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Biro Keuangan Rp282.988.049.000,- (Dua Ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Biro Perencanaan dan Organisasi Rp3.825.094.000,- (Tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Biro Umum Rp108.260.291.000,- (Seratus delapan milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Adapun pagu anggaran Sekretariat Utama pada awal tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp406.820.371.000 (Empat ratus enam milyar delapan ratus dua puluhjuta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Rp1.613.604.000 (satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Biro Sumber Daya Manusia Rp4.867.267.000 (empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Biro Keuangan Rp288.958.549.000 (dua ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan ratus lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Biro Perencanaan dan Organisasi Rp4.316.635.000 (empat milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Biro Umum Rp107.064.317.000 (seratus tujuh milyar enam puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

“Peran SDM bukan hanya untuk mempekerjakan orang; melainkan untuk membantu menciptakan lingkungan di mana orang dapat berkembang.”



Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi, M.Si

**Kepala Biro Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian Negara**

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

III. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diukur dengan pendekatan konsep *Balance Scorecard* (BSC) yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1.6/KEP/2020 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Keterangan		Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	Lebih dari 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	Kurang dari 49	Merah
5	Belum ada Skor		Putih

NKP	NILAI KINERJA PERSPEKTIF				
NSS	NILAI SASARAN STRATEGIS				

SS / IKU	Target Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	NKP
CUSTOMER PERSPECTIVE					100.66	33,55
SS.1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten					104.30	
IKU 1. Indeks Profesional BKN	82	85.53	104.30%			
SS.2. Tersedianya sistem informasi ASN BKN yang andal dan mudah diakses					104.75	
IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN	4	4.19	104.75%			
SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					86.34	
IKU 3. Indeks Pelaksanaan RB BKN	85	N/A	N/A			
IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas BKN	80	69.26	86.58%			
IKU 5. Level Maturitas SPIP	4	3	75%			
IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	390	380	97.44%			
SS.4. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel					100.11	
IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	100%			
IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	93	93.21%	100.23%			
SS.5. Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif					112.02	
IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per	94%	123.5%	120%			

SS / IKU		Target Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	NKP
	Media BKN						
IKU 10.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (91)	Informatif (94.67)	104.03%			
SS.6.Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretariat Utama					96.44		
IKU 11.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama	95	91.62	96.44%			
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIF					104,51	34,83	
SS.7 Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensinya					100.00		
IKU 12.	Percentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya	95	95	100			
SS.8 Terselenggaranya RB BKN sesuai road map RB BKN					102.43		
IKU 13.	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB General	100%	100%	100.00%			
IKU 14.	Indeks Pengelolaan Aset	3.5	3.53	100.86%			
IKU 15.	Indeks Tata Kelola PBJ	84	90.28	107.48%			
IKU 16.	Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	80	81.1	101.38%			
SS.9. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel					119.05		
IKU 17.	Percentase Tindaklanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat	75	89.29	119.05%			
SS.10. Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN					81.05		
IKU 18.	Percentase Dokumen Kerjasama yang disepakati	95	77	81.05%			
SS.11 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal					120.00		

SS / IKU		Target Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	NKP
IKU 19.	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya	98.3%	121,9%	120%			
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE					94,94		31,64
SS.12 Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten					103.84		
IKU 20.	Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN	82	85,07	103.84%			
SS.13 Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses					99.20		
IKU 21.	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Lingkup Settama	100%	99.2%	99.20%			
SS.14. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					93.84		
IKU 22.	Percentase pelaksanaan rencana Aksi RB Settama	100%	100	100%			
IKU 23.	Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	80	70.15	87.69%			
SS.15. Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel					82.87		
IKU 24.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	100%	93.87%	93.87%			
IKU 25.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	71,87%	71,87%			

Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2023

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja Utama Sekretaris Utama 2024 adalah 100,02 (Baik) dengan rincian terdapat sebelas IKU yang capaiannya diatas 100% yakni IKU 1 (104,30%), IKU 2 (104,75), IKU 8 (100,23%), IKU 9 (120%), IKU 10 (104,03%), IKU 14 (100,86), IKU 15 (107,48), IKU 16 (101,38), IKU 17 (119,05%), IKU 19 (120), IKU 20 (103,84). Terdapat 11 IKU dengan kategori "Baik" atau capaian range $80 \leq 100$, yaitu IKU 4 (86,58%), IKU 6 (97,44%), IKU 7 (100), IKU 11 (96,44%), IKU 12 (100%), IKU 13 (100%), IKU 18 (81,05%), IKU 21 (99,20%), IKU 22 (100%), IKU 23 (87,69%), IKU 24 (93,87%) dan IKU 25 (82,14%). Selain itu, terdapat dua IKU yang mendapatkan kategori "Cukup" yakni IKU 5 (75%) dan IKU 25 (71,87%) , serta terdapat satu IKU kategori N/A yakni IKU 3.

ANALISIS KINERJA CUSTOMER PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS 1: TERWUJUDNYA ASN BKN YANG KOMPETEN

IKU. 1 Indeks Profesional ASN BKN

Indikator Kinerja Utama	Baselin	Target		Realisasi				Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah	
		2023	2024	2020	2021	2022	2023			
Indeks Profesional ASN BKN		76,18	80	82	70,42	78,46	76,18	81,71	85,53	104,30%

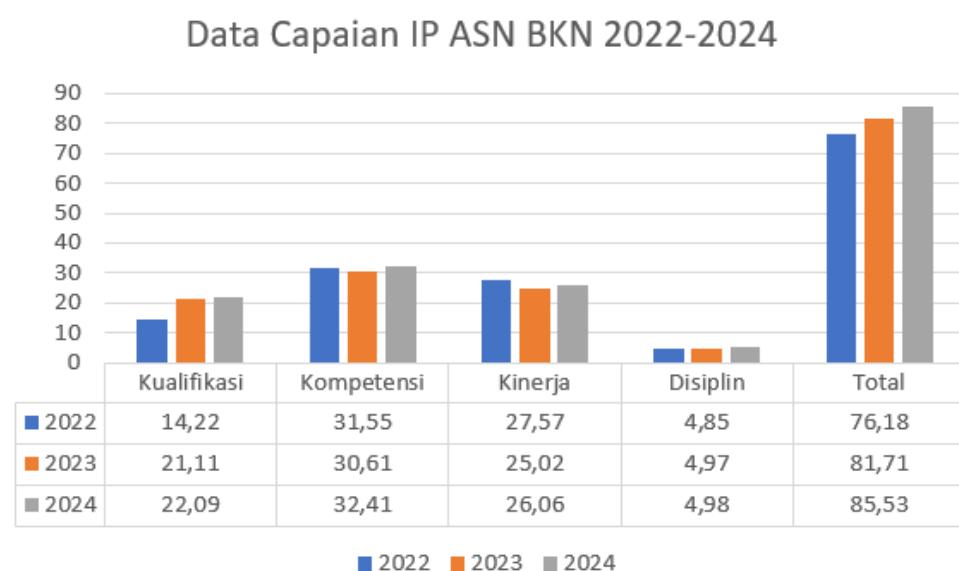
Tabel 3. Realisasi Target IKU Indeks Profesional ASN BKN

Sumber: Olah Data Biro Sumber Daya Manusia

Nilai IP ASN BKN tahun 2024 sebesar **85,53**, nilai yang didapat tersebut melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 82. Jika dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 82, realisasi pada tahun 2024 sebesar **85,53** maka nilai Indeks Profesionalitas BKN tahun 2024

sudah melebihi target untuk tahun 2024. Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 mendatang, Sekretaris Utama akan mengupayakan dan mengoptimalkan pemutakhiran riwayat data kompetensi pada SIASN untuk meningkatkan nilai IP ASN BKN tahun 2025 agar meningkat daripada capaian pada tahun 2024 ini. Untuk Nilai IP ASN BKN pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar **81,71**, terdapat peningkatan nilai menjadi sebesar **85,53** (naik sebesar **3,82**), dengan kenaikan yang signifikan tersebut, IP ASN BKN termasuk dalam kategori tinggi. Meskipun mengalami kenaikan nilai, jika dirinci nilai tiap komponen, terdapat kenaikan dan penurunan nilai pada tiap indikator dari tahun sebelumnya. Pertama, nilai kualifikasi mengalami kenaikan dari **21,11** menjadi **22,09** dengan selisih nilai sebesar **(0,98)**, peningkatan nilai ini disebabkan oleh meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai di lingkungan BKN dibanding dengan tahun sebelumnya. Kedua, nilai kompetensi mengalami kenaikan nilai dari **30,61** menjadi **32,41** dengan selisih nilai sebesar **(1,80)**, kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan diklat, pelatihan teknis dan riwayat pengembangan kompetensi 20 JP setiap tahunnya untuk pegawai di internal BKN sudah mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga, nilai kinerja tahun 2024 meningkat menjadi **26,06** dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar **25,02** dengan selisih nilai sebesar **(1,04)**, peningkatan ini mengindikasikan rata-rata predikat kinerja pegawai di BKN memperoleh nilai “Sesuai Ekspektasi” dari Pimpinan dan juga pemutakhiran riwayat SKP dan kinerja di SIASN sudah dilakukan dengan cukup optimal dan berjalan dengan baik. Terakhir, nilai komponen disiplin yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar **4,97** naik menjadi **4,98** atau sebesar **(0,01)** dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dikarenakan jumlah sanksi hukuman disiplin pegawai pada tahun 2024

berkurang dibandingkan kasus hukuman disiplin pada tahun 2023 dengan perbandingan terdapat 28 pegawai yang mendapatkan sanksi Hukuman disiplin pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 sanksi Hukuman disiplin pegawai menurun sejumlah 26 pegawai.



Grafik 6. Data Capaian IP ASN BKN Tahun 2022-2024 dibandingkan dengan Nilai Maksimum

sumber: LHE IP ASN BKN Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 1	82	85,53	102,14%	Rp181.000.000	Rp178.600.000	2,24%

Tabel 4. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Indeks Profesional ASN BKN dapat dilihat pada Tabel Efisiensi Sumber Daya IKU 1, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp178.600.000,-, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 2.24%.

Pengukuran dan perhitungan Indeks Profesionalitas dalam periode ini telah dilakukan dengan mengambil *cut-off* data SIASN sampai dengan tanggal 10 September 2024 sesuai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 dengan nomor 3/B-KP.05.02/SD/A.II/2025 pada tanggal 9 Januari 2025.

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan terakhir Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Perolehan Indeks Profesional tersebut kemudian dikategorikan sebagai berikut:

1. Nilai IP 51-60, Kategori sangat rendah;
2. Nilai IP 61-70, Kategori rendah;
3. Nilai IP 71-80, Kategori sedang;
4. Nilai IP 81-90, Kategori tinggi; dan
5. Nilai IP 91-100, Kategori sangat tinggi.

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j} \\ IP_1 = W_{2k} * R_{2k} \\ IP_1 = W_{3l} * R_{3l} \\ IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Pada periode tahun 2024 ini, pengukuran Indeks Profesionalitas yang dilaksanakan oleh Biro SDM menggunakan sumber data dari cut-off rekonsiliasi data SIASN, dengan melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data riwayat pengembangan kompetensi pegawai (Diklat, Pelatihan, Kursus, Seminar, Workshop, CMB) dan riwayat Kinerja (SKP) pegawai, selain itu juga dilakukan rekonsiliasi data antara SIASN dan SIMPEG untuk pemutakhiran data Kualifikasi dan Disiplin pegawai.

Berdasarkan *cut-off* data SIASN terkait dengan Nilai Indeks Profesionalitas BKN, diperoleh Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Instansi BKN sebesar

85.58, dengan rincian dimensi Kualifikasi sebesar **22.15**, Kompetensi sebesar **32.74**, Kinerja sebesar **26.09**, dan Disiplin sebesar **4.98**. Nilai Indeks Profesionalitas ASN ini termasuk dalam kategori “**Tinggi**”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Nilai Indeks Profesionalitas ASN tersebut menunjukkan indikasi PNS di lingkungan BKN pada umumnya “**cakap dan profesional**” dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Analisis Capaian masing-masing Dimensi:

1. DIMENSI KUALIFIKASI:

Untuk dimensi kualifikasi dengan nilai maksimal 25, pada tahun 2024 BKN mendapatkan nilai sebesar 22,09, nilai ini naik sebesar 0,98 dari nilai tahun 2023 sebesar 21,11. Kenaikan pada dimensi kualifikasi ini disebabkan terdapat penyesuaian instrumen pada pengukuran dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 di mana perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi ini mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal sesuai dengan jenis jabatan yang diduduki, Selain itu dalam upaya meningkatkan dimensi Kualifikasi pegawai, Selain itu Sekretariat Utama melalui Biro SDM juga secara rutin melaksanakan kegiatan Ujian Dinas TK. I, Ujian Dinas Tk. II, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan Ujian Penyesuaian Ijazah & Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) bagi pegawai yang telah memperoleh Ijazah dengan jenjang yang lebih tinggi, Dan juga Sekretariat Utama juga terus membuka kesempatan bagi pegawai yang ingin melanjutkan studinya dengan memberikan izin Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri serta Pencantuman Gelar, dan juga membuka kesempatan bagi pegawai yang ingin memperoleh Beasiswa yang ditawarkan oleh institusi baik di dalam maupun luar negeri.

2. DIMENSI KOMPETENSI

Untuk dimensi kompetensi dengan nilai maksimal 40, pada tahun 2024 BKN mendapatkan nilai 32,41, yang dimana nilai tersebut naik sebesar 1,80 dari nilai tahun 2023 yang sebesar 30,61. Pada dimensi kompetensi kompetensi tahun 2024 ini mengalami kenaikan mengindikasikan ASN di BKN memiliki kemampuan dan keterampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga mencerminkan komitmen dari pimpinan dan pegawai yang selalu berupaya optimal dalam menyelenggarakan dan mengikuti pengembangan kompetensi melalui berbagai program diklat, pelatihan teknis, dan juga pelaksanaan kegiatan CMB dan komunitas belajar di masing-masing unit kerja. Oleh karena itu, untuk mempertahankan capaian tahun ini dan meningkatkan nilai IP ASN tahun 2025, Sekretariat Utama melalui Biro SDM akan terus senantiasa mendorong tiap unit kerja baik pusat maupun kantor regional untuk rutin melaksanakan kegiatan *Coaching*, *Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB), serta Komunitas Belajar, Selain itu Biro SDM juga akan terus melakukan sinergi dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan teknis sebagai sarana peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan internal BKN.

3. DIMENSI KINERJA

Untuk dimensi kinerja dengan nilai maksimal 30, pada tahun 2024 BKN mendapatkan nilai 26,06, dimana nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,04 dari nilai tahun 2023 sebesar 25,02. Peningkatan ini mengindikasikan rata-rata predikat kinerja pegawai di BKN memperoleh nilai “Sesuai Ekspektasi” dari Pimpinan dan juga pemutakhiran riwayat SKP dan kinerja di SIASN sudah dilakukan dengan cukup optimal dan berjalan dengan baik. Dalam dimensi kinerja ini masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah adanya kendala pada

pemutakhiran data kinerja dari sistem informasi ASN (SIASN) yang masih belum optimal, sehingga terdapat beberapa pegawai yang nilai di dimensi kinerja masih belum terupdate sesuai dengan data kinerja yang terbaru. Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesional ASN khususnya pada aspek dimensi kinerja di tahun 2025, Sekretariat Utama akan melakukan koordinasi dengan unit PPSI ASN dan juga Direktorat Jabatan ASN untuk mengoptimalkan pemutakhiran data kinerja pada sistem informasi ASN (SIASN).

4. DIMENSI DISIPLIN

Untuk dimensi disiplin dengan nilai maksimal 5, pada tahun 2024 BKN mendapatkan nilai 4,98. Dalam dimensi disiplin ini terdapat peningkatan sebesar 0,01 dari nilai tahun 2023 yang sebesar 4,97. Peningkatan nilai disiplin ini mengindikasikan bahwa pembinaan disiplin yang dilakukan oleh Sekretariat Utama dan tiap unit kerja baik itu Pusat maupun Kantor Regional telah dilaksanakan dengan baik. Kedepannya untuk mempertahankan dan meningkatkan dimensi disiplin dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN, Sekretariat Utama akan melakukan koordinasi dan sinergi dengan unit kerja Pusat maupun Kantor Regional BKN untuk memberikan pemahaman yang benar serta menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan norma standar dan prosedur dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta dalam rangka pencegahan pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin PNS di lingkungan BKN. Berdasarkan hasil olah data penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKN tahun 2024 yang diperoleh, maka Sekretariat Utama merekomendasikan beberapa hal terkait pelaksanaan pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKN untuk periode berikutnya yaitu:

1. Mempermudah pegawai dalam mengakses informasi Tugas Belajar dan Penawaran Beasiswa dalam rangka peningkatan kualifikasi

- pegawai yang ada di Instansi BKN dan melakukan kerjasama dengan instansi baik itu instansi pemerintah maupun BUMN untuk pelaksanaan magang antar instansi;
2. Mendorong tiap unit kerja Pusat maupun Kanreg untuk memanfaatkan Aplikasi CMB (*Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri*) serta Komunitas Belajar sebagai sarana peningkatan kompetensi non klasikal untuk pegawai;
 3. Melakukan kerja sama dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dalam rangka penyelenggaraan pelatihan teknis untuk internal BKN;
 4. Meningkatkan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BKN dengan stakeholder terkait.

link data dukung: IKU 1

https://drive.google.com/drive/folders/1zhDMulgRwCzf5kthEVMvdbgJpgs2-Jjc?usp=drive_link

SASARAN STRATEGIS 2: TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI ASN BKN YANG ANDAL DAN MUDAH DIAKSES

IKU. 2 Indeks Maturitas SPBE BKN

Indikator Kinerja Utama	Baselin e	Target		Realisasi						Persen Capaian Jangka 2024	Capaian Jangka Meneng ah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Indeks Maturitas SPBE BKN	2,84	3,5	4	2,84	2,92	2,92	3,66	4,19	104,75 %	104,75%	

Tabel 5. Realisasi Target IKU Indeks Maturitas SPBE BKN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Indeks Maturitas SPBE BKN ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Sampai dengan triwulan IV TA 2024, hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka persiapan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024 diantaranya:

- a. Penetapan tim pelaksana SPBE BKN dan Tim Asesor Internal BKN**
pembentukan tim SPBE Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi dari tahun sebelumnya, terdapat penyesuaian baik dalam Tim Pelaksana SPBE BKN maupun dalam Tim Asesor Internal BKN;
- b. Menyusun rencana kerja tim SPBE tahun 2024** dengan mempertimbangkan hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPBE BKN tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, sebagai langkah tindak lanjut yang perlu di lakukan di tahun 2024 serta sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan SPBE di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi tim SPBE BKN tahun 2024** dalam rangka penyusunan strategi implementasi SPBE BKN tahun 2024 dan persiapan penilaian mandiri maupun penilaian eksternal oleh Kemenpan RB tahun 2024 pada tanggal 28 Maret 2024;
- d. Melaksanakan rapat persiapan penilaian mandiri SPBE BKN tahun 2024** dalam rangka percepatan implementasi SPBE di lingkungan BKN, serta untuk mempersiapkan penilaian eksternal oleh Kemenpan RB. Rapat dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024 ;
- e. Melakukan Reviu Kepka No. 350.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BKN.** Berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun sebelumnya, terdapat evaluasi dalam domain kebijakan, hal ini ditindaklanjuti oleh Tim

SPBE BKN dengan melakukan reviu atas Kepka No. 350.8 Tahun 2023. Hasil dari rapat ini menjadi dasar atas ditetapkannya **Kepka BKN No. 57.3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BKN;**

- f. Rapat Persiapan Tim Asesor Internal SPBE BKN Tahun 2024** dilaksanakan untuk membahas mekanisme penilaian mandiri yang akan dilakukan, serta menyelaraskan pemahaman mengenai kriteria penilaian disetiap indikator penilaian SPBE;
- g. Monitoring dan Evaluasi setiap Domain Penilaian SPBE** dilakukan untuk mengukur level maturitas pada 4 Domain SPBE dan 47 Indikator implementasi SPBE. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Juni 2024 ;
- h. Rapat Finalisasi Penilaian Mandiri SPBE BKN Tahun 2024 pada tanggal 13 Agustus 2024** Finalisasi Penilaian Mandiri SPBE BKN yang dilakukan oleh Asesor Internal untuk menyepakati nilai akhir **penilaian mandiri** SPBE BKN Tahun 2024, skor/Nilai SPBE BKN berdasarkan proses finalisasi tersebut adalah **4,68**. Tindak lanjut atas finalisasi penilaian mandiri SPBE tersebut adalah pada tanggal **23 Agustus 2024**, Tim Sekretariat SPBE tepat waktu dalam mengunggah dokumen penilaian mandiri SPBE BKN pada aplikasi Tauval ;
- i. Melakukan rapat persiapan interview penilaian SPBE BKN**, sebagai rangkaian dalam penilaian SPBE BKN oleh Kementerian PANRB, setelah upload penilaian mandiri, akan dilakukan interview. Persiapan yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi agar proses interview berjalan lancar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024;
- j. Pelaksanaan Interviu Indeks Maturitas SPBE oleh KemenPANRB**, Interviu dilakukan oleh Kementerian PANRB secara daring melalui zoom pada tanggal 14 Oktober 2024, proses interview dilakukan dengan menanyakan hasil penilaian mandiri yang sudah dilakukan, serta

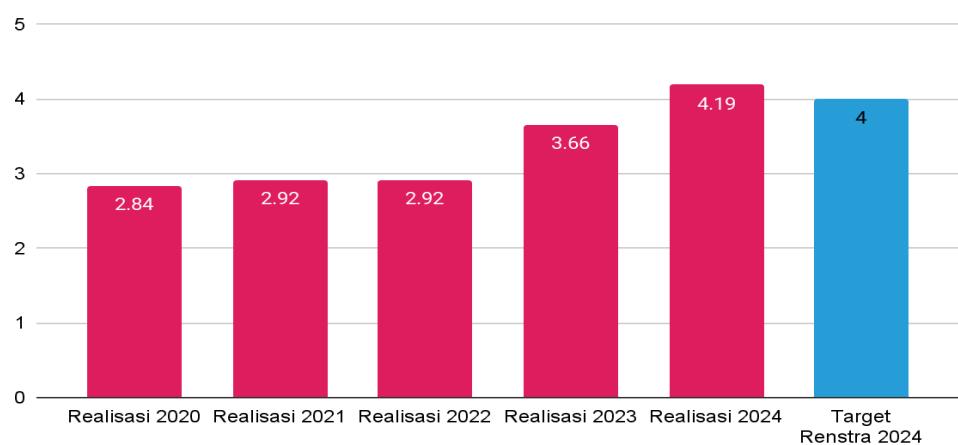
menyampaikan bukti dukung yang perlu ditambahkan.

k. Menindaklanjuti hasil interview penilaian SPBE oleh Evaluator

Kementerian PANRB, tindak lanjut dari pelaksanaan interview adalah dengan melakukan revisi dan menambahkan bukti dukung pada beberapa indikator penilaian, diantaranya adalah **indikator 11** mengunggah data dukung tambahan, **indikator 12** dan **indikator 14** menambahkan kebijakan yang disahkan, **indikator 13** perlu menambahkan bukti dukung berupa catatan hasil review yang sudah disahkan secara formal, **indikator 25** perlu menambahkan bukti dukung, **indikator 27** perlu menambahkan bukti dukung berupa "Form Perubahan" untuk setiap inisiasi perubahan yang diajukan, **indikator 29** perlu menambahkan bukti dukung berupa tindak lanjut yang sudah disahkan secara formal, **indikator 31** menyesuaikan tindak lanjut yang dilakukan dengan rekomendasi perbaikan yang ada dalam notula. **indikator 35** penambahan fitur untuk optimalisasi sudah dilakukan, namun dasar dalam penambahan fitur tersebut belum ada, sehingga perlu adanya catatan/notula usul perbaikan. **indikator 38** menambahkan review dan evaluasi. **indikator 45-47** menambahkan review dan evaluasi. Tindak lanjut hasil interview tersebut dilakukan dengan batas akhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

- I. Pada tanggal 31 Desember 2024, Kemenpan RB menetapkan **Kepmenpan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024** yang menetapkan bahwa Indeks Maturitas SPBE BKN berada pada skor **4,19** dengan predikat **Sangat Baik** sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen pada link berikut <https://loker.bkn.go.id/index.php/s/KLMzm2Bb7S6ZNrC>.

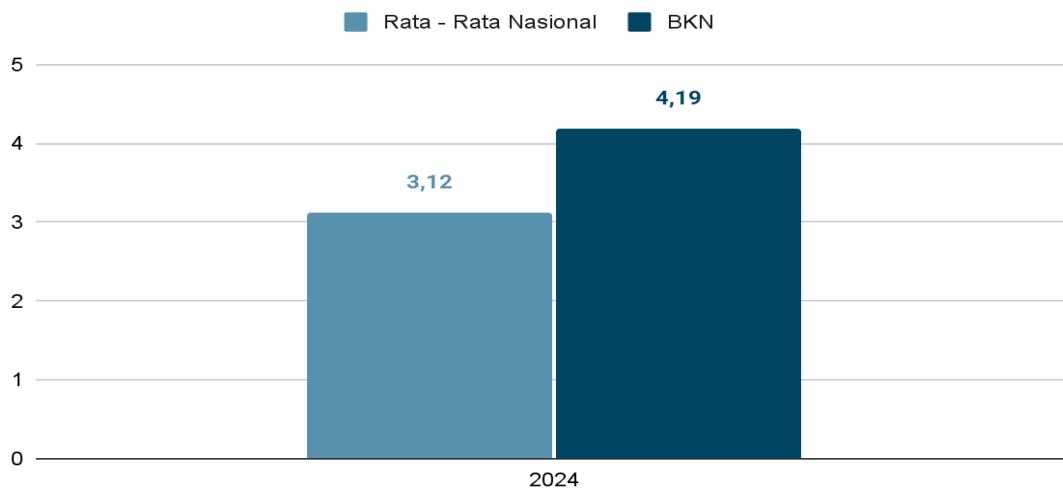
Berdasarkan grafik dibawah dapat dilihat bahwa untuk realisasi tahun 2024 terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 0,53 dari realisasi tahun 2023.



Grafik 7. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 - 2024 serta Target Kinerja Tahun 2024

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa nilai SPBE yang diperoleh BKN pada tahun 2024 sudah melampaui target yang direncanakan di Renstra Tahun 2020 - 2024. Selain itu, berdasarkan penilaian yang dilakukan Kemenpan pada tahun 2024, nilai SPBE BKN berada di atas nilai rata - rata nasional sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Perbandingan Nilai SPBE BKN dan Nasional Tahun 2024



Grafik 8. Perbandingan Nilai SPBE BKN dan Nilai SPBE Nasional Tahun 2024

Nilai tersebut bisa didapatkan karena BKN sudah melakukan upaya dalam perbaikan implementasi SPBE BKN Tahun 2024 antara lain:

- Pada aspek Kebijakan Internal SPBE sudah dilakukan proses reviu

terhadap kebijakan pelaksanaan SPBE BKN, sehingga ditetapkannya Keputusan Kepala BKN No. 57.3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BKN;

- b. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK sehingga tercapainya keterpaduan rencana dan anggaran SPBE;
- c. Pada aspek Penyelenggara SPBE, Kolaborasi antar unit kerja telah dilaksanakan sesuai perencanaan, telah dilaksanakan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, dan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal.
- d. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE: Kegiatan Manajemen SPBE telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada (Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 578.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Elektronik di Lingkungan BKN; Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia telah dilakukan sesuai Keputusan Kepala No 4.16 Tahun 2022 tentang Peta Rencana SPBE BKN Tahun 2022-2024 halaman 27 dan yang kemudian dokumentasi penerapannya telah ditetapkan Indikator HCDP BKN 2022-2026 (Rumpun Teknologi Informasi); Penerapan Manajemen Perubahan tertuang pada Kepka Nomor 4.16 Tahun 2022 tentang Peta Rencana SPBE BKN Tahun 2022-2024, selain itu terkait Penerapan Manajemen Perubahan juga telah dilakukan sesuai dengan Kepka Nomor 44.2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan BKN; dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE tertuang pada Indikator Keputusan Kepala BKN Nomor 7.3KEP2020 tentang Rencana Induk, Peta Jalan, dan Arsitektur SPBE di Lingkungan BKN, Keputusan Kepala BKN Nomor 249.3KEP2020 tentang Pedoman Arsitektur Integrasi SPBE BKN, Rencana Kerja Anggaran Revisi

Internal - Juli 2022, Kajian SIASN BKN Tahun 2020);

- e. Pada indikator Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menggunakan aplikasi E-Sakip Reviu yang dimiliki oleh Kemenpan RB, selain itu BKN juga sudah merancang aplikasi MAKO BKN untuk mendukung proses digitalisasi pengelolaan kinerja organisasi unit kerja di lingkungan BKN;

Namun, meskipun mengalami peningkatan nilai yang signifikan, hasil evaluasi yang dikeluarkan Kemenpan RB menemukan adanya kelemahan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan SPBE di BKN. Kelemahan tersebut tampak pada aspek Penerapan Audit TIK. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, **BKN memang sudah melakukan audit infrastruktur dan aplikasi secara internal menggunakan tools BRIN, Namun berdasarkan data yang didapatkan dari BRIN, belum ditemukan data pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi yang dilakukan oleh BKN.**

Dengan demikian, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BKN guna mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan BKN diantaranya:

- a. BKN perlu untuk menerapkan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE secara internal menggunakan tools BRIN;
- b. Untuk dapat melakukan audit internal, maka BKN perlu untuk menyediakan SDM yang memiliki kompetensi di bidang keamanan SPBE, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE;
- c. BKN juga perlu untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE, khususnya terhadap program kerja Tim Koordinasi SPBE BKN dan menindaklanjutinya melalui penyusunan program kerja yang baru untuk tahun kedepannya, sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap reviu dan evaluasi;
- d. BKN juga perlu untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap kolaborasi penerapan SPBE yang telah dilakukan di lingkungan BKN serta menindaklanjutinya dengan pelaksanaan program kerja yang terstruktur dan terarah bagi tim kolaborasi penerapan SPBE.

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan SPBE di BKN sehingga mendapatkan peningkatan nilai yang cukup signifikan, terdapat anggaran untuk mendukung capaian tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada dokumen renja tahun 2024 awalnya sebesar Rp3.040.000,-, namun saat berjalannya tahun anggaran, terdapat revisi anggaran sehingga alokasi anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp30.195.000,-.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 2	4	4,19	1,04	Rp30.195.000,-		Rp30.195.000,-	4%

Tabel 6. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 2

Berdasarkan data di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tercermin dalam Tabel x: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 2. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 30.195.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp 30.195.000,-, efisiensi sumber daya berhasil dicapai pada nilai 4%.

SASARAN STRATEGIS 3: TERWUJUDNYA BIROKRASI BKN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

IKU. 3 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target		Realisasi						Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	75,04	82	85	76,86	76,27	77,29	81,15	N/A	N/A	N/A	

Tabel 7. Realisasi Target IKU Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Sumber: Biro Perencanaan dan Organisasi

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 6.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BKN 2023 merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Tujuan dari pengukuran Indikator Kinerja Utama ini adalah menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso, sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Perubahan di tahun berjalan ini terjadi karena dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan birokrasi. Hasil penajaman road map RB nasional ini, mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu (1) RB General yang berfokus pada penyelesaian “isu hulu”, seperti masalah tata kelola pemerintahan di internal birokrasi, dan (2) RB Tematik yang berfokus pada penyelesaian “isu hilir”, seperti permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BKN tahun 2024 mengacu pada hasil penajaman *roadmap* RB BKN yang tertuang dalam Keputusan Kepala BKN No. 465 Tahun 2023 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi

Badan Kepegawaian Negara 2020-2024, yang juga menyesuaikan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hingga laporan ini disusun, hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Evaluator Nasional, dalam hal ini Kementerian PANRB belum keluar. Meskipun demikian, selama tahun 2024 terdapat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKN dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut:

- a. **Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023** dilaksanakan pada 22 Februari 2024 bersama Inspektorat selaku tim evaluator internal RB BKN. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan upaya untuk meningkatkan indeks RB tahun 2024, terutama pada salah satu indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2023 seperti Survei Penilaian Integritas dan Survei Kepuasan Masyarakat, serta upaya lainnya guna mengungkit tingkat keberhasilan pembangunan ZI dan tingkat maturitas SPIP BKN.



- b. **Rapat koordinasi Hasil Evaluasi RB BKN Tahun 2023 dengan Kementerian PANRB** pada 23 Februari 2024. Rapat ini membahas terkait Hasil Evaluasi RB BKN Tahun 2023 yang dilakukan secara luring di Kantor Kementerian PANRB bersama Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB beserta tim.



Gambar 4. Koordinasi Hasil Evaluasi RB BKN Tahun 2023 dengan Kementerian PANRB

c. **Workshop Agen Perubahan dan Innovation Expo Tahun 2024.**

Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Maret 2024 bertempat di Hotel Savero, Depok dengan mengundang para agen perubahan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Kegiatan Workshop Agen Perubahan dan Innovation Expo BKN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN serta mendukung visi, misi serta sasaran strategis organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kapasitas agen perubahan sebagai katalisator, role model, serta saluran komunikasi dalam rangka mengawal agenda reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; (2) sebagai wadah exposure dan sharing inovasi dari unit kerja di lingkungan pusat dan kantor regional; (3) sarana untuk internalisasi Budaya BKN dan nilai-nilai integritas yang harus ditegakkan



Gambar 5. Workshop Agen Perubahan

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Workshop ini melibatkan seluruh agen perubahan pada setiap unit kerja di lingkungan BKN

dengan menghadirkan narasumber yang telah memiliki pengalaman dan terlibat dalam aksi perubahan di lingkungan kerjanya.

- d. **Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkungan BKN Tahun 2024 pada tanggal 7 Januari 2024 secara daring melalui Zoom meeting. Fasilitasi dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi substansi Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan. Fasilitasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi RB pada seluruh unit kerja di BKN Pusat dan Kantor Regional.
- e. **Rapat Pembahasan RB Tematik BKN Tahun 2024** dilaksanakan pada 19 Maret 2024 secara luring di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung 3. Rapat ini membahas penyusunan rencana aksi RB tematik BKN Tahun 2024 bersama unit kerja pengampu seperti Direktorat Jabatan ASN,



Gambar 6. Pembahasan RB Tematik

Direktorat Kinerja ASN, Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, dan Biro Umum serta Inspektorat selaku evaluator internal RB BKN.

- f. **Rapat Pembahasan RB General BKN Tahun 2024** dilaksanakan pada 21 Maret 2024 secara luring di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung 3. Rapat ini dihadiri oleh unit kerja pengampu RB General BKN seperti Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Direktorat

Peraturan Perundang Undangan, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, serta Inspektorat. Dalam rapat ini dibahas mengenai penyusunan rencana aksi RB general BKN tahun 2024.

- g. **Rapat Persiapan Evaluasi RB TW I dan II** bersama inspektorat selaku tim evaluator internal RB BKN pada 7 Juni 2024. Rapat ini menindaklanjuti surat Kementerian PANRB Nomor B/28/RB.01/2024 bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2024, seluruh proses pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024 akan dilakukan melalui portal RB Nasional.
- h. **Rapat Monitoring dan Evaluasi RB BKN TW I dan II tahun 2024** dilaksanakan secara luring pada 19 Juni 2024. Rapat dihadiri oleh Inspektorat beserta beberapa unit kerja pengampu RB Tematik BKN seperti Direktorat Jabatan ASN, Direktorat Kinerja ASN dan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, tim sekretariat RB BKN telah melakukan pengisian rencana aksi RB sampai dengan TW II beserta LHEI *ex-ante* dan LHEI *ongoing* pada portal RB Nasional.
- i. **Rapat Koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka penyesuaian nilai RB BKN Tahun 2023** serta pengajuan nilai tunjangan kinerja. Pada 18 Juli 2024, BKN melakukan koordinasi secara daring (via zoom) dengan Kementerian PANRB melalui Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Rapat ini juga merupakan tindak lanjut Permohonan terkait Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara dan penyampaian *Policy Brief* terkait Financial Benefit Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk bahan pertimbangan yang mendalam dan terperinci terkait dengan pentingnya peningkatan tunjangan kinerja

Data RB General - Perencanaan dan Monit

No.	Kegiatan/Rancangan	Indikator	Baseline	Tujuan	Keterangan	Aksi
1	Penyelenggaraan Birokrasi (Penyelenggaraan Struktur Organisasi) Transformasi Organisasi Berbasis Kerja dan Inovasi	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Birokrasi	Saham Baseline: 91,47	2024: 91,47	Realized Indikator: Capaian Indikator: Catatan: 	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Perkembang Biang Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyelenggaraan Birokrasi	Saham Baseline: 1	2024: 1	Realized Indikator: Capaian Indikator: Catatan: 	
3	Pelaksanaan Architrave SP3E Nasional	Indeks SP3E	Saham Baseline: 100	2024: 100	Realized Indikator: Capaian Indikator: Catatan: 	

Data Permasalahan

No.	Tujuan	Desain & Indikator Kunci	Permasalahan (Kriteria)	Batasan Struktur Organisasi dan Perkembangan Birokrasi	Indikator	Target	Saham	Aksi
1	Pengembangan Karmawibawa	Keseragaman Roadmap: Memunculkan anggup karmawibawa melalui perbaikan tata kelola manajemen ASN Indikator Roadmap: Pengembangan kualitas SUM ASN pada instansi yang mengimplementasikan kategori pengembangan karmawibawa	Bentuk adanya perbaikan jatah karmawibawa selama 12 bulan mendatang akhirnya terwujud pada program pemeringkatan karmawibawa	Tersusunnya perbaikan jatah karmawibawa untuk kategori ASN yang mendapat pengembangan karmawibawa	Pengembangan karmawibawa pada jatah karmawibawa yang terwujud	1	Pelospat	
	Pengembangan Karmawibawa		Bentuk adanya perbaikan jatah karmawibawa selama 12 bulan mendatang akhirnya terwujud pada program pemeringkatan karmawibawa	Tersusunnya perbaikan jatah karmawibawa untuk kategori ASN yang mendapat pengembangan karmawibawa	Pengembangan karmawibawa pada jatah karmawibawa yang terwujud	2	Dokumen	
	Pengembangan Karmawibawa		Bentuk adanya perbaikan jatah karmawibawa selama 12 bulan mendatang akhirnya terwujud pada program pemeringkatan karmawibawa	Tersusunnya perbaikan jatah karmawibawa untuk kategori ASN yang mendapat pengembangan karmawibawa	Pengembangan karmawibawa pada jatah karmawibawa yang terwujud	2	Kategori	

Gambar 7. Input Rencana Aksi dan Monitoring dan Evaluasi RB BKN pada Portal RB Nasional

pegawai negeri di Badan Kepegawaian Negara. Menindaklanjuti hasil rapat pada 18 Juli 2024 ini, Sekretaris Utama BKN telah mengirimkan surat nomor 4986/B-OT.06/SD/A.IV/2024 tanggal 23 Juli 2024 kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, tentang Penyesuaian Nilai Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2023.

- j. **Rapat Koordinasi lanjutan dengan Kementerian PANRB** secara luring pada 31 Juli 2024 bersama Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB. Rapat ini membahas terkait dengan tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya

serta surat Sekretaris Utama terkait penyesuaian nilai Reformasi Birokrasi BKN tahun 2023 dalam rangka pengajuan kenaikan tunjangan kinerja. Hasil dari rapat ini, Kementerian PANRB sebagai evaluator nasional reformasi birokrasi, melakukan reviu kembali atas indeks RB



Gambar 8. Rapat Koordinasi lanjutan dengan Kementerian PANRB

BKN menyampaikan hasil evaluasi tersebut melalui Surat Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/651/RB.06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dimana indeks RB BKN tahun 2023 yang semula 78,57 (kategori "BB") berubah menjadi 81,15 (Kategori "A-"). Selain itu, pada 18 Oktober 2024 Menteri PANRB menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan No. R/80/M.RB.05/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

- k. Rapat Monitoring dan Evaluasi RB BKN TW III Tahun** dilaksanakan secara luring dan daring pada 9 Desember 2024 berlokasi di Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Organisasi. Rapat ini membahas terkait progress dan capaian pelaksanaan RB general dan tematik BKN bersama unit kerja pengampu serta inspektorat selaku Tim Evaluator

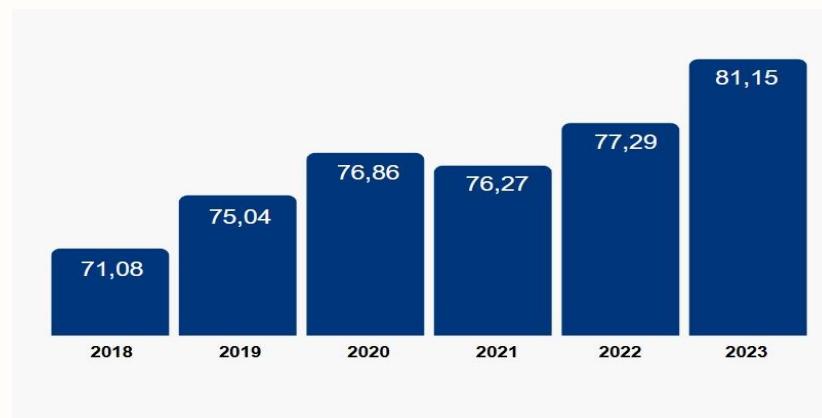
Internal RB BKN.

Kinerja Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Negara terlihat dari hasil penilaian oleh tim evaluator dari Kementerian PANRB. Berdasarkan review yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, terdapat perubahan hasil evaluasi Indeks RB BKN Tahun 2023 yang disampaikan melalui



Gambar 10. Rapat Monitoring dan Evaluasi RB BKN TW III Tahun 2024

Surat Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/651/RB.06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi



Gambar 9. Realisasi capaian RB BKN dari Tahun 2018 - 2023

Birokrasi Tahun 2023, dimana indeks RB BKN tahun 2023 yang semula 78,57 (kategori "BB") berubah menjadi 81,15 (Kategori "A-"). Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan 4,29 dari realisasi 2020 dibandingkan dengan realisasi 2023.

Dalam pencapaian target kinerja IKU ini, terdapat beberapa **kendala dan tantangan** yang dihadapi, antara lain:

- a. Reformasi birokrasi belum menjadi prioritas kinerja pada unit kerja sehingga dalam tahun berjalan masih banyak penyesuaian untuk memastikan target yang dihasilkan dapat tercapai.
- b. Kurangnya kolaborasi antar unit kerja pengampu RB Tematik, sehingga pengumpulan data bukti dukung belum optimal;
- c. Kurangnya pemahaman tim reformasi birokrasi pada unit/satuan kerja dalam menyusun rencana aksi RB sehingga pelaksanaan rencana aksi belum optimal.;
- d. Partisipasi unit/satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB masih belum optimal; serta
- e. Kurang optimalnya pendampingan pelaksanaan rencana aksi dan monitoring serta evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi karena hanya dilakukan secara online terutama pada kantor regional.

Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar, **tindak lanjut** yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. BKN perlu merumuskan kebijakan dan strategi baru terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah yang mengikuti dinamika perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mendorong peningkatan kolaborasi antar unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembentukan squad tim untuk melaksanakan rencana aksi RB BKN;
- c. Mendorong unit kerja yang menjadi pengampu RB General untuk mendampingi unit/satuan kerja di lingkungan BKN. Misalnya Inspektorat melakukan pendampingan tentang Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh unit/satuan kerja.

- d. Memberikan pemahaman terkait pentingnya evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh unit kerja karena laporan hasil monev tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian RB oleh evaluator eksternal
- e. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada unit/satuan kerja secara lebih intensif dengan dukungan anggaran yang lebih memadai.

Bukti dukung progres indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN dapat diakses pada link berikut <https://s.id/LHERB>.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN terdapat anggaran untuk mendukung capaian IKU tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada dokumen renja tahun 2024 sebesar Rp 130.400.000,- namun saat berjalannya tahun anggaran, realisasi dalam mencapai IKU ini adalah sebesar Rp.28.272.920,- .

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 23	80	N/A	N/A	Rp 130.400.000,-	Rp. 28.272.920,-	N/A

Tabel x: Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 4

Berdasarkan data di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tercermin dalam Tabel x: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 3. skor efisiensi masih bernilai N/A dikarenakan sampai saat laporan ini dibuat, nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum dirilis oleh Kemenpan RB.

IKU. 4 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Meneng ah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	66,09	80	80	67,33	68,05	68,48	68,82	69,26	86,58	86,58

Tabel 8. Realisasi Target IKU Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan berkelanjutan. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja yang diperoleh dari penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Kriteria penilaian SAKIP terdiri dari 7 (tujuh) predikat, yaitu:

No.	Nilai Indeks	Predikat	Keterangan
1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	A	Memuaskan
3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik

No.	Nilai Indeks	Predikat	Keterangan
4.	> 60 – 70	B	Baik
5.	> 50 – 60	CC	Cukup
6.	> 30 – 50	C	Kurang
7.	0 – 30	D	Sangat Kurang

Tabel 9. Kriteria Penilaian SAKIP

Pada triwulan IV, Kementerian PANRB sudah mengeluarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Hasil penilaian tersebut tercantum dalam surat nomor B/601/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam link berikut (<https://loker.bkn.go.id/index.php/s/CmFQ49ezoiaJC2z>). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai AKIP Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 adalah **69,26** atau dengan predikat **B (“Baik”, artinya implementasi AKIP sudah baik pada tingkat lembaga dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja)**. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat dilihat pula bahwa tren nilai SAKIP BKN terus mengalami peningkatan dari tahun awal sampai dengan tahun akhir Renstra 2020 - 2024. Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 9. Nilai SAKIP BKN Tahun 2020 - 2024

Nilai ini didapatkan dengan melakukan perbaikan berdasarkan hasil

penilaian tahun lalu diantaranya:

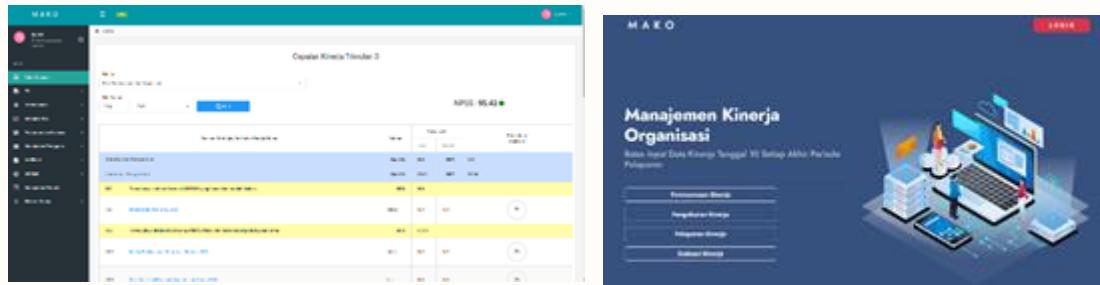
- a. Pohon kinerja pada level pusat dan unit kerja telah disusun, namun masih perlu penyempurnaan dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini karena pada pohon kinerja tersebut belum menggambarkan keterkaitan unit kerja satu sama lain dalam hal merealisasikan outcome yang menjadi target organisasi. Akibatnya, hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum terbangun secara lebih komprehensif;
- b. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap kinerja khususnya pemahaman terkait pohon kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, kinerja yang berorientasi hasil, dan indikator yang memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- c. BKN telah membangun sistem informasi MAKO (Manajemen Kinerja Organisasi), namun aplikasi ini sebagian besar pemanfaatannya baru digunakan untuk pengumpulan dokumen dan belum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang sehingga belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan manajemen kinerja secara signifikan;
- d. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BKN belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* serta Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam memberikan *reward and punishment* kepada unit kerja sebagai upaya untuk mendorong implementasi SAKIP di unit kerja sehingga perlu segera disusun dan ditetapkannya regulasi terkait dengan *reward and punishment* atas kinerja unit;
- e. Laporan kinerja di level pusat telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, namun di

level unit kerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 dalam menindaklanjuti rekomendasi dan upaya peningkatan nilai SAKIP BKN diantaranya :

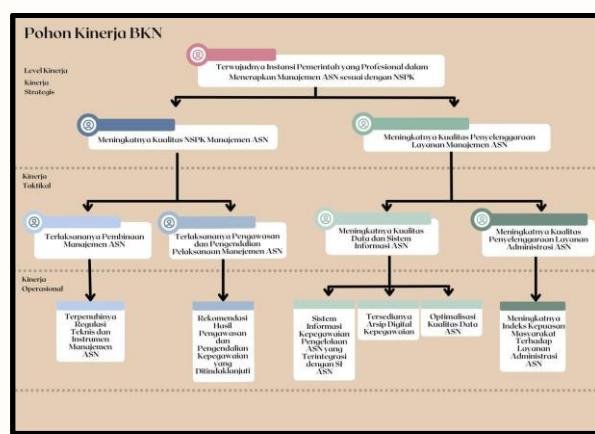
- a. Pengembangan dan Pengimplementasian Aplikasi MAKO. Salah satu rekomendasi dari evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu aplikasi MAKO sebagian pemanfaatannya untuk pengumpulan dokumen dan belum dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran kinerja. Sehingga pada tahun 2024 dilakukan pengembangan dan pengimplementasian aplikasi MAKO. Dalam proses pengembangan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya dilakukan *bootcamp* pada selasa-kamis, 4-6 Juni 2024 bertempat di ruang rapat lantai 1 Gedung III BKN dengan mengundang peserta baik dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Direktorat PPSIASN, Direktorat INTI, Direktorat PDPIK, dan Kantor Regional XI BKN. Hasil dari *bootcamp* pada tanggal 4-6 Juni tersebut menjadi acuan untuk ditindaklanjuti perbaikan oleh Dit PPSIASN yang kemudian akan dijadikan aplikasi kinerja utama dan digunakan secara massal di kantor pusat BKN dan kantor regional I-XIV. Pada Aplikasi MAKO sudah terdapat menu diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Untuk menu dashboard dapat dilihat pada <https://mako.bkn.go.id/>. Pada triwulan III tahun 2024 aplikasi MAKO sudah digunakan hal ini didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024. Penggunaan aplikasi ini dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan, menu approval pejabat

pimpinan tinggi. Terdapat juga menu evaluasi untuk penginputan nilai LHE AKIP.



Gambar 11. Dashboard Aplikasi MAKO

- b. Penyempurnaan pohon kinerja telah dilaksanakan dengan benchmarking ke KemenpanRB dan selanjutnya dilakukan perbaikan pada pohon kinerja eksisting.



- c. **Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di Lingkungan BKN.** Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk komitmen membangun sinergitas seluruh jajaran pimpinan di lingkungan BKN untuk mencapai target kinerja instansi. Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BKN Tahun 2024, Rapat Monitoring dan Evaluasi



Gambar 12. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2023, dan Outlook 2024

yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2024 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN serta perwakilan pegawai dari masing-masing unit kerja.

- d. **Penyelarasan Dokumen Perencanaan Kinerja 2024 di Lingkungan BKN.** Penyelarasan dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemen-PANRB. Pada dokumen LHE AKIP tersebut direkomendasikan bahwa BKN sebaiknya menjadikan capaian indikator



Gambar 13. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Kinerja 2024 di Lingkungan BKN

kinerja baik yang masih rendah maupun yang sudah mencapai atau melebihi target kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja dalam perencanaan kinerja mendatang. Oleh karena itu, BKN telah melakukan penyelarasan dengan unit kerja terkait yang dilakukan di bulan Maret 2024.

- e. **Penelaahan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2024 Unit Kerja di Lingkungan BKN.** Dalam rangka memonitor dan mengevaluasi kinerja unit di lingkungan BKN telah dilakukan penelaahan laporan capaian kinerja Triwulan I dan II Tahun 2024.. Kegiatan penelaahan ini dilakukan secara daring melalui *video conference* dan dihadiri oleh PICTim Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Organisasi dan PIC Manajemen Kinerja Organisasi dari setiap unit kerja. Unit kerja menyampaikan progres capaian kinerja setiap indikator kinerjanya serta permasalahan dan tindak lanjut atas kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator tersebut. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan III dan IV dilaksanakan menggunakan aplikasi MAKO.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja utama ini diantaranya:

- a. Sebagian indikator kinerja utama yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kriteria SMART
- b. Pemahaman pegawai yang belum sepenuhnya merata mengenai konsep kinerja
- c. Implementasi pemberian reward and punishment belum sepenuhnya pada pengukuran kinerja di BKN
- d. Laporan kinerja pada unit kerja belum sepenuhnya seragam dan mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja yang dibutuhkan
- e. Hasil reviu atas penyusunan laporan kinerja tahun sebelumnya pada tingkat unit kerja belum optimal menghasilkan perbaikan signifikan atas laporan kinerja
- f. Evaluasi internal belum sepenuhnya berdampak signifikan pada perbaikan implementasi SAKIP khususnya pada perbaikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang sifatnya fundamental.

Tindak Lanjut pelaksanaan SAKIP yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai berikut

- a. Melanjutkan reviu dari perbaikan pohon kinerja yang lebih berkualitas dan memastikan muatannya telah mengacu pada PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021
- b. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi
- c. Meningkatkan pemahaman dan ownership atas manajemen kinerja pada setiap level pegawai khususnya pengampu kinerja dan pengelola manajemen kinerja
- d. Melakukan pengembangan aplikasi MAKO
- e. Memastikan seluruh unit kerja untuk melakukan pemantau atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang hingga pada level individu.

- f. Memastikan seluruh unit kerja untuk menyempurnakan penyusunan laporan kinerja mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN terdapat anggaran untuk mendukung capaian IKU tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada dokumen renja tahun 2024 sebesar Rp 1.797.595.000,- namun saat berjalannya tahun anggaran, realisasi dalam mencapai IKU ini adalah sebesar Rp1.407.017.952,-.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 23	85	69,26	86,58	Rp 1.797.595.000,-	Rp. 1.407.017.952,-	8,57

Tabel 10. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 4

Berdasarkan data di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tercermin dalam Tabel x: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 4. skor efisiensi sebesar 8,57. Berdasarkan hasil ini, tingkat realisasi masih cukup jauh dari target yang ditentukan dan jika dilihat dari pagu anggaran dan realisasi anggaran, perlu ada perbaikan baik dari perencanaan maupun dari realisasinya.

IKU. 5 Level Maturitas SPIP

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Maturitas SPIP	3	4	4	3	3	3	3	3	75%	75%

Tabel 11. Realisasi Target IKU Level Maturitas SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu mendorong tingkat ketercapaian tujuan, menciptakan budaya pengawasan, dan mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Adapun level maturitas SPIP ditargetkan akan terealisasi pada Triwulan IV tahun 2024.

Ruang lingkup evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada BKN pada Tahun 2024, yang meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan, yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas;
 - b. Tahap pelaksanaan, yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK;
 - c. Tahap pelaporan, yang meliputi penentuan area of improvement (Aol), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat Asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: [PE.09.03/SP-199/D2/05/2024](#) tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024, diperoleh hasil evaluasi atas penilaian mandiri

maturitas penyelenggaraan SPIP pada BKN tahun 2024 berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **“3,520”**. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	1.600
2	Struktur dan Proses	30%	0.915
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	30%	1.005
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3.520
	- MRI		3.425
	- IEPK		3.320

Tabel 12. Hasil Evaluasi SPIP BKN Tahun 2024

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan pada tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,520. Sehingga berdasarkan skor yang diperoleh terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,169. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.1 tahun 2024 yaitu 75% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 namun realisasi kinerja yang diperoleh berada level 3.

Hingga laporan ini disusun data capaian level maturitas SPIP K/L/D tahun 2020-2024 belum dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, sehingga berdasarkan [Laporan Capaian Kinerja Utama BPKP](#) per triwulan II tahun 2024 disampaikan bahwa persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP di atas atau berada pada Level 3 sebanyak 73.25% dari target 94,13%. Dalam menindaklanjuti AOL dari hasil penilaian tahun 2023 serta sebagai upaya mencapai target yang ditetapkan, Tim SPIP BKN [telah melaksanakan](#):

1. Rapat koordinasi antara Inspektorat sebagai Tim Penjamin Kualitas dengan Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Tim Penilai Mandiri;
3. Berkoordinasi dengan satker dalam pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung yang diperlukan dalam penilaian;
4. Kegiatan FGD Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Profil Risiko Tahun 2023 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara secara daring pada tanggal 14-22 Mei 2024 dihadiri oleh perwakilan unit pemilik risiko di Lingkungan JPT Pratama, JPT Madya serta Entitas BKN;
5. Kegiatan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 3 Juli 2024;
6. *Benchmarking* ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada 26 September 2024.



Gambar 14. Kegiatan Benchmarking tim SPIP BKN ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Level Maturitas SPIP tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Dikarenakan Server Pusat Data Nasional mengalami error pada pertengahan bulan Juni 2024 sehingga berdampak juga pada error aplikasi e-integrity tidak dapat diakses maka pengisian kertas kerja yang seharusnya diisi ke dalam aplikasi dialihkan menjadi ke kertas kerja manual dalam *spreadsheet*;
2. Pelaksanaan penilaian mandiri satker masih belum berjalan efektif;
3. BKN belum menerapkan *three lines of defence* dengan tepat yaitu pada lini kedua belum berjalan dengan optimal. Misalnya, belum terdapat Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko;
4. Dalam penyusunan profil risiko, risiko strategis organisasi dan risiko korupsi belum diidentifikasi. Dimana kondisi saat ini seluruh Unit Pemilik Risiko dalam menyusun identifikasi risiko masih terfokus pada risiko operasional.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja antara lain:

1. Percepatan pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung beserta penyampaian surat permohonan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN kepada Tim Evaluator BPKP sesuai batas waktu yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan satker untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang direncanakan pada tahun 2025;
3. Perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi

- kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko.
4. Perlu dilakukan perubahan pedoman manajemen risiko dalam menguraikan kategori risiko korupsi serta menambahkan proses penerapan manajemen risiko berupa komunikasi dan konsultasi.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 5	4	3	75%	4.389.000	4.389.000	-33%

Tabel 13. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 5

Berdasarkan tabel di atas, IKU 5 dinilai masih kurang efisien dengan tingkat efisiensi -33% yang disebabkan oleh capaian kinerja yang kurang optimal dan realisasi kinerja yang belum tercapai meskipun realisasi anggaran sama dengan pagu anggaran. Pada Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun dilakukan revisi anggaran yang disampaikan pada POK Inspektorat cetakan ke-9 menyesuaikan dengan kebutuhan yaitu berupa pelaksanaan rapat koordinasi Tim Penjamin Kualitas dengan Tim Penilai Mandiri dalam mempersiapkan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada BKN pada Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.389.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp4.389.000,-.

IKU. 6 Nilai Pelaksanaan Sistem Merit

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		

Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	339	380	390	332,5	332,5	339	339	380	97,44%	97,44%
--------------------------------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	--------	--------

Tabel 14. Realisasi Target IKU Nilai Pelaksanaan Sistem Merit BKN

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Aspek	Nilai 2022	Nilai 2024
Perencanaan Kebutuhan	93,8	94
Pengadaan Aparatur Sipil Negara	95	100
Pengembangan Karir	70	88
Promosi Mutasi	58,3	81
Manajemen Kinerja	95	100
Penggajian, Penghargaan & Disiplin	93,8	100
Perlindungan dan Pelayanan	100	88
Sistem Informasi	81,3	88
Indeks Sistem Merit	339	380

Tabel 15. Perbandingan Nilai Sistem Merit BKN Tahun 2022 & 2024

Pada Tahun 2024, Penilaian Sistem Merit BKN sudah ditetapkan oleh KASN pada bulan Juli 2024, dan BKN memperoleh predikat pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 380 (tiga ratus delapan puluh) dan Indeks 0,93

(nol koma sembilan tiga). Dalam penilaian Sistem Merit tahun 2024 ini aspek yang mengalami kenaikan signifikan dalam mendongkrak nilai sistem merit BKN adalah pada aspek promosi dan mutasi, yang dimana pada tahun 2024 BKN memperoleh nilai 81, dibanding nilai pada tahun 2022 sebesar 58,3 (naik sebesar 22,7).

Penilaian Sistem Merit di lingkungan BKN memiliki tujuan untuk pemenuhan kewajiban BKN dalam pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan dalam pengembangan dan penyelenggaraan



Gambar 15. Penghargaan Merit Sistem

manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit dan menjadikan BKN sebagai *role model* nasional dalam penyelenggaraan manajemen berbasis Sistem Merit.

Penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN adalah upaya untuk memastikan jabatan yang terdapat di BKN diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut sehingga diharapkan dapat membangun Sumber Daya Manusia Aparatur BKN yang memiliki kinerja tinggi, netral, berintegritas dan profesional.

Penilaian Sistem Merit di lingkungan BKN akan dilakukan kembali pada tahun 2026. Hal ini sesuai dengan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai Sistem Merit pada kategori “Sangat Baik” maka penilaian Sistem Merit akan dievaluasi dan dinilai tiap 2 tahun sekali.

Lebih lanjut, Sekretariat Utama melalui Biro SDM akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem merit di lingkungan BKN, selain itu Biro SDM juga sudah dan sedang berupaya untuk melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi monitoring tindak lanjut sistem merit dari KASN, utamanya pada aspek dengan nilai yang masih belum optimal yaitu aspek pengembangan karier dan penghargaan dan disiplin. Pada aspek pengembangan karier termasuk didalamnya terdapat aspek promosi dan mutasi dalam kondisi ideal instansi diharapkan telah mempunyai Standar Kompetensi Jabatan, profil kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, manajemen talenta dan rencana suksesi, selain itu juga Instansi diharuskan mempunyai kebijakan pola karier, pengisian JPT, promosi dan mutasi pegawai yang mengacu pada manajemen talenta dan dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, untuk itu BKN telah menyusun kebijakan pola karier berupa Peraturan BKN No. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS. Dimana dengan terbitnya kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap PNS di lingkungan BKN memiliki jalur karier yang jelas dan terstruktur, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang secara profesional sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Untuk aspek penghargaan dan disiplin, BKN masih perlu melaksanakan sosialisasi kebijakan internal terkait kode etik dan kode perilaku secara berkala, dan juga menyelesaikan integrasi data pengelolaan disiplin pegawai di internal BKN dengan sistem informasi pengelolaan ncana suksesi dan profil pegawai sesuai PP 11 Tahun 2017 terkait

Manajemen PNS tersebut.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
IKU 6	390	380	97,44%	-	-

Tabel 16. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 6

link data dukung IKU 6: https://drive.google.com/drive/folders/13fgNxxVUZYQ9C6d4olyZDKp1739-g_A4?usp=sharing

SASARAN STRATEGIS 4: TERKELOLANYA ANGGARAN SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL

IKU. 7 Opini atas Laporan Keuangan BKN

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%

Tabel 17. Opini atas Laporan Keuangan BKN

Laporan Keuangan (LK) adalah unsur penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan merupakan instrumen untuk memberikan sumber informasi dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut memuat informasi atas sumber-sumber pendanaan serta alokasi dan penggunaan keuangan negara yang diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Laporan keuangan merupakan instrumen yang strategis dimana akuntabilitasnya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana tingkat transparansi dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara sehingga sangat layak untuk dijadikan pedoman bagi para pengguna anggaran.

Opini BPK adalah penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Badan Kepegawaian Negara yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK menunjukkan bahwa apakah pelaksanaan dan pengalokasian anggaran telah dilaksanakan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip sistem akuntansi yang berlaku.

Dalam konteks ini, indikator kinerja Badan Kepegawaian Negara adalah mencapai Opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Opini WTP juga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, bahwa organisasi tersebut menjalankan kegiatan dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku.

Untuk mencapai Opini WTP, organisasi perlu melakukan langkah-langkah penting dalam pengelolaan keuangan, seperti:

- a. Menerapkan sistem akuntansi yang akurat dan terkini, serta memastikan laporan keuangan disusun dengan cermat dan tepat waktu;
- b. Mengelola aset dan sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk mengelola anggaran dengan baik;
- c. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku;
- d. Melakukan audit internal secara berkala untuk memantau dan mengendalikan proses keuangan;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan informasi keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada para pemangku kepentingan.

Opini WTP dari BPK memiliki dampak yang signifikan bagi reputasi dan kepercayaan Badan Kepegawaian Negara. Opini tersebut dapat mempengaruhi hubungan dengan *stakeholder*, *customer*, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Opini WTP juga dapat mempengaruhi akses organisasi terhadap pembiayaan dan sumber daya lainnya.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian Negara menjadikan Opini WTP sebagai target kinerja yang penting. Upaya untuk mencapai Opini WTP harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan organisasi. Melalui implementasi praktik terbaik dalam tata kelola keuangan dan pelaporan, organisasi dapat meningkatkan peluang untuk mencapai Opini WTP yang akan memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan organisasi.

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	6)	6)
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	6)	6)
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	6)	6)
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	6)	6)
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 18. Opini BKN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2024 ini menargetkan target Opini BPK dengan predikat WTP. BKN kembali meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Prestasi ini telah diraih kelima belas (15) kalinya secara berturut-turut yang tertuang dalam LHP atas LK Pemerintahan Pusat T.A. 2023 Nomor: 35.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 25 Mei 2024.

Disisi lain, BPK juga telah menyelesaikan mandat atas pemeriksaan Laporan Keuangan dari 84 LKKL. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 80 LKKL, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Adapun, empat K/L tersebut adalah Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo dan Bapanas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BKN guna terus mempertahankan predikat WTP yang telah didapatkan selama lima belas tahun berturut-turut, adapun upaya tersebut diantaranya:

a. *Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Entitas di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI*

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK-RI selaku pemeriksa dengan Kementerian dan Lembaga yang akan diperiksa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap tujuan, sasaran, dan prosedur pemeriksaan. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan *entry meeting* di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK-RI pada 5 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, selaku pimpinan organisasi sekaligus pengguna anggaran didampingi Sekretaris Utama BKN beserta Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Keuangan. Pelaksanaan *Entry meeting* ini menandai dimulainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada 35 Kementerian dan Lembaga di lingkungan AKN III BPK-RI.

Menurut Isma Yatun, Ketua BPK, pelaksanaan *entry meeting* ini semoga dapat menjadi awal kolaborasi dan sinergi BPK dengan kementerian dan lembaga di lingkungan AKN III untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, dan profesional. Beliau juga berharap agar selama proses pemeriksaan, antara tim pemeriksa dan entitas untuk saling menjaga, sehingga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme menjadi landasan sentral dalam bersinergi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



Gambar 16. Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2023 Entitas
sumber : Dokumentasi BHHK

b. *Entry Meeting* BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Dalam Rapat *Entry Meeting* Pemeriksaan BPK-RI yang dilaksanakan pada 18 Januari 2024 di Ruang Data BKN, Ibu Sekretaris Utama BKN menyampaikan komitmennya dalam memperoleh Opini WTP melalui dukungan terhadap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK-RI yang akan bertugas selama 65 hari. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran BKN dalam bentuk Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi tujuan BKN sebagai Instansi Pemerintah dalam memenuhi dan mendukung tugas BPK-RI dalam Pemeriksaan ini. Kegiatan ini digunakan juga sebagai wadah untuk

menyamakan persepsi antara Biro Keuangan, Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi, dan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN serta Kantor Regional yang menjadi uji petik pemeriksaan dengan Tim Pemeriksa BPK-RI mengenai dokumen pertanggungjawaban yang harus disiapkan terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2023.

Bapak Tri Marhendra Rahadyan selaku Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK-RI menyampaikan harapan BKN agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan di Tahun 2024 ini setidaknya di atas 90%. Dalam kesempatan ini turut dijelaskan mengenai gambaran umum rencana pemeriksaan (waktu pelaksanaan, susunan tim, lokus, metode penentuan sampel lokus, dasar hukum). Satuan Kerja di BKN yang akan menjadi titik sampel, juga disampaikan pada kesempatan ini, yaitu Kantor Regional Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, dan Pusbangpeg ASN.

Tim BPK-RI yang diwakili oleh Bapak Tri Marhendra Rahadyan, juga menyampaikan terkait tujuan pemeriksaan dan pertimbangan dalam pemberian opini dalam pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK-RI.



Gambar 17. Entry Meeting BPK
sumber : Dokumentasi BHHK

c. Inventarisir Permasalahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)

Kegiatan inventarisir permasalahan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di seluruh satuan kerja BKN baik melalui monitoring data oleh Biro Keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga serta penyampaian permasalahan oleh penanggung jawab laporan keuangan masing-masing satuan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Januari 2024 di Ruang Rapat Biro Keuangan dengan dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan dan Pejabat Struktural yang terkait serta perwakilan dari Inspektorat, Biro Umum, serta seluruh Satuan Kerja melalui media Zoom. Pada kegiatan ini terdapat diskusi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan laporan keuangan. Satuan kerja yang memiliki permasalahan dapat segera menyelesaikannya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi temuan pemeriksaan nantinya.

d. *Workshop Penyusunan Draft Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)*

Workshop Penyusunan Draft Laporan Keuangan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang akan dilakukan BKN dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BKN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan setiap tahun. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Penyusun Laporan Keuangan baik dari Satuan Kerja BKN Pusat, Kantor Regional I sd XIV dan Pusbang Kepegawaian ASN (sebanyak 16 Satker) secara tatap muka di Aula Kantor Regional III BKN Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 s.d. Jumat 2 Februari 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dan diisi oleh 5 orang narasumber dari Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BKN TA 2023 ini akan menjadi salah satu tolok ukur atas keberhasilan penerimaan opini WTP BKN nanti. Laporan keuangan ini

diharapkan mampu menyajikan informasi kepada *stakeholder*, dimana ada beberapa kriteria, antara lain: kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem internal. Dalam kegiatan workshop ini dibahas beberapa *current issues* yang terdapat pada Laporan Keuangan BKN TA 2023, dan monitoring data, serta reviu Draft Laporan Keuangan BKN. Pada Workshop ini juga terdapat diskusi dan tanya jawab/pendampingan oleh Kementerian Keuangan maupun Inspektorat BKN mengenai perlakuan akuntansi dan kendala yang dirasakan oleh Satuan Kerja selama penyusunan Laporan Keuangan TA 2023.



Gambar 18. Workshop Penyusunan Draft Laporan Keuangan BKN TA 2023 (Unaudited)
sumber : Dokumentasi BHHK

e. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI di Satuan Kerja yang menjadi Uji Petik

Selain melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN di Kantor Pusat BKN, pada Tahun 2024 sesuai Surat Tugas BPK-RI Nomor 34/ST/V/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, Tim Pemeriksa BPK-RI juga melakukan pemeriksaan uji petik di Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, dan Papua. Dalam rangka memudahkan koordinasi dan komunikasi khususnya dalam penyiapan dokumen- dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa di daerah maka Biro

Keuangan berkolaborasi dengan Biro Umum dan Inspektorat selalu mendampingi satuan kerja yang akan menjadi objek pemeriksaan. Ini merupakan wujud dari fungsi pembinaan Sekretariat Utama demi meminimalisir temuan pemeriksaan yang nantinya akan berdampak pada opini Laporan Keuangan BKN. Selain itu, tujuan dari pendampingan ini adalah untuk membantu satuan kerja yang diperiksa apabila kesulitan dalam mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim pemeriksa serta mencari tindak lanjut yang terbaik atas temuan saat pemeriksaan.

f. Exit Meeting dengan BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2023 di Ruang Data Kantor BKN Pusat Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024, dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, serta perwakilan dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN, yang menjadi lokasi uji petik dalam pemeriksaan BPK. Mereka didampingi oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Bidang Keuangan, Pengelola BMN, dan Tim Pemeriksa dari BPK. Tim Pemeriksa BPK telah menyelesaikan tugas mereka selama 65 hari di lokasi-lokasi tersebut. Diharapkan bahwa temuan dari pemeriksaan ini dapat segera ditindaklanjuti, sehingga BKN dapat memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.



Gambar 19. Exit Meeting dengan BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan

g. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN Semester I Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Periode Bulan Juli dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024. Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Semester I dan Draft Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Juli 2024. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan setiap tahun yang merupakan tanggungjawab bersama.

Terselenggaranya workshop ini juga diharapkan dapat menyelaraskan persamaan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan antara satuan kerja sebagai penyusun Laporan Keuangan, Tim Reviu dari Inspektorat dan Pembina Instansi dari Kementerian Keuangan-RI, guna memastikan bahwa penyajian, pengungkapan Laporan Keuangan BKN telah disajikan dan disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 20. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN Semester I 2024

h. Penyerahan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BKN T.A. 2023 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023

BKN berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya, hal ini tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor: 35.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 25 Mei 2024. Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan hanya sekedar prestasi, melainkan kewajiban bagi instansi dalam mengelola keuangan negara. Pemeriksaan oleh Tim BPK di BKN berlangsung selama 65 hari. Lokasi pemeriksaan meliputi beberapa kantor BKN, seperti Kantor BKN Pusat, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN.



Gambar 21. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan dalam acara yang dihadiri secara luring dan daring oleh pejabat tinggi BKN pada tanggal 17 Juli 2024, diserahkan oleh Kepala Auditorat III.D BPK, Poegoeh Yoedo Roesmanto, sebagai penutup dari pemeriksaan keuangan negara BKN untuk Tahun Anggaran 2023. Poegoeh menekankan bahwa capaian opini WTP dapat meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan keuangan negara di tengah berbagai tantangan, baik yang bersifat berulang maupun yang baru. Ia

berharap rekomendasi BPK dapat membantu BKN dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta agar BKN dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

i. **Publikasi Laporan Keuangan (Audited) Tahun Anggaran 2023 pada laman media massa**

Sebagai bagian mewujudkan transparansi dalam tata kelola keuangan, serta bentuk tindak lanjut arahan BPK RI No. 89/S/I/08/2020 dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. S-720/PB/2020, BKN mempublikasikan ikhtisar Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*audited*) pada laman media massa cetak Media Indonesia, pada Jumat (30/08/2024). Publikasi Laporan Keuangan di media massa ini, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang benar. Lebih lanjut diharapkan agar dapat memacu masyarakat dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A. 2023 (AUDITED)		T.A. 2022 (AUDITED)	
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN				
PENGELUARAN NEGARA	19.396.526.000	26.203.195.552	115,89	21.880.244.150
BUKAN PAKAI				
JUMLAH PENDAPATAN	19.396.526.000	26.203.195.552	115,39	21.880.244.150
BERANGKA				
ELANJA PEGAWAI	356.489.732.000	346.666.997.060	97,30	325.007.563.078
BELANJA BERPENGARUH	619.400.961.000	578.783.169.324	93,44	341.793.819.534
BELANJA MUSIMAL	103.336.977.000	103.021.142.225	99,69	63.254.916.935
JUMLAH BELANJA	1.079.227.170.000	1.028.677.308.609	95,32	628.062.099.547

NEBACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)		31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	
	ASSET	31 DESEMBER 2023	ASSET	31 DESEMBER 2022
ASSET LANCAR	9.975.618.933	8.792.724.636	ASSET TETAP	3.166.883.437.818
ASSET LAINNYA	3.127.559.053	3.166.135.561.845	KOREKS YANG LANSUNG	(3.488.126.484)
KIMIAH ASSET	3.229.275.189.188	3.178.268.815.150	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1.751.032.909)
KEWAHIAN			EKUITAS AKHIR	628.812.187.507
KEWAHIAN JANGKA PENDEK	20.733.321.831	8.453.217.687	EKUITAS	3.208.549.866.357
KEWAHIAN JANGKA PANJANG	20.733.321.831	8.453.217.687	KIMIAH KEWAHIAN DAN	3.229.275.189.188
KEWAHIAN	3.229.275.189.188	3.178.268.815.150	EKUITAS	3.208.549.866.357

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A. 2023 (AUDITED)		T.A. 2022 (AUDITED)		
	PERDAPATAN KEGIATAN OPERASIONAL	REALISASI	PERDAPATAN KEGIATAN OPERASIONAL	REALISASI	
PENDAPATAN KEGIATAN OPERASIONAL	23.676.068.321	18.715.424.822	PENDAPATAN KEGIATAN OPERASIONAL	1.000.111.456	648.120.214.516
VARPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	(976.340.783.644)	(621.407.991.994)	VARPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.235.942.516	4.789.797.081
SURPLUS (DEFISIT) POSISI LAUAR BIASA	0	0	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	(975.104.940.728)	(616.619.194.013)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A. 2023 (AUDITED)		T.A. 2022 (AUDITED)		
	LEMBARAN AMBIL	REALISASI	LEMBARAN AMBIL	REALISASI	
SAKU/LUS DEBIT/LAPORAN OPERASIONAL	3.173.325.597.443	3.166.883.437.818	SAKU/LUS DEBIT/LAPORAN OPERASIONAL	(973.124.942.728)	(621.612.124.912)
KOREKS YANG LANSUNG	(3.488.126.484)	(1.751.032.909)	KOREKS YANG LANSUNG	(3.488.126.484)	(1.751.032.909)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.013.817.336.126	628.812.187.507	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.013.817.336.126	628.812.187.507
EKUITAS AKHIR	3.208.549.866.357	3.173.325.597.443	EKUITAS AKHIR	3.208.549.866.357	3.173.325.597.443

1. Laporan Keuangan T.A. 2023 (Audited) Badan Kepegawaian Negara termasuk dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan T.A. 2023 (Audited) Badan Kepegawaian Negara termasuk dalam Laporan Keuangan T.A. 2023 (Audited) Badan Kepegawaian Negara dan laporan keuangan yang terkait dengan entitas anak dan entitas induknya telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Laporan Keuangan T.A. 2023 (Audited) Badan Kepegawaian Negara telah dipersiapkan oleh Biro Keuangan dan telah diberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian'.
4. Informasi lebih rinci tentang Laporan Keuangan T.A. 2023 (Audited) Badan Kepegawaian Negara dapat dilihat di www.bkn.go.id.

PI. KEPALA
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA

HARYOMO DWI PUTRANTO

@BKNgoId **@BKNgoIdofficial** **www.bkn.go.id**

Gambar 22. : Ikhtisar LK BKN TA 2023 (Audited)

Sumber: Ikhtisar LK BKN TA 2023 (Audited) - Biro Keuangan

j. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN TW III Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap Triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sesuai amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 dan PMK Nomor 232 Tahun 2022 Laporan Keuangan disusun oleh seluruh Entitas Akuntansi dan Pelaporan dan disampaikan berjenjang termasuk kepada KPPN dan Kanwil DJPb, dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenjang sebagai penjelas Laporan Keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mitigasi kemungkinan risiko audit.

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2024 di Gedung I Kantor Pusat BKN Jakarta dan dihadiri oleh 100 orang peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan setiap tahun yang merupakan tanggungjawab bersama serta mitigasi risiko audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



Gambar 23. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN TW III T.A. 2024

sumber : Dokumentasi BHHK

Permasalahan

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI di beberapa titik uji petik antara lain Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, Kantor Regional X BKN Denpasar, Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, dan Kantor Pusat BKN, masih terdapat temuan-temuan pemeriksaan. Antara lain, kelebihan pembayaran belanja barang dan modal di beberapa satuan kerja, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang belum memadai, pencatatan persediaan dan aset yang belum tertib, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum memadai, pengelolaan kas di beberapa satuan kerja yang belum tertib, dan pengadaan jasa pendukung penyelenggaraan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang belum memadai.

Tindak Lanjut

Melakukan pembahasan temuan pemeriksaan antara Inspektorat, Biro Keuangan, dan Biro Umum dengan satuan kerja yang diperiksa serta mendorong satuan kerja yang terkait untuk mengembalikan uang ke kas negara apabila jenis temuannya merupakan kelebihan pembayaran, serta melakukan pembinaan berkala atas pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan sistem akuntansi instansi pada seluruh pengelola di satuan kerja salah satunya melalui workshop kepada seluruh pengelola keuangan.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 7	4	4	1	402.036.229.000	377.410.982.187	6.13%

Tabel 19. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 7

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur *opini atas Laporan Keuangan BKN* tercermin

dalam Tabel 16: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 7. Dengan pagu anggaran sebesar Rp402.036.229.000,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp377.410.982.187,00, efisiensi sumber daya berhasil dicapai pada nilai 6.13%.

IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Indikator Kinerja Utama	Baseli	Target 2023	Target 2024	Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
				2020	2021	2022	2023	2024		
Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	94.89	91	93	87.84	91.74	92.65	89.13	93.21	100.225%	94.4%

Tabel 20. Realisasi kinerja Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Dalam upaya mencapai belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki kualitas tinggi melalui percepatan belanja dan pencapaian hasil dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih transparan dan akuntabel, pada tahun 2024, terjadi perubahan dalam regulasi yang mengatur panduan teknis penilaian IKPA. Perhitungan IKPA 2024 menggunakan Peraturan terbaru dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sangat penting dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa nilai IKPA penting:

1. Pengukuran kinerja: IKPA memberikan landasan untuk mengukur

kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

2. Akuntabilitas: IKPA membantu dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dengan memiliki indikator kinerja yang terukur, organisasi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemilik perusahaan. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan tindakan korupsi.
3. Efisiensi dan efektivitas: IKPA membantu mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan melihat indikator kinerja, organisasi dapat mengetahui sejauh mana anggaran digunakan dengan efisien dan apakah hasil yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini membantu dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mencapai hasil yang optimal.
4. Perbaikan proses: IKPA memungkinkan identifikasi kelemahan dalam proses pelaksanaan anggaran. Dengan mengukur kinerja dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini memungkinkan perbaikan proses dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di masa depan.
5. Transparansi dan komunikasi: IKPA juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran. Dengan memiliki indikator kinerja yang terukur, organisasi dapat menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipahami mengenai pencapaian anggaran kepada pemangku kepentingan. Hal ini membangun kepercayaan dan memungkinkan adanya dialog yang lebih baik antara organisasi dan pemangku kepentingan.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 8	93	93.21	101.35	458.490.000	454.942.974	2.10%

Tabel 21. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 8

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur *Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)* pada tahun 2024 tercemin dalam Tabel 21 Efisiensi Sumber Daya - IKU 8. Dengan pagu anggaran sebesar Rp458.490.000,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp454.942.974,00 efisiensi sumber daya yang berhasil dicapai pada nilai 2,10%.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN															
No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	08801	BANDAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Nilai	98.75	78.01	97.78	87.71	97.03	94.83	99.49	93.96	100%	0.75	93.21	
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
			Nilai Akhir	9.88	11.70	19.56	8.77	9.70	9.48	24.87					
			Nilai Aspek	88.38		94.34			99.49						

Gambar 24. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BKN 088 -Desember 2024

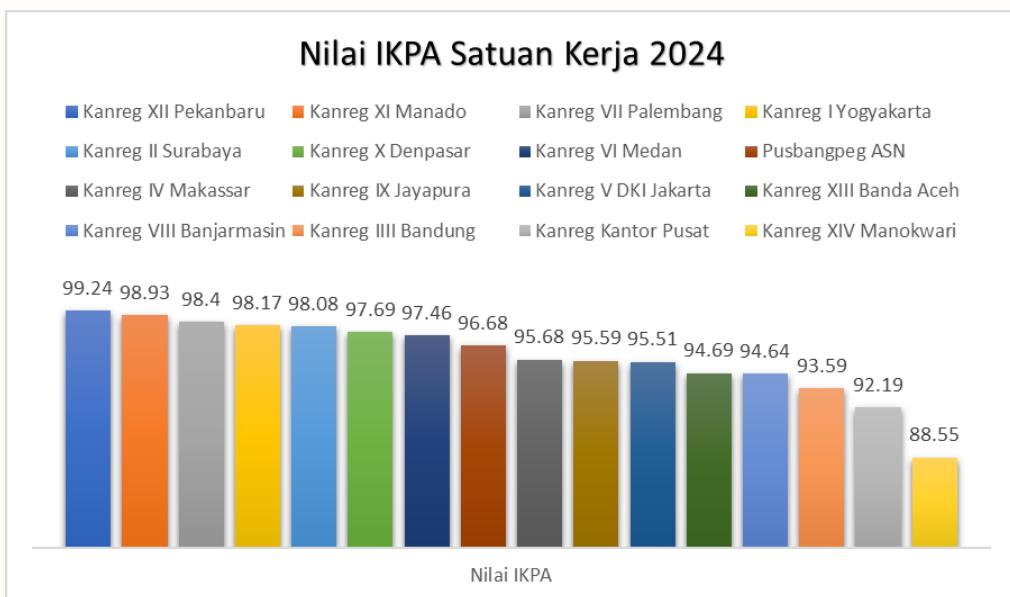
sumber : Aplikasi spanint.kemenkeu

Pada tahun 2024 Nilai Predikat *Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) BKN (BA 088)* adalah sebesar 93.21. BKN berusaha mempertahankan dan meningkatkan nilai IKPA hingga dapat mencapai tingkat yang lebih baik dan lebih maksimal dari tahun 2023 yakni 89.13. Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh satuan kerja selama satu tahun anggaran. Peningkatan nilai dapat dilakukan dikarenakan satuan kerja berusaha mengoptimalkan sumber daya secara proporsional berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.



Grafik 10. Perbandingan Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) BKN (2020-2024)

Dari Grafik 13 dapat terlihat perolehan nilai IKPA BKN BA 088 dari tahun 2021-2024. Nilai IKPA BKN 088 dari nilai 91.74 di tahun 2021 naik menjadi 92.65 di tahun 2022, dan turun menjadi 89.13 di tahun 2023, namun kembali naik menjadi 93.21 di tahun 2024. Terdapat indikator yang mengalami kendala selama proses pencapaian nilai maksimal di Tahun 2024. Antara lain, rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja yang tercermin pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih memerlukan peningkatan. BKN masih mendapat nilai 78.01 (nilai 11.70 dari bobot maksimal 15), dengan kata lain indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih menjadi indikator yang perlu menjadi perhatian di beberapa Satuan Kerja. Rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja masih perlu mendapat perhatian di setiap Satuan Kerja di BKN.



Grafik 11. Grafik Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja BKN Tahun 2024

Nilai IKPA tertinggi tahun 2024 terdapat pada Kantor Regional BKN I Pekanbaru dengan nilai 99.24, sedangkan peringkat II Kantor Regional BKN XI Manado dengan nilai 98.93, berbeda dengan tahun 2023 peringkat pertama adalah Kantor Regional BKN VIII Banjarmasin dengan nilai 99.79.

Permasalahan

Kendala eksternal: Terdapat kebijakan masing-masing KPPN Satker yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi nilai IKPA masing-masing indikator. Kemudian indikator dengan nilai terendah adalah aspek Deviasi Halaman III DIPA pada Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai 81.15. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menunjukkan bahwa rencana kegiatan satker atau K/L terlaksana belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKN masih belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Selain itu, faktor pergantian pengelola keuangan pada awal tahun 2024 menyebabkan beberapa tagihan kontraktual terlambat yang menyebabkan nilai IKPA terpengaruh. Terlebih lagi banyak indikator yang mengalami perubahan penghitungan pada peraturan terbaru,

sehingga memerlukan strategi baru dalam memaksimalkan pencapaian target.

Kendala lainnya adalah masih belum aware-nya pengelola anggaran di unit kerja untuk merevisi/memperbarui Halaman III DIPA sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga deviasi dapat dihindarkan.

Tindak Lanjut

Sekretariat Utama BKN berusaha untuk memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BKN. Antara lain dengan melakukan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan berkala baik satuan kerja BKN Kantor Pusat, Kantor Regional (14 Kantor Regional) dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

Selain itu Sekretariat Utama terus melakukan monitoring terhadap perubahan yang mungkin terjadi sehingga pengelolaan keuangan dapat terus menyesuaikan kebijakan terbaru. Langkah monitoring ini merupakan wujud dari pembinaan atas pelaksanaan anggaran. Selain itu tindak lanjut dari rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA untuk terus dilakukan monitoring terkait kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya agar kedepannya dilaksanakan penyesuaian. Selain hal itu, tindak lanjut lainnya adalah dengan melakukan edukasi secara berkala atau pembinaan reformulasi IKPA terbaru terhadap seluruh pengelola keuangan melalui pendampingan maupun reminder melalui nota dinas.

Tindak lanjut untuk tahun selanjutnya adalah dengan pemaksimalan penyerapan anggaran pada setiap triwulan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kemudian akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh satker untuk meningkatkan nilai pada aspek.

link sumber data duku IKU 8 : https://drive.google.com/drive/folders/1cSFYOWacJmAcX2W-vH_5ezZ_Khys2dhf?usp=drive_link



**“
Aset negara
harus memberi
nilai tambah”
”**

Nanang Subandi, S.Kom, M.MSI

**Kepala Biro Umum
Badan Kepegawaian Negara**

Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Hubungan Masyarakat Yang Efektif

IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN

Indikator Utama	Kinerja	Baseline	Target		Realisasi					Persentase Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
			2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024		
Percentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN		N/A	94	N/A	N/A	N/A	N/A	81.8	123.5	120	N/A

Tabel 22. Realisasi Target IKU Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN

Sumber: Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, data diolah

Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik berkewajiban untuk diseminasi informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diseminasi informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 25. Rapat Koordinasi Kehumasan

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik berkewajiban untuk mendiseminasi informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator persentase capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN bertujuan untuk mengukur capaian diseminasi informasi yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara. *Reach* atau jangkauan adalah matrik yang mengukur jumlah orang yang melihat unggahan BKN pada media publikasi. Realisasi [persentase capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN](#) pada tahun 2024 sebesar **123.5** dari target **94** pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama tahun 2024. Upaya yang telah dilaksanakan dalam capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN sebagai berikut:

- Penyusunan strategi komunikasi badan kepegawaian negara tahun 2024;
- Pembagian *person in charge* dalam peliputan kegiatan/program; serta
- Rapat Koordinasi Kehumasan yang diisi oleh praktisi komunikasi dan media

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN	94	123.5	1.31	94.253.956	94.253.956	23.89%

Tabel 23. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 12

Pada tabel di atas, efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi per Media BKN sebesar Rp. 94.253.956 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.253.956, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 23,89%. Pada perencanaan awal tahun 2024 anggaran

IKU persentase capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN sebesar Rp.182.800.000, namun dikarenakan kebutuhan anggaran layanan protokoler terbatas maka dilakukan pengalihan anggaran sebesar Rp.88.546.044.

IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja Utama	Baseli ne	Target		Realisasi					Persentase Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	N/A	91	91	69,12	73,13	90,93	90,19	94,67	104,03	N/A

Tabel 24. Realisasi Target IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Keterbukaan informasi publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik



Gambar 26. Sidang KIP

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan.

Keterbukaan informasi publik dinilai dari 6 (enam) komponen indikator yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta digitalisasi. Penilaian dilaksanakan dengan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya diverifikasi oleh Komisi Informasi Pusat dan presentasi Badan Kepegawaian Negara kepada Komisi Informasi Pusat yang dipresentasikan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pengukuran keterbukaan informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan predikat pada badan publik sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9;
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Berdasarkan [Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024](#) tentang hasil monitoring dan evaluasi



Grafik 12. Perbandingan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Sumber: Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BKN oleh Komisi Informasi Pusat

keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara mendapat kategori **informatif** dengan nilai **94.67**. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama yaitu **Informatif** dengan nilai **91**.

Nilai keterbukaan informasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, nilai keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sebesar 0.74 karena adanya perubahan pembobotan nilai. Namun, di tahun 2024 nilai keterbukaan informasi publik dapat meningkat sebesar 4.48 poin, upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan nilai keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- Menyusun Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11.10 TAHUN 2024 tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024
- Rapat koordinasi kehumasan yang diisi oleh tenaga ahli komisi informasi pusat
- Bimbingan teknis keterbukaan informasi publik pada pengelola informasi satuan kerja (PIS) baik dari kantor regional maupun pusat BKN
- Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan dengan penyusunan dan pengumpulan evidence kepada komisi informasi pusat
- Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID regional oleh Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, dimana PPID Kantor Regional menyusun dan mengumpulkan evidence terkait kepada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama. Melalui monitoring dan evaluasi, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama melaksanakan penilaian dan menentukan PPID Kantor Regional dengan kategori “Informatif”. Namun, terdapat beberapa kantor regional yang belum mengumpulkan bukti dukung pelayanan informasi sehingga belum dapat dilakukan pengukuran pada kantor

regional tersebut.

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian nilai keterbukaan informasi publik pada tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama akan mengoptimalkan peran serta kantor regional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Kantor Regional melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91 (Informatif)	94.67 (Informatif)	1.04	25.651.000	25.651.000	3.88%

Tabel 25. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 10

Pada tabel di atas, efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp25.651.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp25.651.000, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 3.88%. Pada perencanaan awal tahun 2024 anggaran IKU keterbukaan informasi publik sebesar Rp104.1750.00, namun dikarenakan kebutuhan anggaran layanan protokoler terbatas maka dilakukan pengalihan anggaran sebesar Rp78.519.000.

Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima bagi mitra Sekretaris Utama

IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target 2023	Target 2024	Realisasi					Capaian Jangka Menengah
				2020	2021	2022	2023	2024	

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	N/A	88	95	81.49	84,01	85,67	87.92	91.62	96.44	96.44
--	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

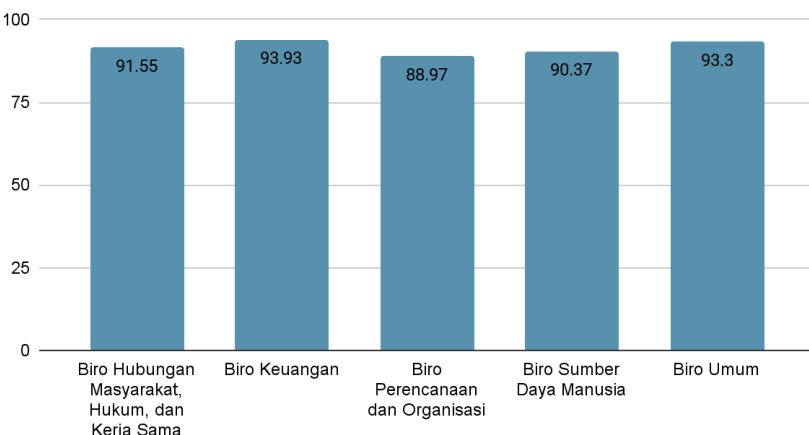
Tabel 26. Realisasi Target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Sumber: Biro di Lingkungan Sekretariat Utama, Data Diolah

Salah satu upaya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat akan diketahui kelemahan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat dilakukan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dengan pengukuran skala likert. Skala tersebut digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang pada layanan publik.

Indeks Kepuasan per Biro di Lingkungan Sekretaris Utama

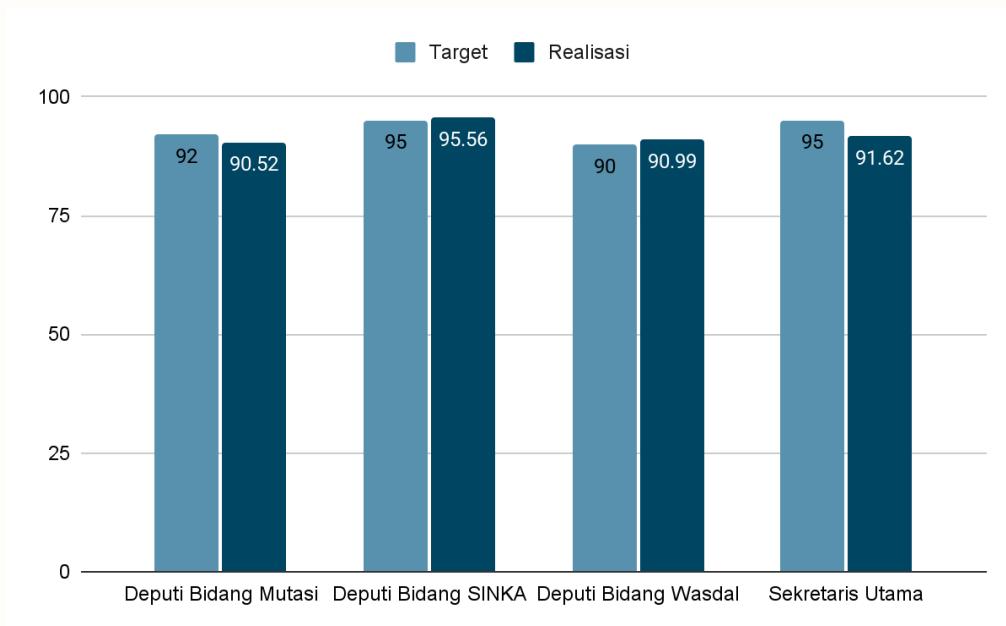


Grafik 13. Indeks Kepuasan Pelayanan Biro di Lingkungan Sekretariat Utama Tahun 2024

Sumber: Data Indeks Kepuasan Layanan Biro di Lingkungan Sekretariat Utama Tahun 2024

Perhitungan indeks kepuasan layanan sekretaris utama dihitung dari nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada masing-masing Biro. Berikut adalah [nilai indeks kepuasan layanan per Biro](#) nilai indeks kepuasan layanan per Biro di Lingkungan Sekretariat Utama tahun 2024:

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh oleh masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Utama, maka dapat diambil rata-rata nilai indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Utama tahun 2024 adalah **91.62** dari target perjanjian kinerja Sekretariat Utama sebesar 95.



Grafik 14. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2024

Sumber: Data Indeks Kepuasan Layanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, nilai indeks kepuasan layanan sekretaris utama tahun 2024 menempati nilai tertinggi kedua dibandingkan dengan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indeks kepuasan pelayanan sekretaris utama serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Indeks kepuasan layanan tertinggi diperoleh oleh layanan terpadu dan pengaduan masyarakat dengan nilai 95,60, sedangkan nilai terendah diperoleh pada layanan hukum dengan skor 86,30. Tindak lanjut dalam meningkatkan kepuasan layanan yaitu publikasi terkait dengan tata cara mendapatkan pelayanan dan informasi-informasi terbaru baik melalui media sosial BKN ataupun TV Media dan evaluasi secara berkala.

2. Biro Keuangan

Nilai indeks kepuasan terbaik terbaik diperoleh pada Pelayanan Belanja Pegawai di Pusbang Kepegawaian ASN dan Kantor Regional BKN dengan skor nilai IKM 96,12 sedangkan nilai paling rendah diperoleh pada Pelayanan Pembinaan PNBP BKN dengan nilai 90,62. Tindak lanjut dalam peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dalam pembinaan PNBP pada unit kerja yang memiliki PNBP yakni Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Pusat Pusat Pengembangan Sistem Seleksi dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN.
- b. Meningkatkan efektivitas dalam pembinaan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan perbendaharaan pada unit kerja.
- c. Meningkatkan kemampuan pegawai Biro Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan anggaran di unit kerja.
- d. Meningkatkan fasilitas konsultasi/sharing session Biro Keuangan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan anggaran di unit kerja.
- e. Meningkatkan pembinaan keuangan secara virtual melalui program NGUPAS.
- f. Membuat aplikasi pendukung pengelolaan keuangan yang andal, akuntabel dan mudah diakses oleh user unit kerja

3. Biro Perencanaan dan Organisasi

Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Layanan sebagai upaya evaluasi dalam pelaksanaan layanan

yang dilakukan. Survei dilakukan dengan mengukur 8 indikator diantaranya Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Informasi Layanan; Produk Layanan; Kompetensi Pelaksana Layanan; Perilaku Pelaksana Layanan; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai tertinggi kepuasan layanan yang diberikan terdapat pada indikator Kompetensi Pelaksana Layanan dan Perilaku Pelaksana Layanan, hal ini berarti pegawai Biro Perencanaan dan Organisasi sudah melaksanakan layanan dengan baik. Namun, terdapat indikator yang masih perlu ditingkatkan, yaitu indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Berdasarkan hasil tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi perlu melakukan perbaikan dalam hal Kejelasan prosedur tentang pelayanan, perlu adanya SOP yang jelas dalam layanan yang diberikan, serta perlu merumuskan Proses/tahapan atau alur layanan yang sederhana dan mudah diakses oleh pengguna layanan.

4. Biro Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Biro SDM dalam survey IKM Pelayanan Manajemen SDM meraih skor kepuasan pelayanan sebesar 90,37. Capaian ini mencerminkan apresiasi yang positif dari para penerima layanan terhadap beberapa bidang pelayanan Biro SDM, yaitu bidang mutasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, serta kinerja dan disiplin. Namun, dari hasil survei tersebut juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk perbaikan layanan kedepannya.

Di bidang mutasi kepegawaian, hasil survei menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait pengelolaan jabatan fungsional, khususnya dalam merespons usulan dari unit kerja mengenai pegawai yang mengikuti uji kompetensi untuk perpindahan jabatan. Beberapa usulan ini belum mendapat tanggapan dari Biro SDM, yang berdampak pada

penundaan dalam proses usulan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan yang digantung dan tidak mendapatkan surat balasan sehingga memengaruhi kepuasan pegawai.

Di bidang kesejahteraan pegawai, terdapat keluhan terkait proses pemberian tanda jasa Satyalancana Karyasatya, yang beberapa kali terlewat sehingga pegawai yang berhak tidak menerima penghargaan SLKS tersebut tepat waktu. Pemberian tanda jasa ini merupakan bentuk apresiasi penting bagi pegawai yang telah mengabdi dalam jangka waktu tertentu di BKN, sehingga keterlambatan dalam pemberiannya menjadi perhatian yang perlu diperbaiki.

Sedangkan dalam bidang pengembangan pegawai, pemanfaatan aplikasi CMB (Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri) juga belum optimal. Beberapa pegawai menyampaikan bahwa aplikasi tersebut belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengembangan kompetensi mereka, baik dalam aksesibilitas maupun efektivitas penggunaannya.

Biro SDM mengapresiasi masukan-masukan ini sebagai bentuk evaluasi konstruktif yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Dengan adanya hasil survei ini, Biro SDM berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam merespons usulan unit kerja terkait jabatan fungsional, memastikan pemberian tanda jasa dilakukan secara tepat waktu, serta meningkatkan optimalisasi aplikasi CMB agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pegawai. Harapannya, dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, tingkat kepuasan pelayanan akan semakin meningkat dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan internal BKN.

5. Biro Umum

Biro Umum telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas layanan

yang diberikan. Berdasarkan hasil survei, nilai IKM secara keseluruhan mencapai 93,3 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik). Survei ini mencakup tiga layanan utama, yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Layanan Rumah Tangga, dengan mayoritas responden berasal dari pihak eksternal.

Meskipun secara umum pelayanan sudah dinilai sangat baik, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Unsur Waktu Penyelesaian menjadi perhatian utama karena mendapatkan nilai terendah (93,57), mencerminkan masih adanya keluhan terhadap kecepatan proses layanan. Selain itu, aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan serta Sarana dan Prasarana mengalami penurunan skor dibandingkan triwulan III. Hal ini selaras dengan berbagai kritik yang disampaikan responden, terutama terkait kondisi infrastruktur seperti kerusakan plafon, fasilitas toilet, dan sistem pendingin ruangan (AC) yang perlu diperbaiki segera.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Biro Umum perlu mengambil langkah strategis dalam beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan evaluasi dan percepatan prosedur penyelesaian layanan, terutama dalam aspek pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan aset negara. Kedua, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor menjadi prioritas dengan memastikan adanya sistem pemeliharaan rutin. Ketiga, penanganan pengaduan harus lebih transparan dan responsif, misalnya dengan menyediakan platform khusus untuk pelaporan dan pemantauan pengaduan layanan. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja petugas keamanan dan vendor terkait pengadaan barang juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Semua upaya perbaikan ini tentu membutuhkan dukungan yang kuat, baik dalam bentuk anggaran maupun non-anggaran. Dari sisi anggaran,

diperlukan alokasi dana yang memadai untuk pemeliharaan fasilitas, pengadaan barang, serta pengembangan sistem layanan digital. Sementara itu, dari sisi non-anggaran, dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta peningkatan kompetensi dan kesadaran para pegawai terhadap pentingnya pelayanan prima.

Dengan adanya dukungan yang optimal dalam aspek anggaran maupun non-anggaran, diharapkan kualitas pelayanan Biro Umum semakin meningkat, sehingga mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan baik dari kalangan internal maupun eksternal. Keberlanjutan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei akan menjadi kunci utama dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	95	91.62	0.96	18.351.000	18.351.000	-3,77%

Tabel 27. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 11

Pada tabel di atas, efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama dengan pagu anggaran sebesar Rp18.351.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp18.351.000, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai -3.77%. Pada perencanaan awal tahun 2024 anggaran IKU indeks kepuasan pelayanan sekretaris utama sebesar Rp55.525.000, namun dikarenakan kebutuhan anggaran layanan protokoler terbatas maka dilakukan pengalihan anggaran sebesar Rp31.740.000.

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIF

Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Penempatan SDM BKN Sesuai Dengan Kompetensi

8IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target 2023	Target 2024	Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
				2020	2021	2022	2023	2024		
Terlaksananya Penempatan SDM BKN Sesuai Dengan Kompetensi		92	93	95	80	91	93	94,08	95	100%

Tabel 28. Realisasi Target IKU Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Sumber: Olah Data Biro Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Terlaksananya Penempatan SDM BKN Sesuai Dengan Kompetensi dapat dilihat pada Tabel Efisiensi Sumber Daya - IKU 12, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 838.075.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 744.815.000, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 2,01623%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 12	95	95	100%	838.075.000	744.815.000	2,01%

Tabel 29. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 12

Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian berbanding target sebesar 100%. Target yang dicanangkan pada tahun 2023 secara umum telah terpenuhi dan melebihi target. Dalam mengukur capaian indikator kinerja persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya ini digunakan data yang diperoleh dari Sistem Manajemen Talenta BKN, dimana manajemen talenta merupakan aktivitas terintegrasi dalam mengelola SDM melalui proses mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan menyebarkan orang-orang bertalenta tinggi ke dalam suatu jabatan di organisasi secara tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki individu SDM tersebut. Manajemen Talenta wajib diselenggarakan oleh instansi dalam mendukung pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, tahapan penyelenggaraan Manajemen Talenta meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta serta pemantauan dan evaluasi talenta.

Dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, disusunlah Sistem Informasi Manajemen Talenta Bernama MATA ASN BKN. MATA ASN BKN berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan dan juga mengembangkan pegawai-pegawai agar didapatkan talenta-talenta terbaik yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis untuk memenuhi kebutuhan instansi. Dalam perhitungan dan analisis menggunakan Sistem Manajemen talenta untuk capaian target IKU Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, Biro SDM Menyusun *milestone* untuk kluster pegawai yang diidentifikasi sebagai berikut:

No.	Tahun	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	2022	JFT Madya dan Administrator	123 pegawai
2.	2023	JFT Muda dan Pengawas	473 pegawai
3.	2024	JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama, JFT Pertama, JF Pelaksana, JF Ketrampilan	2356 Pegawai

Tabel 30. Milestone kluster pegawai Manajemen Talenta

Untuk tahun 2024 dilakukan perhitungan untuk JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama, JFT Pertama, JF Pelaksana, JF Ketrampilan 2356 Pegawai untuk seluruh rumpun Jabatan. Hasil Perhitungan didapatkan 2238 pegawai dari 2356 pegawai (95%) yang dinilai sesuai dan 118 (5%) pegawai belum sesuai dengan rumpun penempatan pegawai seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Level	Jabatan	Jumlah Pegawai	Sesuai	Tidak sesuai
3	JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama, JFT Pertama, JF Pelaksana, JF Ketrampilan	2356	2238	118

Tabel 31. Rekapitulasi Box 9 JPT & JF Manajemen Talenta

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator XYZ dimana seluruh komponen yang meliputi diantaranya:

1. Potensi;
2. Kinerja yang terdiri dari SKP dan Kompleksitas Pekerjaan;
3. Kompetensi yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 - b. Kompetensi Teknis: Rekam Jejak, Pelatihan Non Klasikal (CMB) Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis;
 - c. Kualifikasi: Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Penghargaan, Hukuman Disiplin dan Pelatihan Kepemimpinan.

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian target IKU persentase terlaksananya penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya pada tahun berikutnya, tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

- a. Membuat Pedoman penyusunan Pola Karier;
- b. Menyusun pedoman Human Capital Development Plan 2022-2026;
- c. Menyempurnakan Sistem Manajemen Talenta;
- d. Mengimplementasikan pengukuran *Job Fit* untuk setiap seleksi baik itu dalam proses rekrutmen CPNS maupun dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya RB BKN Sesuai Roadmap

IKU 13. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN

Indikator Kinerja Utama	baseline	Target		Realisasi						Persen Capaian 2023	Persen Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN		N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	

Tabel 32. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2024 masih mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2020-2024. Perubahan atau penajaman peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arah Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Sebagaimana peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, yang menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penyelesaian “isu hulu” yang disebut dengan RB General. Isu yang dimaksud ialah seperti permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi. Berdasarkan penjelasan di atas, pada tahun 2024 BKN telah menyusun Rencana Aksi RB sebanyak 24 Indikator penilaian dengan 17 Kegiatan utama serta 71 Rencana Aksi. Sampai dengan akhir periode triwulan IV tahun 2024, **seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100%** mengingat seluruh indikator penilaian telah melewati tahap penilaian oleh evaluator meso. Hingga laporan ini disusun, hasil evaluasi pelaksanaan RB general belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB, meskipun begitu terdapat dari beberapa indikator pelaksanaan RB yang telah diumumkan hasilnya dan mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik, BKN memperoleh Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,76 dengan Predikat Baik. Indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian sebelumnya yaitu 2,53 atau Predikat Cukup.

-
- 2) Hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, menunjukkan bahwa BKN berhasil mempertahankan Predikat Sangat Baik dengan kenaikan nilai sebesar 3,7 atau 98,46 dibandingkan capaian sebelumnya yaitu 94,73.
 - 3) Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa BKN memperoleh nilai sebesar 69,26 dengan predikat "B", dimana nilai ini meningkat dari yang sebelumnya 68,82 dengan predikat yang sama.
 - 4) Sebagaimana diumumkan dalam website resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (<https://pmep.lkpp.go.id/itkp>) terkait hasil final indeks tata kelola pengadaan barang/jasa tahun 2024, BKN memperoleh skor 90,28, dimana terdapat peningkatan signifikan dari capaian sebelumnya yakni sebesar 83,24.
 - 5) Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, BKN nilai indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 adalah 96,24 dengan kategori AA (Istimewa). Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan dari capaian sebelumnya 87,5 atau Predikat Sangat Baik.
 - 6) Sebagaimana Keputusan KASN Nomor 18/KEP.KASN/C/IV/2024, BKN memperoleh nilai Sistem Merit sebesar 380 pada kategori IV (Sangat Baik). Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 42 poin dari capaian sebelumnya 339.
 - 7) Menurut hasil penilaian oleh Kementerian PANRB, BKN berhasil mempertahankan Indeks Pelayanan Publik dengan predikat Pelayanan Prima, dimana terdapat peningkatan dari nilai sebelumnya 4,69 menjadi 4,78.
 - 8) Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 oleh Kementerian PANRB menunjukkan Indeks SPBE BKN meningkat sebesar 0,53 poin atau sebesar 4,19 dengan predikat "Sangat Baik" dari capaian tahun sebelumnya yaitu 3,66. Selain itu, untuk penilaian tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE

sebagaimana diumumkan dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE (<https://arsitektur.spbe.go.id/>), BKN memperoleh nilai 3, dimana nilai ini merupakan paling optimal yang dapat dicapai oleh instansi pemerintah pada tahun 2024 karena sistem aplikasi Kementerian PANRB yang masih dalam fase pengembangan.

- 9) Terkait dengan penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, dari 2 (dua) kantor regional yang diusulkan pada 2024, terdapat 1 (satu) Kantor Regional yang berhasil mendapatkan Predikat WBK yaitu Kantor Regional V BKN Jakarta sehingga tingkat keberhasilan pembangunan tahun 2024 mencapai 50% sehingga total keseluruhan kantor regional yang telah berpredikat WBK menjadi 8 (delapan), antara lain Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, dan Kanreg XII BKN Pekanbaru.
- 10) Indeks BerAKHLAK BKN mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, BKN memperoleh nilai 80,2% dengan Predikat Sehat, dimana terdapat peningkatan 16,6 poin dari capaian sebelumnya yaitu 63,6% atau Predikat Cukup Sehat.
- 11) Pada tahun 2024, indeks kualitas kebijakan tidak dilakukan penilaian namun tetap dilaksanakan rencana aksi untuk mendorong peningkatan untuk indeks ini di penilaian mendatang. Sebagaimana hasil penilaian pada tahun sebelumnya oleh Lembaga Administrasi Negara, BKN memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 79,81.
- 12) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan akhir TW IV tahun 2024 adalah sebesar 94,26. Nilai ini juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya adalah 92,65 pada tahun 2023.

Bukti dukung progres pelaksanaan Rencana Aksi RB General BKN dapat diakses pada link berikut.

1. <https://s.id/LHERB>

2. <https://s.id/RBGeneral>

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Rencana Aksi RB General BKN terdapat anggaran untuk mendukung capaian IKU tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada dokumen renja tahun 2024 awalnya sebesar Rp307.495.000,-, namun saat berjalannya tahun anggaran, realisasi dalam mencapai IKU ini adalah sebesar Rp. 211.177.610,-.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 13	100	100	100	Rp307.495.000,-	Rp211.177.610,-	31,3%

Tabel 33. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 13

Berdasarkan data di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tercermin dalam Tabel x: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 13. Dengan pagu anggaran sebesar Rp307.495.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp211.177.610,-, skor efisiensi sumber daya yang didapat adalah sebesar 31,3%. Jika melihat hasil perhitungannya, hasil tersebut dapat dianggap kurang efisien karena terdapat selisih antara alokasi awal anggaran dengan realisasinya, sehingga ke depan perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih matang.

IKU 14. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator Kinerja Utama	Baseli ne	Target		Realisasi						Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Indeks Pengelolaan Aset	n/a	3,2	3,5	n/a	3,01	3,14	3,28	3,53	100.86%	100.86%	

Tabel 34. Realisasi Target IKU Indeks Pengelolaan Aset

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan.

Penilaian baru dilakukan efektif pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2020 realisasinya n/a. Tahun 2024 BKN mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset 3.53 dengan capaian kinerja 100.86% terhadap target jangka menengah.

Adapun parameter yang menjadi penilaian bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Parameter	Bobot	
Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif			20%
1	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L	5%	
2	Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	15%	25%
Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan			
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN	10%	30%
4	Asuransi BMN	15%	
Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif			30%
5	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	15%	
6	Tindak lanjut terhadap BMN Rusak Berat	15%	25%
Administrasi BMN yang Andal			
7	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan	15%	25%
8	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	10%	

Tabel 35. Parameter Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Beberapa hal yang dilakukan oleh Biro Umum sepanjang tahun 2024 untuk meningkatkan penilaian IPA sebagai berikut:

-
1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L
Total rekomendasi yang diberikan oleh BPK adalah 12 dengan 8 diantaranya sudah ditindaklanjuti dengan sesuai. Terdapat 2 temuan yang sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai yakni:
 - a. Dokumen bukti pelaksanaan perintah berupa Pengamanan dan Penatausahaan BMN sesuai temuan pemeriksaan diantaranya:
 - 1) Tanah di lokasi Permata Hijau, Bekasi, Bogor yang belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
 - 2) Satu Bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II di Kemayoran, Sumur Batu yang Dikuasai oleh Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan;
 - 3) Satu bidang tanah di Kranji, Bekasi Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal dan digunakan masyarakat;
 - 4) Sebidang tanah di daerah Kemayoran, Sumur Batu yang dihuni oleh Bukan ASN.
 - b. Dokumen bukti pelaksanaan perintah berupa Pelaporan dan Pemutakhiran status aset tetap sesuai temuan pemeriksaan diantaranya:
 - 1) Lapangan Tenis dan Masjid yang belum dicatat;
 - 2) Jalan aspal dan perkerasan lingkungan yang belum dicatat dalam Neraca BKN;
 - 3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum dicatat dalam DBR.
 2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sudah

disampaikan tepat waktu pada bulan November 2024

3. Asuransi BMN

Pembelian asuransi BMN sudah dilaksanakan pada gedung I dan gedung CAT BKN Pusat dengan periode perlindungan bulan Januari - Desember 2024. Saat ini, asuransi BMN belum berlaku di semua gedung Badan Kepegawaian Negara dikarenakan memerlukan kajian dan persiapan anggaran dari masing-masing Kantor Regional dan UPT.

4. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

Semua BMN yang ada sudah memiliki dokumen kepemilikan. Tahun 2024 BKN berhasil membuat dokumen kepemilikan atas rumah di Permata Hijau, Bogor, dan Bekasi sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan peringkat III Reksa Bandha 2024.



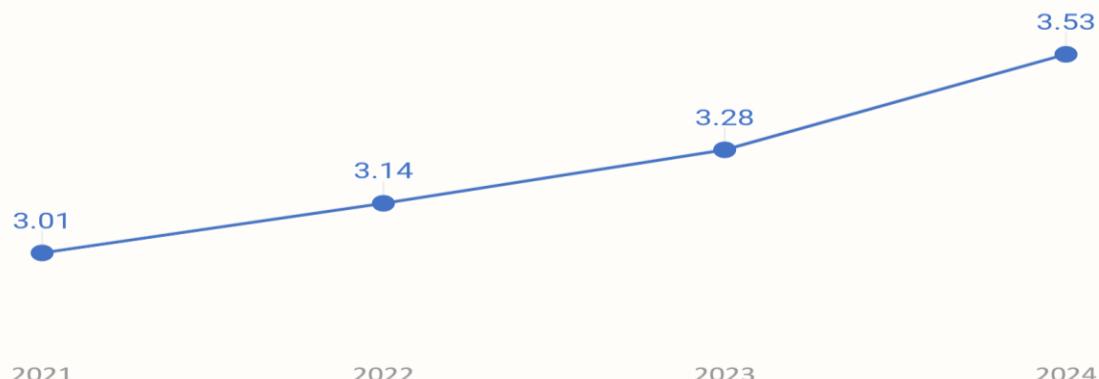
BKN Raih Peringkat III Kategori Sertifikasi BMN dalam Anugerah Reksa Bandha 2024

⌚ 05/12/2024 ⚡ Berita, Publikasi

Gambar 27. Penyerahan Penghargaan Peringkat III Reksa Bandha 2024

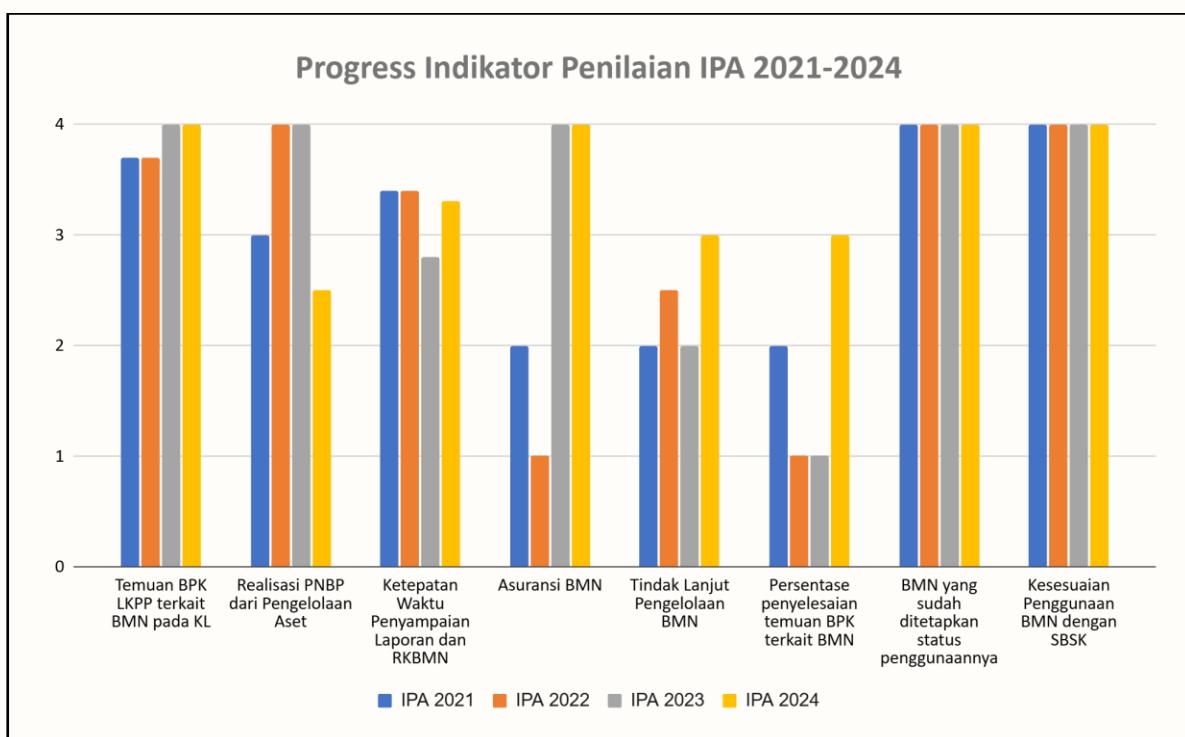
(sumber: <https://s.id/8z7pv>)

Progress Nilai Indeks Pengelolaan Aset BKN



Grafik 15. Penilaian IPA BKN Periode 2021-2024 (sumber: s.id/IPA_BA088)

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2021 hingga 2024, dengan beberapa aspek mengalami peningkatan signifikan sementara yang lain menunjukkan penurunan.



Grafik 16. Indikator Penilaian IPA 2021-2024 (sumber: s.id/IPA_BA088)

Salah satu pencapaian terbesar di tahun 2024 adalah meningkatnya tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN serta tindak lanjut terhadap BMN rusak berat, yang keduanya mengalami lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam efektivitas pengelolaan aset negara, kemungkinan besar didorong oleh reformasi birokrasi, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta implementasi kebijakan yang lebih ketat dalam menindaklanjuti pengelolaan aset.

Namun, di sisi lain, realisasi PNBP dari pengelolaan aset mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan tarif, terbatasnya aset yang dapat dimonetisasi, atau adanya kendala administratif dalam pemanfaatan aset negara. Sementara itu, stabilitas yang terlihat dalam pengelolaan status BMN dan kesesuaian penggunaannya dengan SBSK menunjukkan bahwa tata kelola aset telah mencapai tingkat yang cukup matang, dengan mekanisme yang berjalan konsisten sejak 2021.

Secara keseluruhan, pencapaian di tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek manajerial dan kepatuhan terhadap regulasi, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara dari aset BMN. Keberlanjutan tren positif ini bergantung pada bagaimana BKN mampu mengatasi hambatan dalam pemanfaatan aset serta terus memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BMN.

Progress Pembangunan UPT BKN

Realisasi pembangunan UPT BKN di tahun 2024 mencapai 85% dikarenakan proses pembangunan UPT Gorontalo yang belum selesai. Adapun pada awal pelaksanaan tender, terdapat gagal tender karena kekurangan dokumen tender. Berdasarkan diskusi dengan PU setempat,

maka sempat dilakukan perubahan desain gedung karena sering banjir saat pelaksanaan sehingga hal ini menyebabkan diperlukan tambahan waktu untuk menguruk tanah. Selain itu, terjadi status tanggap darurat karena longsor di Gorontalo pada 30 Juni - 29 Juli 2024, sehingga ada keterlambatan terkait dengan pembangunan. Pengiriman material bangunan dan mekanikal elektrikal memerlukan waktu yang lama karena berasal dari Jakarta disebabkan tidak tersedianya material yang dibutuhkan pada proses pembangunan. Selain itu, di Gorontalo tidak terdapat alat HSPD yang diperuntukkan untuk memancang beton pondasi sehingga metode pelaksanaan pondasi diubah menggunakan alat bore pile. Akibat perubahan tersebut menyebabkan proses pembuatan pondasi lebih lama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, pekerjaan kontrak tahunan (*single year contract*) yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2024 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia. Oleh karena itu, pembangunan UPT BKN Gorontalo dengan sumber pembiayaan SBSN tidak selesai di TA 2024 dan akan dilanjutkan di tahun 2025 dengan mekanisme pemberian kesempatan dan menambah pagu anggaran tahun berikutnya. Dalam hal keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya ini, saat ini telah mendapatkan pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa dan telah berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Progress pekerjaan konstruksi pembangunan UPT BKN Mataram secara realisasi telah selesai 100%, sedangkan untuk konsultan pengawas progress keuangan sebesar 90% dikarenakan sisa pembayaran 10% atau sebesar Rp.

92.285.400 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) akan dibayarkan tahun 2025 setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi (sesuai Permen PUPR no. 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara);



Analisis Efisiensi Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (dalam ribu)	Realisasi (dalam ribu)	Efisiensi
IKU 14	3.50	3.53	100.86%	Rp73,258,602	Rp62,641,120	15.22%

Tabel 36. Efisiensi Sumber Daya IKU Indeks Pengelolaan Aset

Berdasarkan data dalam tabel, efisiensi sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 dapat dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan antara realisasi kinerja, anggaran yang digunakan, dan faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target. IKU 14 memiliki target kinerja sebesar 3.50, dengan realisasi kinerja mencapai 3.53, yang berarti capaian kinerja melampaui target hingga 100.86%. Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp73.258.602.000, tetapi realisasi anggaran hanya Rp62.641.120.000, menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 15.22%.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak terealisasinya 100% anggaran bukan karena ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, melainkan karena pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum selesai. Faktor ini

bersifat administratif dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian Indeks Pengelolaan Aset, sehingga capaian kinerja tetap menunjukkan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam penyelesaian pembangunan UPT, hal tersebut tidak menghambat pencapaian target IKU. Selain itu, efisiensi yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal, dengan kinerja yang tetap melebihi ekspektasi meskipun tidak seluruh anggaran terserap.



Gambar 28. Gedung UPT BKN Mataram



Gambar 29. Gedung UPT BKN Gorontalo

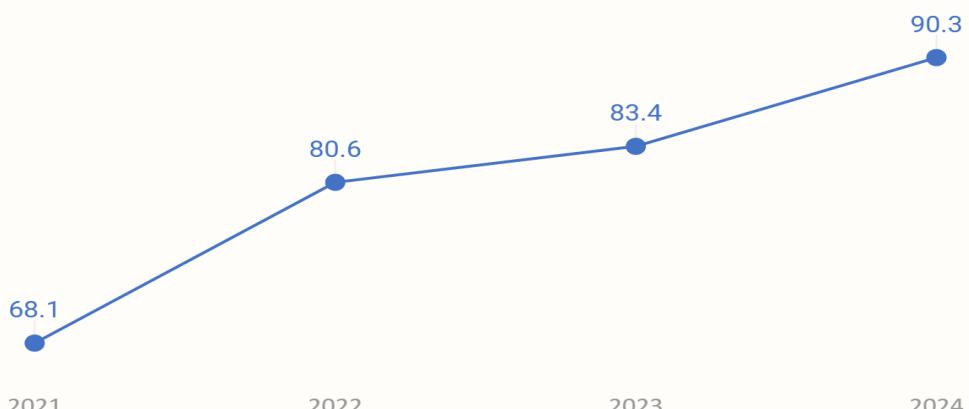
IKU 15. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP)

Indikator Kinerja Utama	Baselin	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP)	n/a	80.6	84	n/a	68	80.6	83.2	90.28	107,48%	n/a

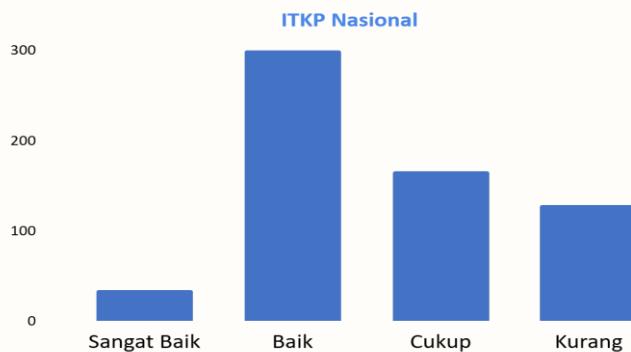
Tabel 37. Realisasi Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BKN

Tahun 2021 - 2024



Grafik 17. Progress ITKP BKN Tahun 2021-2024
(sumber: <https://pmep.lkpp.go.id/itkp>)



Grafik 18. ITKP Nasional Tahun 2024
(sumber: <https://s.id/bjAqU>)

mengantarkannya ke dalam predikat Sangat Baik.

Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan dalam aspek digitalisasi dan efektivitas pengadaan, tetapi juga menempatkan BKN sebagai salah satu dari hanya 12 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh penilaian "Sangat Baik" pada ITKP 2024. Ini merupakan prestasi yang sangat signifikan, mengingat total instansi yang dinilai sangat banyak dan tata kelola pengadaan semakin ketat.

Selain itu, peringkat nasional BKN juga meningkat signifikan, menempati posisi ke-31 dari 630 K/L/PD yang dinilai pada 2024. Ini menunjukkan bahwa BKN semakin kompetitif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pengadaan pemerintah.

Pencapaian lainnya yang patut dibanggakan adalah penghargaan "UKPBJ Proaktif" yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada BKN. Penghargaan ini menegaskan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) BKN dinilai aktif dalam mengembangkan tata kelola pengadaan yang lebih modern, transparan, dan inovatif.

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh skor 83,24, yang dikategorikan dalam predikat Baik. Namun, dalam satu tahun, BKN berhasil meningkatkan skor ITKP menjadi 90,28 pada 2024, naik 7,04 poin, yang



BKN Raih Penghargaan Proaktif dari LKPP

04/07/2024 Berita, Publikasi

Gambar 30. Penyerahan Penghargaan Proaktif dari LKPP (sumber: <https://s.id/tXjlx>)

Perkembangan Positif yang Dicapai dalam ITKP 2024

a. Lonjakan Signifikan dalam e-Purchasing

Salah satu pencapaian paling mencolok dalam ITKP 2024 adalah e-Purchasing, yang meningkat drastis dari 0,00 pada 2023 menjadi 3,96 pada 2024 dalam skala 0-5. Penggunaan katalog elektronik sektoral meningkat dari tahun sebelumnya dari Rp 41,2 Miliar menjadi Rp 353,2 Miliar disebabkan oleh pengadaan sarana prasarana seleksi CASN yang sebelumnya melalui proses tender manual.

Hal ini menunjukkan bahwa BKN telah mulai mengoptimalkan sistem e-Purchasing melalui e-Katalog dan metode pembelian elektronik lainnya, yang berkontribusi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

b. Peningkatan Maksimal dalam e-Tendering

Nilai e-Tendering BKN meningkat dari 4,62 pada 2023 menjadi 5,00 pada 2024, yang berarti mencapai nilai maksimal dalam indikator ini. Ini menunjukkan bahwa BKN telah berhasil mengadopsi sistem tender

elektronik secara menyeluruh, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan mempercepat proses lelang pengadaan.

c. Konsistensi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

BKN tetap mempertahankan nilai tinggi dalam aspek SIRUP, yaitu 9,51 pada 2024 dibandingkan 10,00 pada 2023. Meskipun ada sedikit penurunan, angka ini masih tergolong sangat baik, mencerminkan keterbukaan BKN dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

d. Peningkatan dalam Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan ITKP BKN adalah kompetensi SDM dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Nilai indikator ini naik dari 17,84 pada 2023 menjadi 24,44 pada 2024, yang menandakan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengadaan.

Lebih lanjut, BKN telah mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi SDM PBJ dengan mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai perhitungan LKPP selaku instansi pembina. Selain itu, BKN juga mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian kompetensi secara berkala, khususnya pada jenjang Madya yang hingga saat ini masih kosong. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas SDM pengadaan di BKN, sekaligus meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan PBJ.

e. Konsistensi dalam Tingkat Kematangan UKPBJ

BKN tetap mempertahankan nilai 40,00 dalam Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), yang merupakan nilai maksimal dalam indikator ini. Ini menunjukkan bahwa BKN memiliki sistem tata kelola pengadaan yang kokoh dan tidak mengalami kemunduran.

f. Toko Daring Mencapai Nilai Maksimal

BKN telah berhasil mengoptimalkan pemanfaatan Toko Daring dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan keselarasan dengan kebijakan pengadaan digital pemerintah.

Tantangan yang Masih Perlu Ditingkatkan

Walaupun BKN mengalami peningkatan yang signifikan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar bisa mendekati instansi dengan skor lebih tinggi, seperti:

a. Optimalisasi e-Kontrak

Meskipun nilai e-Kontrak tetap stabil di 4,76, masih ada ruang untuk perbaikan agar bisa mencapai nilai maksimal 5,00. BKN dapat mengoptimalkan digitalisasi kontrak dengan lebih baik, seperti melalui integrasi sistem dan peningkatan monitoring kontrak secara elektronik.

b. Mempertahankan Tren Positif dalam e-Purchasing

Meskipun e-Purchasing mengalami lonjakan drastis, BKN harus terus meningkatkan pemanfaatannya agar mendekati angka maksimal (5,00). Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kebijakan yang mendorong lebih banyak transaksi dilakukan melalui sistem ini.

c. *Benchmarking* dan Kolaborasi dengan Instansi Lain

Melakukan studi banding dengan instansi yang memiliki tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik, untuk mengadopsi praktik terbaik yang dapat diimplementasikan di BKN. Selain itu, bekerja sama dengan LKPP dan kementerian lain dalam mengembangkan strategi pengadaan yang lebih inovatif dan efisien.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 15	84	90.28	107%	Rp250,000,000	Rp252,918,033	5.45

Tabel 38. Efisiensi Sumber Daya untuk IKU 15

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa BKN berhasil mencapai efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan sumber daya untuk pengadaan barang/jasa. Target kinerja yang ditetapkan adalah 84, namun realisasi kinerja mencapai 90,28, yang berarti melebihi target hingga 107%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya pengadaan telah berjalan efektif dan menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Dari sisi anggaran, pagu yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp252.918.033, sedikit melebihi pagu yang telah direncanakan dikarenakan terjadi revisi anggaran di tahun berjalan. Namun, dengan nilai efisiensi 5,45, penggunaan anggaran tetap dalam batas yang wajar dan menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pengadaan telah dimanfaatkan secara optimal.

Faktor-Faktor yang Mendukung Efisiensi Sumber Daya ITKP

Ada beberapa faktor utama yang dapat diperkuat:

1. Optimalisasi Digitalisasi Pengadaan

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik seperti e-Purchasing, e-Tendering, dan toko daring dapat semakin dioptimalkan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam proses pengadaan. Dengan semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital, efisiensi sumber daya akan semakin meningkat, mengurangi risiko penyimpangan, serta mempercepat proses pengadaan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM PBJ

Dengan memiliki SDM PBJ yang kompeten, pengadaan dapat dilakukan dengan lebih strategis dan efisien, mengurangi pemborosan dan

meningkatkan efektivitas anggaran.

3. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data

Penggunaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dapat membantu BKN dalam mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan serta memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai rencana. Dengan analisis data yang lebih mendalam, pengambilan keputusan terkait efisiensi sumber daya dapat lebih tepat sasaran.

4. Penghargaan UKPBJ Proaktif sebagai Bukti Efisiensi

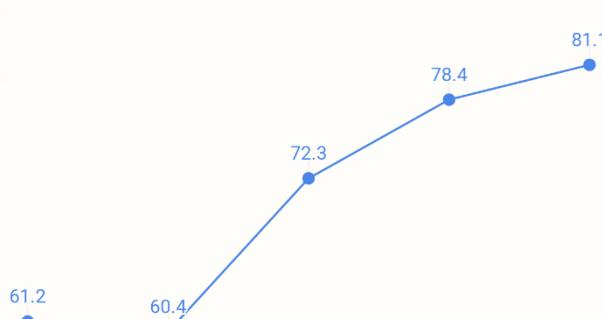
Pengakuan BKN sebagai UKPBJ Proaktif oleh LKPP tahun 2024 menjadi bukti bahwa sistem pengadaan yang diterapkan sudah semakin baik dan efisien. Dengan mempertahankan standar ini, BKN dapat terus meningkatkan efisiensi sumber daya dalam pengadaan barang/jasa.

IKU 16. Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI

Indikator Kinerja	Baseli ne	Target		Realisasi				Persen Capaian 2023	Capaian Jangka Menengah	
		2023	2024	2021	2022	2023	2024			
Hasil Kearsipan	Audit	61.3	75	80	60.3	72.3	78.4	81.1	101,38%	-

Tabel 39. Realisasi kinerja hasil audit kearsipan

Realisasi kinerja hasil audit kearsipan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun ini mampu melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun.



*Grafik 19. Capaian Nilai Hasil Audit Kearsipan
Tahun 2020-2024 (sumber: <https://s.id/tit5Z>)*

Berdasarkan hasil audit dan pengawasan ANRI, BKN memperoleh nilai pengawasan kearsipan sebesar 81,10 atau masuk dalam kategori A (Memuaskan). Selain itu, nilai

tingkat digitalisasi arsip mencapai 87,57, yang juga masuk dalam kategori A (Memuaskan)

Beberapa pencapaian utama yang menjadi keberhasilan BKN dalam bidang kearsipan antara lain:

- Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan, meskipun masih ada yang perlu disesuaikan dengan standar ANRI.
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal berjalan dengan baik, mencakup seluruh unit pengolah setingkat eselon II di kantor pusat.
- Pengelolaan arsip inaktif, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan arsip aset, sudah tertata dengan baik.
- Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) telah diterapkan di seluruh unit pengolah, mendukung proses digitalisasi arsip.
- Alokasi anggaran kearsipan secara berkelanjutan, memastikan adanya dana yang cukup untuk operasional pengelolaan arsip.

Meskipun telah mencapai predikat Memuaskan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar BKN dapat meningkatkan nilainya ke kategori AA (Sangat Memuaskan) seperti yang diraih oleh instansi lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu tantangan utama adalah penyempurnaan kebijakan kearsipan yang masih perlu disesuaikan dengan standar ANRI, khususnya terkait program arsip vital dan penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Selain itu, perlu ada penguatan pembinaan unit pengolah dalam pengelolaan arsip dinamis, termasuk peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui pelatihan berkelanjutan. Intensitas pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis ke ANRI juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan arsip jangka panjang lebih optimal.

Perbandingan dengan instansi lain menunjukkan bahwa BKN sejajar dengan instansi seperti BPK, KPK, dan Kementerian Pertahanan dalam kategori Memuaskan, tetapi masih tertinggal dari instansi yang mendapatkan kategori Sangat Memuaskan. Untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kearsipan, BKN dapat menyempurnakan kebijakan internal, meningkatkan pemanfaatan teknologi digitalisasi arsip, memperkuat sistem pengawasan, serta mempercepat pemindahan arsip statis ke ANRI. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, BKN memiliki potensi besar untuk mencapai predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam pengawasan kearsipan tahun mendatang, sekaligus memperkuat tata kelola kearsipan sebagai bagian dari birokrasi modern yang transparan dan efisien.

Rapat Koordinasi Kearsipan



Gambar 31. Capaian Nilai Hasil Audit Kearsipan Tahun 2020-2024 (sumber: <https://s.id/tit5Z>)

Laporan Rapat Koordinasi Kearsipan 2024 mencatat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu fokus utama rapat adalah peningkatan pemahaman terhadap Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang digunakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI) dalam melakukan pengawasan. Pengelolaan Arsip Dinamis masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan pembinaan dan evaluasi agar hasil audit kearsipan dapat meningkat dari kategori Baik menjadi Sangat Baik.

Dalam rakor ini, juga dibahas pentingnya penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem digitalisasi arsip di BKN. Meskipun penggunaannya sudah mulai diterapkan secara luas, masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan akses pada jam sibuk. Oleh karena itu, setiap unit kerja diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi ini untuk mempercepat pengelolaan arsip. Selain itu, dilakukan sosialisasi tentang penyusutan arsip, mencakup pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip secara berkala, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Rakor ini juga menyoroti berbagai kendala dalam pengelolaan arsip, seperti minimnya SDM khusus di bidang kearsipan, tidak jelasnya perbedaan antara arsip aktif dan inaktif, serta kurangnya sistem temu balik arsip yang cepat. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem pengelolaan arsip, serta penguatan infrastruktur kearsipan yang sesuai standar.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan BKN dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain meningkatkan nilai hasil audit arsip internal, Rakor ini juga bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dokumen negara, terutama dalam menghadapi pemindahan ibu kota ke Nusantara.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 16	80	81,1	104%	Rp209,435,000	Rp206,859,585	5,03

Tabel 40. Realisasi kinerja hasil audit kearsipan

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 16, yaitu Nilai Hasil Audit Kearsipan tahun 2024, menunjukkan kinerja yang optimal meskipun mengalami revisi anggaran. Berdasarkan tabel, BKN menetapkan target kinerja sebesar 80, sementara realisasi yang dicapai adalah 81,1, sehingga capaian kinerja mencapai 104%, melebihi target yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi anggaran, awalnya direncanakan pagu anggaran sebesar Rp250.000.000, namun mengalami revisi menjadi Rp209.435.000, menunjukkan adanya penyesuaian dalam perencanaan keuangan. Meskipun terjadi pengurangan anggaran, realisasi penggunaan mencapai Rp206.859.585, dengan tingkat efisiensi 5,03.

Capaian ini mencerminkan bahwa BKN mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, tetap mencapai target audit kearsipan, dan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa strategi, seperti optimalisasi digitalisasi arsip melalui SRIKANDI, penguatan sistem pengawasan internal, serta pembinaan SDM dalam pengelolaan arsip. Dengan efisiensi yang baik ini, BKN dapat mempertahankan kinerja optimalnya dalam pengelolaan kearsipan dan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola arsip agar semakin mendekati standar Sangat Memuaskan sesuai dengan penilaian ANRI.

SASARAN STRATEGIS 9: TERWUJUDNYA LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

IKU 17. Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas

Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target 2023	Target 2024	Realisasi					Percentase Capaian 2024	Percentase Capaian Jangka Menengah
				2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat	N/A	-	75			84,89	97,75	89,29	119,05%	-

Tabel 41. Realisasi Target IKU Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat

link data dukung : [Progress TL LHR Inspektorat s.d Desember.pdf](#)

Indikator ini merupakan indikator yang memperlihatkan sejauh mana tindak lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 yang telah diselesaikan oleh satuan kerja di BKN, perhitungan IKU ini dengan membandingkan tindak lanjut LHR yang telah dieksekusi dengan total Catatan Hasil Reviu.

Dari *Tabel 37 Realisasi Persentase Kualitas LK BKN Tahun 2023* terlihat, pada periode LK TA 2023 Audited (TW II) mendapat nilai yang paling rendah. Secara umum permasalahan yang acap kali timbul adalah pejabat KPA tidak berada di tempat sehingga proses penandatanganan Laporan Keuangan menjadi terhambat, dampaknya penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu. Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga menjadi permasalahan lainnya. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, maka *load* pekerjaan akan menumpuk dan berdampak pada lamanya proses penyusunan Laporan Keuangan. Tindak lanjut kedepannya adalah dengan memberikan surat peringatan kepada Kantor Regional yang terlambat dalam pengiriman LK.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 17	75	89.29	1.19	319.050.000	315.944.450	16.82%

Tabel 42. Efisiensi penggunaan sumber daya - IKU 17

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat tercermin dalam Tabel 43 Efisiensi Sumber Daya - IKU 17. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 319.050.000,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 315.944.450,00, efisiensi sumber daya berhasil dicapai pada nilai 16.82%.

Tindak Lanjut dalam rangka perbaikan ke depan, Sekretariat Utama berencana untuk meningkatkan pemantauan secara rutin dan melakukan pembinaan mendalam terhadap sumber daya yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan di setiap satuan kerja yang bersangkutan.

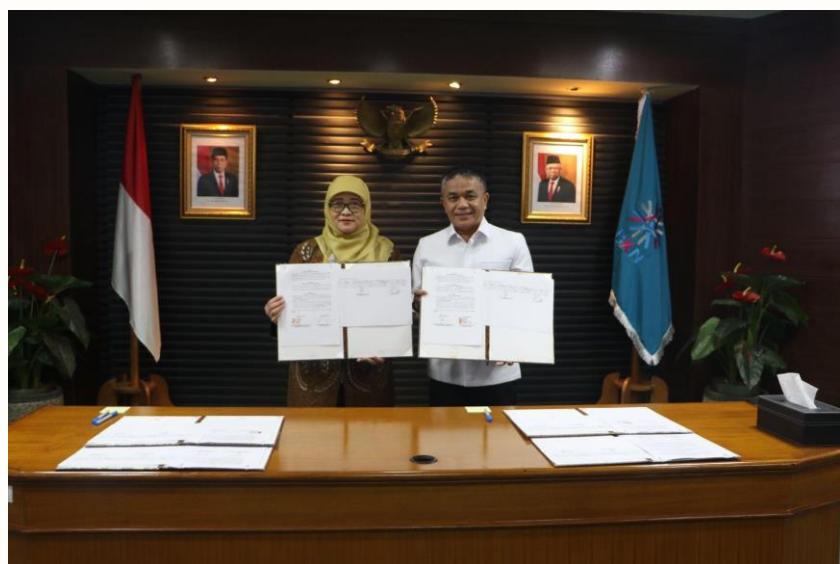
Sasaran Strategis 10: Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Bidang Manajemen ASN

IKU 18. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target 2024	Realisasi					Persentase Capaian 2024	Persentase Capaian Jangka Menengah
			2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati	N/A	95	94	85	94,25	83	77	81,05	90,22

Tabel 43. Realisasi Target IKU Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara. Mitra kerja sama Badan Kepegawaian negara terdiri atas mitra kerja sama dalam negeri dan luar negeri. Indikator persentase dokumen kerja sama yang disepakati bertujuan untuk mengukur seberapa banyak kerja sama yang dilaksanakan per tahunnya baik dalam bentuk kerja sama dalam dan luar negeri.



Gambar 32. Penandatanganan Kerja Sama BKN dengan Pemerintah Kota Palu

Sumber: Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

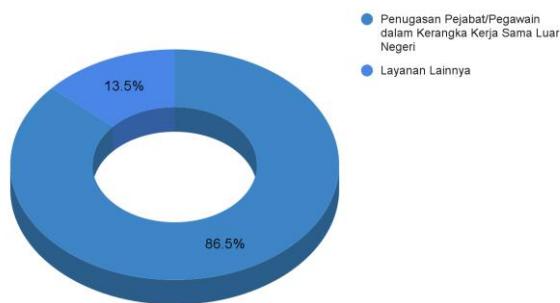
Dokumen kerja sama yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 132 dokumen sedangkan [dokumen kerja sama yang disepakati](#) sebanyak 101 dokumen kerja sama. Kerja sama yang disepakati terdiri dari 49 dokumen kerja sama dalam negeri dan 52 dokumen kerja sama luar negeri sebagai berikut:



Grafik 20. Jenis Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri

Sumber: Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, 2022

Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kerja sama dengan berbagai institusi untuk mendukung tercapainya target kinerja. Instansi tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, BUMN, BUMD. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara juga bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, dan lembaga lainnya di luar negeri yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Indonesia.



Grafik 21. persentase dokumen kerja sama yang disepakati

Pengelolaan kerja sama antar lembaga di lingkungan BKN dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama dan di cascading pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama. Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara dokumen kerja sama yang disepakati dengan dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti. Realisasi persentase dokumen kerja sama yang

disepakati pada tahun 2024 adalah **77%** dari target **95%** pada perjanjian kinerja Sekretaris Utama.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu beberapa permohonan kerja sama yang masuk ke Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang dalam pembahasan sehingga peluang kerja sama yang masuk dan selesai di tahun 2024 rendah. Untuk mengoptimalkan persentase jumlah dokumen kerja sama yang disepakati pada tahun 2025, Sekretariat Utama akan melakukan perubahan formulasi perhitungan agar persentase dokumen kerja sama yang disepakati lebih *measurable* dan mengoptimalkan koordinasi dengan mitra terkait sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati	95	77	0.81	315.213.731	315.213.731	-23,38%

Tabel 44. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 15

Pada tabel di atas, efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Kerja Sama yang Disepakati dengan pagu anggaran sebesar Rp315.213.73,001 dan realisasi anggaran sebesar Rp315.213.731,00, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai -23.38%. Pada perencanaan tahun 2024 IKU Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati mendapat anggaran sebesar Rp303.801.000,00, namun dikarenakan masifnya undangan kerja sama luar negeri sehingga pagu anggaran kerja sama mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp11.412.731,00.

Sasaran Strategis 11: Terselenggaranya Publikasi dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal

**IKU 19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN
Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya**

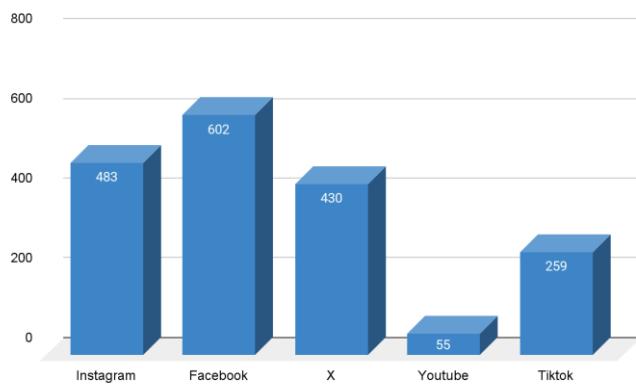
Indikator Utama	Kinerja	Baselin	Target 2024	Target 2025	Realisasi				Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian Jangka Menengah
					2021	2022	2023	2024		
Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya		N/A	98,3	N/A	93	96	96,65	121,9	120	120

Tabel 45. Realisasi Target IKU Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel di bidang kepegawaian, sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mensosialisasikan program dan kegiatannya kepada masyarakat menggunakan beberapa media publikasi. Media yang digunakan untuk publikasi diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube, dan Website.

Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya diukur melalui jumlah program dan kegiatan BKN yang telah didesiminasi melalui media sosial BKN. Persentase jumlah program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholdernya dihitung dengan membandingkan jumlah publikasi program dan kegiatan BKN yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama dengan target publikasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan

Kerjasama mendiseminasiakan program dan kegiatan BKN sejumlah 1.829 unggahan yang terdiri sebagai berikut:



Grafik 22. Media Publikasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sumber: Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Realisasi **persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya** pada tahun 2024 yaitu sebesar **121.9%** dari target **98,3%** yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Sekretaris Utama. Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN sebagai berikut:

- Penyusunan strategi komunikasi badan kepegawaian negara tahun 2024
- Pembagian *person in charge* dalam dokumentasi kegiatan/program
- Rapat Koordinasi Kehumasan yang diisi oleh praktisi komunikasi dan media

Untuk mempertahankan capaian persentase jumlah program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya, tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan strategi komunikasi tahun 2025 dan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka diseminasi informasi program/kegiatan BKN.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Persentase	98,3	121.9	1.24	Rp. 163.783.792	Rp. 163.783.792	19.36%

Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya						
---	--	--	--	--	--	--

Tabel 46. Analisis Efisiensi Sumber Daya 16

Pada tabel di atas, efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp163.783.792 dan realisasi anggaran sebesar Rp163.783.792, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 19.36%. Pada perencanaan tahun 2024 IKU Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya mendapat anggaran sebesar Rp115.499.995,00. Dalam rangka menunjang capaian IKU dengan penyusunan strategi komunikasi dan diseminasi informasi seleksi CASN tahun 2024, maka dibutuhkan perubahan alokasi anggaran sebesar Rp48.283.797,00.

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 12: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten

IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN

Indikator Kinerja Utama	Basel ine	Target 2023	Target 2024	Realisasi				Persen Capaian 2024	Persentase Capaian Jangka Menengah
				2020	2021	2022	2023		

Indeks Profesional ASN Settama BKN	N/A	82	82	70,42	78,46	74,12	78,48	85,07	103,84%	
------------------------------------	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	--

Tabel 47. Realisasi Target IKU Indeks Profesional ASN Settama BKN

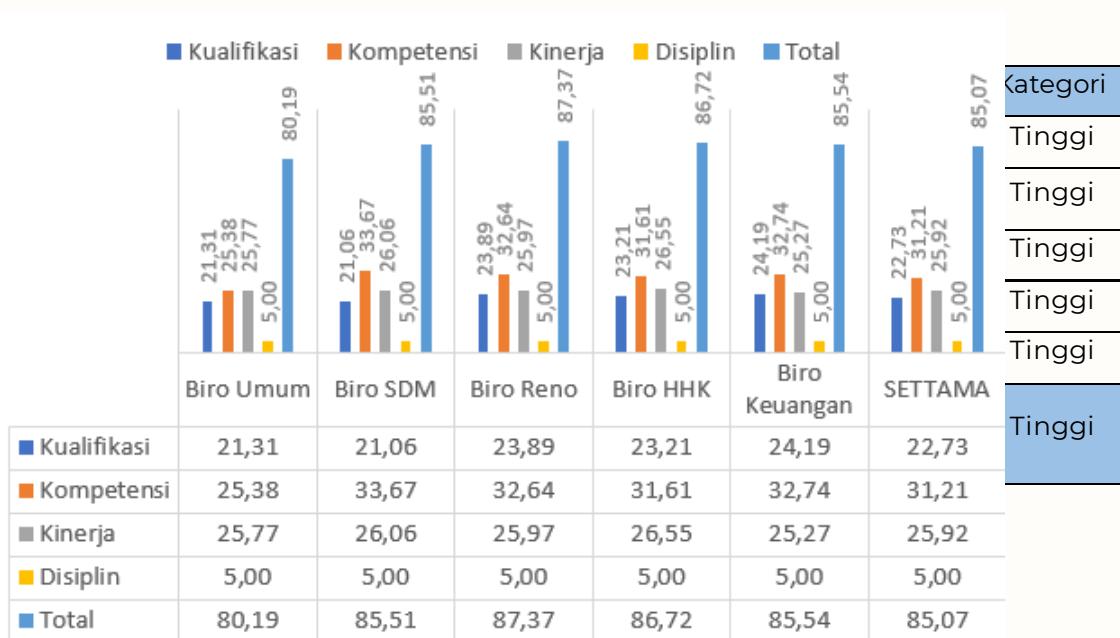
Penilaian indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan terakhir Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Perolehan Indeks Profesional tersebut kemudian dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Nilai IP 51-60, Kategori sangat rendah;
- 2) Nilai IP 61-70, Kategori rendah;
- 3) Nilai IP 71-80, Kategori sedang;
- 4) Nilai IP 81-90, Kategori tinggi; dan
- 5) Nilai IP 91-100, Kategori sangat tinggi.

Tabel 48. Perbandingan Penilaian IP ASN Sestama 2023-2024

Berdasarkan tarikan data yang bersumber dari SAPK lewat portal, nilai Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama BKN pada tahun 2024 berkategori “Tinggi” dengan rata rata nilai **85,07**. Apabila diklasifikasikan per dimensi maka Kualifikasi: **22,73** Kompetensi: **31,21** Kinerja: **25,92** Disiplin: **5,00**. Nilai Indeks profesionalitas di lingkungan sekretariat utama dapat dilihat secara terperinci pada tabel dan grafik di bawah:

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
Kualifikasi	25	20,99	22,73
Kompetensi	40	27,67	31,21
Kinerja	30	24,85	25,92
Disiplin	5	4,97	5,00
Nilai IP	100	78,48	85,07



Grafik 23. Perbandingan Penilaian IP ASN Sestama 2023-2024

Berdasarkan hasil LHE Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN ASN di lingkungan BKN Tahun 2024 Atas Dasar Penilaian Tahun 2023, Nilai IP ASN Sekretariat Utama pada tahun 2024 naik sebesar 6,59 poin menjadi **85,07**, nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan nilai yang

diperoleh pada tahun 2023 sebesar **78,48**. Dengan kenaikan yang signifikan tersebut, Nilai IP ASN Sekretariat Utama sudah termasuk dalam kategori “Tinggi”. Selain mengalami kenaikan nilai, jika dirinci nilai tiap komponen, terdapat kenaikan nilai pada tiap indikator dari tahun sebelumnya. Pertama, nilai kualifikasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan selisih nilai sebesar 1,61, peningkatan nilai ini disebabkan oleh meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat Utama dibanding dengan tahun sebelumnya. Kedua, nilai kompetensi mengalami kenaikan nilai dengan selisih nilai sebesar 3,78, hal ini disebabkan karena setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama selalu diberikan peluang dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis dan memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP setiap tahunnya yang diadakan oleh internal BKN maupun dari instansi luar. Ketiga, nilai kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,07, hal ini disebabkan oleh pemutakhiran riwayat SKP dan predikat kinerja pegawai di SIASN khususnya untuk internal Sekretariat Utama sudah terlaksana dengan baik. Terakhir, nilai komponen disiplin yang mengalami peningkatan sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya dikarenakan tingkat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin selama tahun 2023 telah menurun daripada tahun sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN IP ASN UNIT ESELON I BKN TAHUN 2024					
ESELON I	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
SETTAMA	22,73	31,21	25,92	5,00	85,07
KEDEPUTIAN PMK	23,43	34,41	26,95	5,00	89,79
KEDEPUTIAN WASDAL	22,73	32,15	28,55	5,00	88,48
KEDEPUTIAN MUTASI	21,07	30,59	25,07	5,00	81,72
KEDEPUTIAN SINKA	21,08	32,46	25,63	4,97	84,14
BKN	22,09	32,41	26,06	4,98	85,53

Tabel 50. perbandingan capaian IP ASN unit eselon I BKN

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesional Sekretariat Utama di tahun depan maka Sekretariat Utama sudah mengupayakan beberapa hal, tindak lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IP ASN Sestama diantaranya dengan terus melaksanakan kegiatan Coaching, Mentoring, Belajar Mandiri serta kegiatan Komunitas Belajar sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Sekretariat

Utama, selain itu juga akan diadakan pelatihan teknis yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui sinergi dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan juga akan diadakan seminar, webinar dan juga bimtek di setiap unit kerja di lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya agar seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Utama dapat memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP tiap tahunnya.

Link data dukung IKU 20: https://drive.google.com/drive/folders/1xb725hW6vnsqT-fPcrxoJ7zSfleD3h3O?usp=drive_link

Sasaran Strategis 13: Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses

IKU 21. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN

Indikator Kinerja Utama	Baselin	Target		Realisasi				Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah	
		2023	2024	2020	2021	2022	2023			
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN		95	100	100	95	95	100	87.8	99.2	99.2%

Tabel 51. Realisasi Target IKU Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN

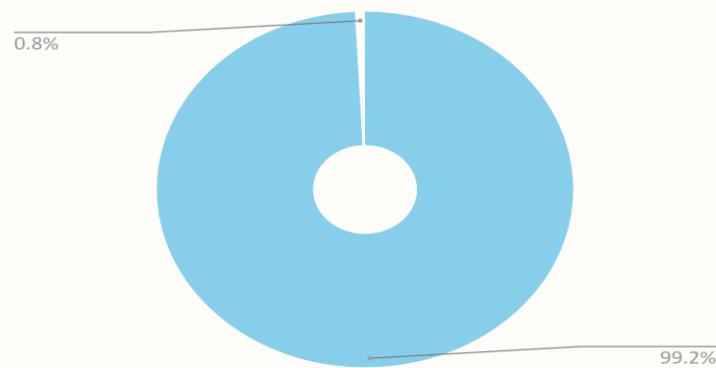
Settama BKN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam mendukung tugas dan fungsi administrasi berjalan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem informasi yang terstandar, berbagai proses kerja di Settama BKN dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan efektivitas layanan serta

mengurangi potensi kesalahan manual. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi yang baik juga sejalan dengan kebijakan transformasi digital dalam pemerintahan, terutama dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

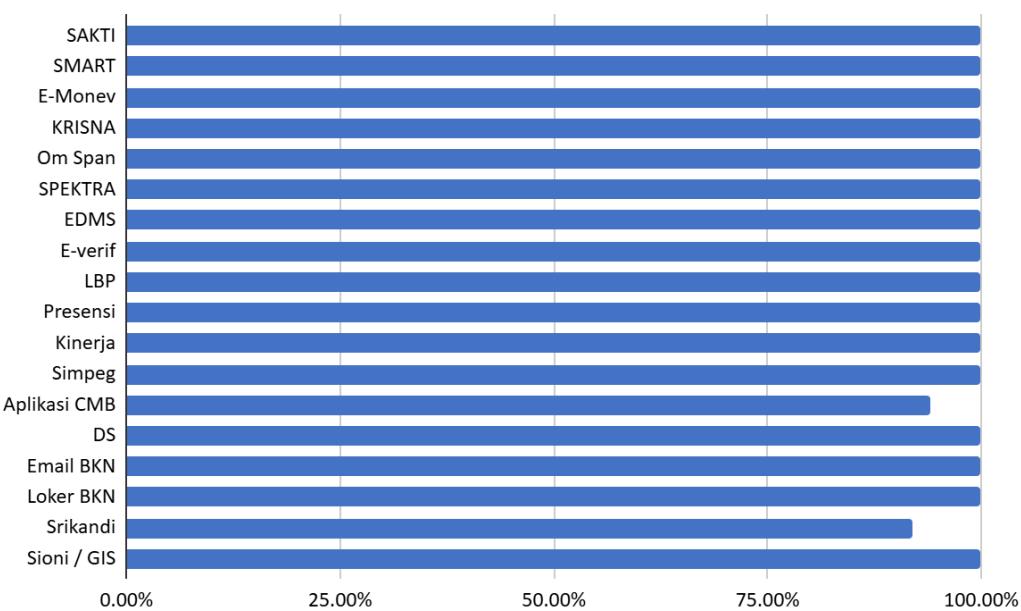
IKU ini juga berperan dalam memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan di lingkungan Settama BKN telah memenuhi standar keamanan, interoperabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dengan sistem yang terstandar, pengelolaan data menjadi lebih valid, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, sistem informasi yang baik mendukung prinsip *good governance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta aset negara.

Di era digital saat ini, keamanan dan integritas data menjadi hal yang sangat penting. Dengan sistem informasi yang sesuai standar, risiko kebocoran, kehilangan, atau manipulasi data dapat diminimalkan melalui penerapan protokol keamanan yang ketat. Selain itu, standar yang jelas juga memastikan bahwa sistem informasi di Settama BKN dapat beroperasi secara sinergis dengan unit lain di dalam maupun di luar BKN, sehingga meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, pemantauan terhadap IKU ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di Settama BKN, memastikan efisiensi birokrasi, serta menciptakan sistem yang lebih transparan, aman, dan terpercaya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Sekretariat Utama sebagai unit pengguna layanan digital di lingkungan BKN menggunakan sejumlah aplikasi dan sistem informasi yang ada di BKN sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas sehari- hari. Adapun aplikasi dan sistem informasi yang digunakan terdiri dari:

- SAKTI
- SMART
- E-Monev
- KRISNA
- Om Span
- SPEKTRA
- EDMS
- Everif
- LBP
- Presensi
- Kinerja
- Simpeg
- Aplikasi CMB
- DS
- Email BKN
- Loker BKN
- Srikandi
- GIS (Goods Inventory System)



Grafik 24. Pemanfaatan Aplikasi di lingkup Sekretariat Utama (sumber: <https://s.id/wVvVi>)

Berdasarkan data pemanfaatan sistem informasi di lingkup Sekretariat Utama (Settama) BKN, tingkat pemanfaatan sistem informasi telah mencapai 99,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah secara aktif menggunakan sistem yang tersedia. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih menghambat optimalisasi sistem informasi, di antaranya adalah seringnya error pada aplikasi LBP BKN, lambatnya sistem operasi E-Kinerja, banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi, serta keterbatasan kapasitas email BKN.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kendala tersebut adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk kapasitas server dan integrasi sistem yang belum optimal. *Error* yang sering terjadi pada aplikasi LBP BKN dapat disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan sistem, *bug* yang belum diperbaiki, atau ketidakstabilan jaringan. Selain itu, lambatnya sistem E-Kinerja dapat dipengaruhi oleh beban server yang tinggi atau kurangnya optimasi pada sistem operasi.

Kurangnya integrasi antar aplikasi juga menjadi tantangan besar dalam efisiensi kerja. Banyaknya aplikasi yang digunakan tanpa keterpaduan

dapat menyebabkan duplikasi kerja, kesulitan dalam pencarian data, serta meningkatkan potensi kesalahan dalam input informasi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas email BKN menunjukkan bahwa infrastruktur penyimpanan data perlu ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi yang semakin besar.

Tindak Lanjut yang Dapat Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. Peningkatan stabilitas dan pemeliharaan sistem.
2. Mengimbau pegawai untuk mengisi laporan kinerja sebelum tenggat waktu guna mengurangi beban saat batas pengisian.
3. Melakukan pemantauan beban sistem dan meningkatkan kapasitas server jika diperlukan.
4. Mengembangkan platform tunggal atau dashboard terpadu yang menghubungkan berbagai aplikasi agar lebih mudah diakses dan digunakan.
5. Mengurangi jumlah aplikasi yang tidak perlu dan memastikan adanya interoperabilitas antar sistem yang digunakan.
6. Melakukan evaluasi terhadap sistem penyimpanan email dan meningkatkan kapasitasnya agar dapat menampung lebih banyak data.
7. Mendorong kebijakan pengarsipan dan penghapusan email lama secara otomatis untuk mengurangi beban penyimpanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pemanfaatan sistem informasi di Settama BKN dapat lebih optimal, meningkatkan efisiensi kerja pegawai, serta mendukung keberlanjutan transformasi digital di lingkungan BKN.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
-----------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	--------------------	-----------

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN	100	99.2	99.2%	0	0	n/a
--	-----	------	-------	---	---	-----

Tabel 52. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 18

Menghitung efisiensi sumber daya tanpa pagu anggaran tidak memungkinkan, karena efisiensi dalam konteks anggaran dihitung dengan mempertimbangkan berapa banyak sumber daya yang dialokasikan (pagu anggaran) dibandingkan dengan hasil yang dicapai (realisasi anggaran dan kinerja).

Secara umum, efisiensi sumber daya sering dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Jadi, tanpa pagu anggaran, kita hanya bisa melihat hasil kinerja tetapi tidak bisa menilai efisiensinya secara akurat.

Sasaran Strategis 14: Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

IKU 22. Persentase pelaksanaan rencana aksi RB Settama BKN

Indikator Kinerja Utama	Baselin e	Target		Realisasi				Persen Capaian 2023	Persen Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Settama	N/A	100%	100%	N/A	N/A	98,4%	100%	100%	100%

Tabel 53. Realisasi Target IKU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN

Persentase pelaksanaan rencana aksi RB Settama BKN merupakan akumulasi pelaksanaan Rencana Aksi RB di setiap Unit Kerja Eselon II di lingkup Settama. Pertama, Biro Perencanaan dan Organisasi sudah menyusun rencana aksi dengan total kegiatan selama tahun 2024 mencapai 61 kegiatan. Jika dirinci lebih lanjut dari total 61 kegiatan tersebut Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan seluruh Rencana Aksi (realisasi 100%).

Selanjutnya sepanjang tahun 2024, tingkat realisasi Rencana Aksi RB Biro Umum sudah mencapai realisasi 100%. Diikuti dengan Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas Hukum dan Kerjasama, serta Biro Keuangan yang juga sudah mencapai realisasi pelaksanaan rencana aksi RB 100%. Hal ini berarti pada tahun 2024 tingkat pelaksanaan rencana aksi RB di lingkungan Settama sudah mencapai 100%.

Jika digambarkan ke dalam tabel, tingkat realisasi Rencana Aksi di lingkup Sekretariat Utama dibandingkan dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Persentase 2023	Persentase 2024
Biro Reno	100%	100%
Biro Umum	92%	100%
Biro SDM	100%	100%
Biro HHK	100%	100%
Biro Keuangan	100%	100%
Rata-rata Sestama	98,4%	100%

Tabel 54. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Unit Eselon II Settama

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan realisasi rencana aksi RB BKN. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi rencana aksi RB Biro Umum pada tahun lalu sebesar 92% lalu meningkat pada tahun ini menjadi 100%. Seluruh bukti dukung realisasi Rencana Aksi RB Settama dapat diakses pada link berikut <https://s.id/EvidenceRBSettama>.

Selain itu, jika dibandingkan dengan unit kerja eselon I lainnya di BKN, realisasi Rencana Aksi Settama tergambar dalam tabel berikut.

Unit Kerja	Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian	Kedeputian Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Sekretariat Utama	Kedeputian Mutasi Kepegawaian	Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian
Nilai	100%	100%	100%	97,53%	75%

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Rencana Aksi RB Settama sudah baik karena sudah terlaksana 100%.

IKU 23. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target		Realisasi			Persen Capaian 2024	Persen Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2022	2023	2024		
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama	73,95	80	80	72,55	68,35	70,15	87,69	81,56

Badan Kepegawaian Negara								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 55. Realisasi Target IKU Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup

Asas Akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dalam rangka menjalankan Asas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP di lingkup BKN dilaksanakan penilaiannya oleh Inspektorat dan dilakukan terhadap unit setingkat Eselon I. Sekretaris Utama BKN sebagai unit setingkat Eselon I di BKN juga telah dievaluasi pelaksanaan AKIP Tahun 2024 oleh inspektorat yang hasil evaluasinya dapat dilihat pada Laporan Nomor 062/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, menunjukan bahwa Sekretaris Utama memperoleh nilai sebesar **70,15** dengan predikat **BB (Sangat Baik, Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan**

anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/Koordinator).

Adapun **rinciannya** adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,3	22,8
2	Pengukuran Kinerja	30	20,4	21,6
3	Pelaporan Kinerja	15	9,15	10,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,5	15,25
Nilai Hasil Evaluasi			68,35	70,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Tabel 56. Komponen Penilaian Pelaksanaan AKIP Settama Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Laporan LHE AKIP Settama yang dirilis oleh Inspektorat

Berdasarkan penilaian di atas, secara keseluruhan nilai hasil evaluasi AKIP memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, **namun** jika melihat komponen yang dinilai masih ada nilai yang mengalami penurunan, yaitu pada komponen **Perencanaan Kinerja**. Beberapa evaluasi yang menjadi catatan pada perencanaan kinerja Settama diantaranya:

1. Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, Penetapan target belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan sumber data yang memadai.
2. Terdapat IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 s.d 2024 yang belum *sustainable* karena terdapat perbedaan indikator pada tiap tahun.

Selain itu, nilai implementasi AKIP di lingkungan Settama juga juga berada pada posisi ke-3 jika dibandingkan dengan nilai implementasi AKIP Unit Eselon I. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Unit Kerja	Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian	Kedeputian Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Sekretariat Utama	Kedeputian Mutasi Kepegawaian	Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian
Nilai	73,15	72,65	70,15	68,20	67,85

Nilai tersebut mengartikan bahwa implementasi AKIP Settama masih perlu dilakukan peningkatan agar pelaksanaannya bisa optimal.

Tindak lanjut kedepan untuk periode tahun 2025 Sekretariat Utama merencanakan perbaikan diantaranya:

1. Melakukan penyelarasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai dari mulai dokumen Renstra, Renja sampai ke dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Melakukan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai untuk mendukung kinerja dan melaksanakan pengukuran serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melibatkan seluruh komponen organisasi ;
3. Melakukan reviu laporan kinerja dan hasil reviu/catatan-catatan didokumentasikan dengan baik;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang (*bottom up* dari kinerja biro-biro menjadi Sekretaris Utama).

Selanjutnya, dalam Skor atas Hasil Evaluasi AKIP di Lingkup Settama terdapat anggaran untuk mendukung capaian IKU tersebut. Anggaran yang dialokasikan pada dokumen renja tahun 2024 sebesar Rp. 141.875.000,00 namun saat berjalannya tahun anggaran, realisasi dalam mencapai IKU ini adalah sebesar Rp. 121.608.730,- .

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 23	80	70,15	87,69	Rp. 141.875.000,-	Rp. 121.608.730,-	8,68%

Tabel 57. Efisiensi penggunaan sumber daya IKU 23

Berdasarkan data di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tercermin dalam Tabel x: Efisiensi penggunaan Sumber Daya - IKU 23. Dengan pagu anggaran sebesar Rp . 141.875.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp 121.608.730,- skor efisiensi sumber daya yang didapat adalah sebesar 8,68%.

Sasaran Strategis 15: Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

IKU 24. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN

Indikator Kinerja Utama	Batasan	Target 2024	Realisasi						Percapaian 2024	Capaian Jangka Menengah
			2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkung Settama BKN	98,5%	100%	79.70 %	91.78 %	90,58 %	97,61 %	93,87 %	93,87%	93,87%	

Tabel 58. Realisasi Target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN

Link bukti dukung: [Realisasi unit kerja Kantor Pusat BKN TA 2024.pdf](#)

Pada tahun **2024**, Pagu anggaran Sekretariat Utama BKN setelah *refocusing* anggaran adalah sebesar Rp402.036.229.000,00 Dari pagu anggaran tahun 2024 tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp377.410.982.187,00 dengan persentase daya serap sebesar 93,87% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan, dimana realisasi tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp336.592.072.000,00 Sekretariat Utama BKN dapat merealisasikan sebesar Rp328.556.206.919,00 atau sebesar 97,61%.

No.	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama	1,860,903,000	1,860,606,213	99.98%	296,787
2	Biro Perencanaan dan Organisasi	3,825,094,000	3,813,613,285	99.70%	11,480,715
3	Biro Sumber Daya Manusia	5,101,892,000	5,006,677,878	98.13%	95,214,122
4	Biro Keuangan	282,988,049,000	271,293,470,735	95.87%	11,694,578,265
5	Biro Umum	108,260,291,000	95,436,614,076	88.15%	12,823,676,924
Total		402,036,229,000	377,410,982,187	93.87%	24,625,246,813

Tabel 59. Realisasi Anggaran di Unit Kerja Settama Tahun 2024

Sumber: Olahan Data

Dampak dari cover penyiapan kenaikan tunjangan kinerja BKN yang direncanakan untuk bisa naik di tahun 2024, namun hingga akhir Desember 2024 hal itu belum terealisasi mengakibatkan realisasi belum bisa terserap secara maksimal. Selain itu, sisa anggaran listrik, air, dan telepon yang tidak dapat dipastikan besaran tagihannya dalam satu tahun anggaran juga menjadi salah satu faktor lainnya. Hal tersebut menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.

Realisasi anggaran tertinggi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada tahun 2024 adalah pada Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama dengan pagu anggaran sebesar Rp1,860,903,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp1,860,606,21,- atau sebesar 99.98%.

Faktor Keberhasilan yang utama pada unit kerja Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama dalam pencapaian realisasinya di antara lain adalah:

1. Kegiatan di unit kerja sebagian besar terlaksana semua. Jika ada kegiatan yang mungkin tidak bisa terserap, maka segera mengajukan revisi POK pada kegiatan yang lain sehingga penyerapan bisa maksimal;
2. Revolving GU dilakukan setiap bulan;
3. Pemaksimalan penyerapan pada pengajuan tagihan saat PTUP.

Sedangkan posisi terendah pada realisasi Biro Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp108,260,291,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp95,436,614,076,- atau sebesar 88,15%. Kedepan diharapkan adanya evaluasi rutin dan penyesuaian dengan perencanaan, sehingga kelebihan anggaran bisa dialokasikan dengan lebih baik.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 24	100	93.87	0.94	402.036.229.000	377.410.982.187	-0.01

Tabel 60. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 21

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN dapat dilihat pada Tabel Efisiensi Sumber Daya IKU 24, dengan pagu anggaran sebesar Rp 402.036.229.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 377.410.982.187,00 efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai -0.01%.

IKU 25. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target		Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
		2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	52%	71.87%	71.87%	71.87%

Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 61. Realisasi Target IKU Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

link data dukung: [MI 48 Inspektur Penyampaian Revisi Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d Semester II TA 2024 \(3\).pdf](#)

Indikator ini untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan/audit terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama. Pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan diwujudkan dengan tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Tujuannya adalah kepatuhan unit atas tindak lanjut atau rekomendasi BPK/Inspektorat.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat No. 023/AI.06/ND/H/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA . 2024. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit tiap unit di Sekretariat Utama yaitu:

Table 55:

No	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status				Persentase Sesuai
			Sesuai	Pengajuan tetapi Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL	
1	Biro Reno	3	3	0	0	0	100%
2	Biro HHK	4	4	0	0	0	100%
3	Biro Keuangan	7	4	3	0	0	86%
4	Biro Umum	12	7	1	2	2	67%
5	Biro SDM	2	1	0	1	0	50%
Total		28	19	4	3	2	82.14%

*Tabel 62. Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK Tiap Unit di Sestama
sumber: Sesuai ND Inspektorat No. 23/AI.06/ND/H/2025 Tanggal 17 Januari 2025*

No	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status				Persentase Sesuai
			Sesuai	Pengajuan salah Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL	
1	Biro Keuangan	4	0	0	1	3	0%
	Total	4	0	0	1	3	0%

Tabel 63. Rincian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Tiap Unit di Sestama

sumber: Sesuai ND Inspektorat No.015/AI.01/ND/H/2025 Tanggal 09 Januari 2025

Rekomendasi atas TL BPK antara lain:

1. Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi, Penanggung Jawab Dukungan TI, Pengelolaan Data dan Kearsipan serta Penanggung Jawab Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN.
2. BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.
3. Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan Kepala Subbagian Belanja Pegawai Kantor Pusat, dan PPABP Kanreg terkait agar cermat dalam menghitung besaran pembayaran kepada pegawai.
5. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN lebih cermat dalam menyusun HPS.
6. Memerintahkan PPK Biro Umum BKN dan Direktorat PPU lebih cermat dalam membuat HPS dan mengendalikan pekerjaan.
7. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang dimiliki BKN.
8. BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan.

Temuan yang ada di Biro Umum pada LHP tahun 2023 terdapat dua temuan yaitu:

1. Pengelolaan aset tetap pada tiga satuan kerja BKN Belum Tertib telah ditindaklanjuti namun statusnya belum sesuai.
2. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan belanja modal pada dua unit kerja belum memadai telah ditindaklanjuti dengan memerintahkan PPK dan pejabat pengadaan Biro Umum BKN agar melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan belanja modal di masa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku namun statusnya masih belum sesuai.

Kemudian temuan yang ada di Biro Keuangan, yaitu:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai BKN Tidak Sesuai Ketentuan dengan tindak lanjut mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2. Namun hasil tindak lanjut masih belum sesuai.
2. Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Tidak Sesuai Ketentuan dengan tindak lanjut Memerintahkan PPSPM melakukan pembayaran Belanja Pegawai mengacu pada ketentuan berlaku. Atas Hasil Penilaian BPK, untuk menambahkan dokumen berupa: Surat Perintah Kepala Biro Keuangan kepada PPSPM. Namun hasil tindak lanjut masih belum sesuai.
3. Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang dimiliki BKN. Dengan tindak lanjut Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi SIAVA sebagai alat

kontrol kelengkapan dokumen. Namun hasil tindak lanjut masih belum sesuai.

4. Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangan Hotel Tidak Sesuai Ketentuan dengan tindak lanjut Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangan Hotel. Namun belum ditindaklanjuti.
5. Pengelolaan Kas Pada Tiga Satker BKN Belum Memadai dengan tindak lanjut Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran. Lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran. Atas Hasil Penilaian BPK, untuk menambahkan dokumen berupa: BA Cash Opname. Namun belum sesuai.

Temuan untuk Biro SDM antara lain:

1. Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP dengan tindak lanjut Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Namun tindak lanjut belum sesuai.

Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP dengan tindak lanjut Menyusun kebijakan terkait batasan dan sanksi terhadap pegawai yang lupa mengisi daftar hadir. Namun hasil rekomendasi belum sesuai.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
-----------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	--------------------	-----------

IKU 25	100	71.87	0.72	144.994.000	142.142.182.453	-36.44
--------	-----	-------	------	-------------	-----------------	--------

Tabel 64. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKU 25

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Tindak Lanjut Temuan hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat dapat dilihat pada Tabel Efisiensi Sumber Daya IKU 25, dengan pagu anggaran sebesar Rp144.994.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp142.182.453,00 efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai -36,44%.

III.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.2.1. BKN Mendapatkan Anggaran SBSN Terkait Pembangunan UPT

Isu strategis terkait kondisi pelayanan UPT saat ini adalah pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat adalah minimnya fasilitas dan standar pelayanan, khusus pelayanan proses seleksi ASN dan penilaian kompetensi serta pendekatan layanan dasar kepegawaian dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta keterbatasan pengembangan UPT sebagai lini terdepan dalam pelayanan kepegawaian, hal ini disebabkan belum terbangunnya gedung UPT sesuai standar yang ditentukan. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, pengajuan anggaran pembangunan dengan menggunakan APBN dengan rupiah murni, mengalami kendala belum terealisasi, mencermati kondisi tersebut, Pada tahun 2023, BKN mencoba mengajukan pembiayaan pembangunan UPT dengan Skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dimana SBSN merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur adalah melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang SBSN yang menyebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek.



Gambar 33. RDP Komisi II DPR Persetujuan Tambahan Anggaran 2024

Berkat usaha dan kerja keras dari semua pihak, akhirnya BKN berhasil mendapatkan anggaran pembangunan UPT Gorontalo dan Mataram untuk tahun 2024 melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp60.604.570.000,- Hal ini menjadi terobosan dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan kantor pelayanan BKN dan dapat diduplikasi untuk keperluan lainnya yang membutuhkan dana yang besar. Sedangkan untuk tahun 2025, BKN mendapatkan dana SBSN untuk pembangunan UPT BKN Pangkalpinang dan Jambi senilai Rp61.700.715.000.

3.2.2. BKN meraih ***Biggest Improvement Indeks BerAKHLAK*** dari KemenPANRB

BKN termasuk salah satu instansi yang menerima penghargaan The Biggest Improvement Indeks BerAKHLAK dari Kementerian



Gambar 34. The Biggest Improvement Indeks BERAKHLAK

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas kepada Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto pada acara Appreciation Day ASN Culture Festival 2023 yang diselenggarakan di The Tribrata Dharmawangsa pada Kamis (14/12/2023).

Penghargaan ini diberikan kepada BKN karena telah melaksanakan dengan baik Survei Indeks BerAKHLAK tahun 2023 yang merupakan survei kedua yang telah dilaksanakan untuk memonitor dan evaluasi implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. Indeks BerAKHLAK ini menunjukkan bahwa rata-rata pegawai pada lingkungan BKN sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.

3.2.3. Implementasi WA Blast

Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi dan transformasi pemberian informasi, Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah berhasil mengimplementasikan perubahan dari penggunaan SMS Blast menjadi WA Blast. Transformasi ini mencerminkan komitmen Biro Keuangan untuk mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Pergeseran dari SMS Blast ke WA Blast membawa dampak positif terhadap kualitas dan aksesibilitas informasi yang disampaikan kepada para stakeholder. WhatsApp Blast tidak hanya menawarkan platform pesan singkat, tetapi juga menambahkan fitur-fitur modern seperti gambar, video, dan tautan, yang dapat lebih memperkaya dan memperjelas pesan yang disampaikan. Capaian transformasi ini menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih dinamis dan responsif, memungkinkan Biro Keuangan untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efisien kepada berbagai pihak terkait. Dengan demikian, Biro Keuangan dapat menjawab tuntutan era digital dan memberikan

layanan informasi yang lebih adaptif serta responsif kepada para stakeholders di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

3.2.4. Implementasi Pedoman Verifikasi

Biro Keuangan dengan penuh dedikasi dan fokus pada peningkatan efisiensi, berhasil mencapai prestasi yang signifikan dalam implementasi pedoman verifikasi dan standardisasi dokumentasi pertanggungjawaban keuangan. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja dan kualitas dokumentasi yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan biro tersebut. Penerapan pedoman verifikasi dan standar dokumentasi tersebut menandai langkah berani Biro Keuangan dalam memastikan konsistensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap norma-norma keuangan yang berlaku. Pedoman ini mencakup panduan yang jelas dan terstruktur untuk verifikasi setiap elemen pertanggungjawaban keuangan, termasuk proses audit dan pemeriksaan secara menyeluruh. Capaian ini tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan internal di Biro Keuangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini, Biro Keuangan dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pertanggungjawaban keuangan dijalankan sesuai dengan prosedur standar, menghasilkan dokumentasi yang berkualitas tinggi, dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terkait, termasuk pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap keuangan biro tersebut.

3.2.5. BKN Raih Predikat A Indeks Pelayanan Publik dari Kemenpan RB



Gambar 35. nilai Index Pelayanan Publik BKN

Badan Kepegawaian Negara meraih predikat prima (A) dalam kategori Kementerian/Lembaga dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah salah satu upaya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pada penilaian tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara diwakili oleh Kantor Regional V BKN Jakarta, Kantor Regional XI BKN Manado, dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Badan Kepegawaian Negara berhasil memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4.69 serta termasuk dalam 6 (enam) instansi terbaik kategori Kementerian/Lembaga. Melalui pemantauan dan evaluasi pelayanan publik diharapkan dapat secara berkelanjutan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* dan membangun kepercayaan publik yang positif.

III.3. CAPAIAN ANGGARAN

No.	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama	1,860,903,000	1,860,606,213	99.98%	296,787
2	Biro Perencanaan dan Organisasi	3,825,094,000	3,813,613,285	99.70%	11,480,715
3	Biro Sumber Daya Manusia	5,101,892,000	5,006,677,878	98.13%	95,214,122
4	Biro Keuangan	282,988,049,000	271,293,470,735	95.87%	11,694,578,265
5	Biro Umum	108,260,291,500	95,436,614,076	88.15%	12,823,676,924
Total		402,036,229,000	377,410,982,187	93.87%	24,625,246,813

Tabel 65. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama

Pagu anggaran Sekretariat Utama BKN setelah *refocusing* anggaran adalah sebesar Rp402,036,229,000 Dari pagu anggaran tahun 2024 tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp377,410,982,187,- dengan persentase daya serap sebesar 93,87% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan, dimana

realisasi tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp336.592.072.000, Sekretariat Utama BKN dapat merealisasikan sebesar Rp328.556.206.919 atau sebesar 97,61%. Dampak dari cover penyiapan kenaikan tunjangan kinerja BKN yang direncanakan untuk bisa naik di tahun 2024, namun hingga akhir Desember 2024 hal itu belum terealisasi. Selain itu, sisa anggaran listrik, air, dan telepon yang tidak dapat dipastikan besaran tagihannya dalam satu tahun anggaran juga menjadi salah satu faktor lainnya. Hal tersebut menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.



“Komunikasi terkadang bukan apa yang pertama kali kamu dengar, dengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi dengarkan alasannya.” , ,

MOHAMMAD RIDWAN, S.T., M.Eng.

**Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Kerja Sama
Badan Kepegawaian Negara**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Utama tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu tahap awal Sekretariat Utama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Badan Kepegawaian Negara. Sekretariat Utama BKN melaksanakan visi Badan Kepegawaian Negara yaitu “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Misi dan tujuan Sekretariat Utama dirumuskan dalam 1 (satu) sasaran strategis (SS), yang merupakan Sasaran Strategis ke-7 (tujuh) Badan Kepegawaian Negara yaitu “Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel”. Sasaran Strategis ini dijabarkan dalam 15 Sasaran Strategis Sekretariat Utama dengan 25 indikator kinerja utama.

SS / IKU	2024		
	T	R	%
SS.1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten			
IKU 1. Indeks Profesional BKN	82	85,53	104,30
SS.2. Tersedianya sistem informasi ASN BKN yang andal dan mudah diakses			
IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN	4	4,19	104,75
SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
IKU 3. Indeks Pelaksanaan RB BKN	85	N/A	N/A
IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas BKN	80	69,26	86,58
IKU 5. Level Maturitas SPIP	4	3	75
IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	390	380	97,44
SS.4. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel			
IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	100
IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	93	93,21	100,23
SS.5. Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif			
IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN	94	123,5	120
IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91	94,67	104,03

SS / IKU	2024		
	T	R	%
SS.6.Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretariat Utama			
IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama	95	91,62	96,44
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIF			
SS.7 Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensinya			
IKU 12. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya	95	95	100
SS.8 Terselenggaranya RB BKN sesuai road map RB BKN			
IKU 13. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB General	100	100	100
IKU 14. Indeks Pengelolaan Aset	3,5	3,53	100,86
IKU 15. Indeks Tata Kelola PBJ	84	90,28	107
IKU 16. Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	80	81,1	101,38
SS.9. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel			
IKU 17. Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088	75	89,29%	119,05
SS.10. Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN			
IKU 18. Persentase Dokumen Kerjasama yang disepakati	95	77	81,05
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE			
SS.11 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal			
IKU 19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya	98,3	121,9	120
SS.12 Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten			
IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN	82	85,13	103,84
SS.13 Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang andal dan mudah diakses			
IKU 21. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Lingkup Settama	100	99,2	99,2

SS / IKU	2024		
	T	R	%
SS.14. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
IKU 22. Persentase pelaksanaan rencana Aksi RB Settama	100	100	100
IKU 23. Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	80	70,15	87,69
SS.15. Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel			
IKU 24. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	100	93,87	93,87
IKU 25. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100	71,87	71,87

Meskipun capaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2024 berkategori baik, namun diakui bahwa masih banyak hal-hal yang harus terus ditingkatkan mengingat dinamika pemerintah terus berkembang dan tuntutan stakeholder akan kualitas layanan yang semakin meningkat. Untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang dirumuskan langkah-langkah dengan fokus perbaikan pada hal-hal berikut:

1. Rencana Strategis Sekretariat Utama 2025-2029 menjadi acuan dalam penetapan dan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025-2029
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka mendukung fungsi Sekretariat Utama sebagai katalis kinerja unit-unit yang ada di BKN baik dari segi peningkatan kapasitas SDM, perbaikan POS AP, restrukturisasi organisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta memperkuat fungsi koordinasi, kolaborasi dengan unit kerja di BKN.
3. Memperkuat fungsi perencanaan dan anggaran yang tepat untuk mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan. Selain itu mulai menyusun skema *reward* dan *punishment* bagi unit terkait kinerja dan

anggaran yang mereka capai.

4. Integrasi sistem informasi dan optimalisasi penggunaan e-governance dalam proses bisnis yang ada di lingkungan BKN sehingga proses kerja dapat lebih efektif.
5. Optimalisasi penerapan manajemen kinerja organisasi pada tahun 2025 di lingkungan BKN diharapkan dapat memberikan panduan bagi unit kerja baik dalam perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja sehingga pada muaranya kinerja unit dapat langsung mendorong peningkatan kinerja instansi.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja baik bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, unit kerja di lingkungan BKN, maupun pembaca. Kedepan, Sekretariat Utama BKN akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi. Sekretariat Utama BKN menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan mandat untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024

Dengan ini kami sampaikan bahwa telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi infromasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggungjawab tim pelaporan Sekretariat Utama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta 21 Pebruari 2025

¥